



Katalog BPS: 3308003

STATISTIK MODAL SOSIAL

STATISTICS OF SOCIAL CAPITAL

2012



BADAN PUSAT STATISTIK

Statistik Modal Sosial
Statistics of Social Capital
2012

http://www.bps.go.id

Statistik Modal Sosial

Statistics of Social Capital

2012

ISBN: 978-979-064-650-6

No. Publikasi/Publition Number: 04310.1302

Katalog BPS/BPS Catalog: 3308003

Ukuran Buku/Book Size: 18 cm x 25 cm

Jumlah Halaman/Number of Pages: xiv + 160 halaman/pages

Naskah/Manuscript:

Subdirektorat Statistik Ketahanan Wilayah

Sub-directorate of Region Resilience Statistics

Gambar Kulit/Cover Design:

Subdirektorat Publikasi dan Kompilasi Statistik

Sub-directorate of Statistical Compilation and Publication

Diterbitkan oleh/Published by:

Badan Pusat Statistik, Jakarta-Indonesia

BPS – Statistics Indonesia

Boleh dikutip dengan menyebut sumbernya

May be cited with reference to the source

KATA PENGANTAR

Modal sosial merupakan sumber daya yang melekat dalam hubungan sosial. Modal sosial terbentuk dari hubungan sosial antar individu sehingga besaran modal sosial tergantung pada kapabilitas sosial individu. Pada umumnya, para ahli memandang modal sosial setara dengan modal pembangunan lainnya, yaitu modal ekonomi dan modal manusia. Modal sosial bahkan tidak jarang dilihat sebagai katalisator atau perekat yang memungkinkan modal-modal pembangunan lainnya bekerja saling memperkuat untuk menghasilkan keluaran yang lebih efektif dan efisien. Dalam *World Summit for Social Development* pada tahun 1995, disebutkan bahwa pembangunan sosial yang menjadikan manusia sebagai pusat perhatian dalam pembangunan, harus mendapatkan perhatian besar.

Modal sosial di Indonesia tercermin dalam berbagai kegiatan yang dilakukan secara gotong royong. Gotong royong sudah mengakar dalam kehidupan bermasyarakat, terutama berbagai kegiatan yang bertujuan untuk kepentingan bersama. Salah satu wujudnya terlihat pada saat terjadi musibah yang menimpa negeri ini, masyarakat dari berbagai kelompok dan golongan serentak memberikan bantuan berupa penggalangan dana hingga membantu proses evakuasi.

Informasi terkait statistik modal sosial yang terdapat dalam masyarakat Indonesia masih sangat terbatas. Publikasi Statistik Modal Sosial 2012 berusaha memberikan informasi besaran modal sosial dalam masyarakat Indonesia dalam tiga kelompok indikator, yaitu sikap percaya dan toleransi, keanggotaan dalam perkumpulan dan jejaring lokal, serta aksi bersama. Publikasi ini diharapkan dapat memberikan perspektif tentang pentingnya modal sosial dalam pembangunan. Instansi pemerintah baik pusat maupun daerah sebagai pengambil kebijakan dapat memanfaatkan publikasi ini sebagai salah satu input dalam merancang, melaksanakan dan mengevaluasi program pembangunan.

Kepada semua pihak yang telah memberikan kontribusi dalam penyusunan publikasi ini disampaikan ucapan terima kasih dan penghargaan yang tinggi. Kritik dan saran demi perbaikan publikasi serupa di masa mendatang sangat diharapkan.

Jakarta, Oktober 2013
Kepala Badan Pusat Statistik
Republik Indonesia

Dr. Suryamin, M.Sc

PREFACE

Social capital is a resource embedded in social relationship. Social capital is made up of social relationships between people, so the amount of social capital depends on individual's social capabilities. In general, experts look at social capital equivalent to other development capital, such as economic capital and human capital. Social capital is seen as a catalyst or an adhesive which allows assets of other development work to reinforce each other to produce more effective and efficient output. In the World Summit for Social Development in 1995, it was mentioned that social development, which made people as the centre of attention in development, had to gain considerable attention.

Social capital is reflected in various collective actions called 'gotong royong'. Gotong royong in Indonesia is rooted in the society, especially variety of activities aimed to collective or common interest. One of the forms that can be seen is when there is disaster in this country, society from various groups and backgrounds help each other in fund-raising until aid the evacuation process.

However, the information regarding statistics of social capital in Indonesian society so far is still very limited. The Publication of Social Capital Statistics 2012 tries to give information about the amount of social capital in Indonesian society based on three indicators of social capital approaches, namely trust and tolerance; membership in local associations and networks; and collective action. This publication is expected to provide perspective about the importance of social capital for development. National and local government as policy makers should use this publication as an input in order to design, implement and evaluate national development programs.

To all parties who have contributed in the preparation of this publication, I would like to convey gratitude and high appreciation. Criticism and suggestion to improve similar future publication will be highly appreciated.

*Jakarta, October 2013
Statistics Indonesia - BPS*

*Dr. Suryamin, M.Sc
Chief Statistician*

DAFTAR ISI - CONTENTS

	Halaman <i>Page</i>
KATA PENGANTAR	
<i>PREFACE</i>	iii - iv
DAFTAR ISI	
<i>CONTENTS</i>	v
DAFTAR TABEL	
<i>LIST OF TABLES</i>	viii
DAFTAR GAMBAR	
<i>LIST OF FIGURES</i>	x
DAFTAR LAMPIRAN	
<i>LIST OF APPENDICES</i>	xii
I. Pendahuluan	
<i>Introduction</i>	1
1.1. Latar Belakang	
<i>Background</i>	3
1.2. Ruang Lingkup	
<i>Scope</i>	7
1.3. Tujuan	
<i>Objectives</i>	8
1.4. Manfaat	
<i>Benefits</i>	8
1.5. Sistematika Penyajian	
<i>Structures of Presentation</i>	9
II. Kerangka Kerja Modal Sosial	
<i>Social Capital Framework</i>	13
2.1. Peran Modal Sosial dalam Pembangunan	
<i>Social Capital Contribution in The Development</i>	15

2.2. Teori Modal Sosial <i>Social Capital Theory</i>	18
2.3. Cakupan dan Tipologi Modal Sosial <i>Scope and Typology of Social Capital</i>	21
2.4. Statistik Modal Sosial di Berbagai Negara <i>Social Capital Statistics in Some Countries</i>	25
III. Metodologi <i>Methodology</i>	29
3.1. Sumber Data <i>Data Source</i>	31
3.2. Metode Analisis <i>Analytical Method</i>	32
3.3. Konsep dan Definisi <i>Concept and Definition</i>	33
IV. Sikap Percaya dan Toleransi <i>Trust and Tolerance</i>	41
4.1. Sikap Percaya Terhadap Tokoh di Lingkungan Desa <i>Trust In Village's Figures</i>	44
4.2. Sikap Percaya Terhadap Tetangga <i>Trust In Neighbours</i>	49
4.3. Toleransi <i>Tolerance</i>	54
V. Kelompok dan Jejaring <i>Groups and Networks</i>	59
VI. Resiprositas dan Aksi Bersama <i>Reciprocity and Collective Action</i>	69
6.1. Resiprositas <i>Reciprocity</i>	71
6.2. Aksi bersama <i>Collective Action</i>	75

VII. Indeks Modal Sosial <i>Index of Social Capital</i>	81
7.1. Pengukuran Indeks Modal Sosial <i>Measurement of Social Capital Index</i>	84
7.2. Indeks Modal Sosial Menurut Klasifikasi Wilayah <i>Social Capital Index By Regions Classification</i>	89
7.3. Modal Sosial dan Pembangunan <i>Social Capital and Development</i>	91
7.4. Modal Sosial dan Permasalahan Sosial <i>Social Capital and Social Problems</i>	98
7.5. Kesimpulan <i>Conclusion</i>	101
Lampiran <i>Appendices</i>	105
Daftar Pustaka <i>Bibliography</i>	157

DAFTAR TABEL - *LIST OF TABLES*

	Halaman <i>Page</i>
Tabel 4.1. Persentase Rumah Tangga yang Percaya Terhadap Tokoh di Lingkungan Desa Menurut Provinsi, 2012 <i>Percentage of Households Who Trust The Village's Figures By Province, 2012</i>	46
Tabel 4.2. Persentase Rumah Tangga yang Percaya Terhadap Tetangga Menurut Provinsi, 2012 <i>Percentage of Households Who Trust The Neighbours By Province, 2012</i>	50
Tabel 4.3. Persentase Rumah Tangga yang Senang Terhadap Kegiatan oleh Suku Bangsa Lain dan Agama Lain di Lingkungan Tempat Tinggal Menurut Provinsi, 2012 <i>Percentage of Households Who Feel Happy About Other Ethnics and Religious Activities in The Neighbourhood By Province, 2012</i>	56
Tabel 6.1. Persentase Rumah Tangga Menurut Kesiapan Membantu Orang Lain dan Persepsi Kemudahan Mendapat Pertolongan di Lingkungan Tempat Tinggal, 2012 <i>Percentage of Households By Readiness of Helping Others and Perception of Getting Help in The Neighbourhood, 2012</i>	74
Tabel 6.2. Persentase Rumah Tangga yang Sering Berpartisipasi dalam Aksi Bersama di Lingkungan Tempat Tinggal Menurut Provinsi , 2012 <i>Percentage of Households Who Often Participate in Collective Action in The Neighbourhood By Province, 2012</i>	78
Tabel 7.1. Variabel dan Faktor Pembentuk Indeks Modal Sosial, 2012 <i>Variables and Factors of Social Capital Index, 2012</i>	85
Tabel 7.2. Laju Pertumbuhan Produk Domestik Regional Bruto Menurut Provinsi, 2009-2012 <i>Growth of Gross Domestic Regional Products By Province, 2009-2012</i>	94

Tabel 7.3.	Persentase Penduduk Miskin Menurut Provinsi, 2009-2012 <i>Percentage of Poor People By Province, 2009-2012.....</i>	96
Tabel 7.4.	Tingkat Pengangguran Terbuka Menurut Provinsi, 2010-2012 <i>Unemployment Rate By Province, 2010-2012</i>	97
Tabel 7.5.	Persentase Desa yang Mengalami Konflik Massal Menurut Provinsi dan Jenis Konflik, 2008 dan 2011 <i>Percentage of Village That Suffer Massive Conflicts By Province and Types of Conflicts, 2008 and 2011</i>	100

DAFTAR GAMBAR - *LIST OF FIGURES*

	Halaman <i>Page</i>
Gambar 2.1. Indikator Input Bagi Kesejahteraan Manusia dan Keterkaitannya <i>Key Inputs To Human Well-Being and Their Inter-Relationships</i>	16
Gambar 2.2. Model Modal Sosial Lin <i>Lin's Social Capital Model.....</i>	19
Gambar 4.1. Persentase Rumah Tangga Menurut Persepsi Kemudahan Mendapatkan Pertolongan dan Sikap Percaya Terhadap Tokoh di Lingkungan Desa, 2012 <i>Percentage of Households By Perception of Getting Help from Others and Trust in The Village's Figures, 2012.....</i>	49
Gambar 4.2. Persentase Rumah Tangga Menurut Persepsi Kemudahan Mendapatkan Pertolongan dan Sikap Percaya Terhadap Tetangga di Lingkungan Desa, 2012 <i>Percentage of Households By Perception of Getting Help from Others and Trust in Neighbours in The Village.....</i>	53
Gambar 4.3 Persentase Rumah Tangga Menurut Persepsi Kemudahan Mendapatkan Pertolongan dan Tanggapan Terhadap Kegiatan oleh Suku atau Agama Lain, 2012 <i>Percentage of Households By Perception of Getting Help from Others and Response To Other Ethnics or Religious Activities, 2012...</i>	57
Gambar 5.1. Persentase Rumah Tangga Menurut Klasifikasi Wilayah dan Keikutsertaan dalam Kelompok/Organisasi di Lingkungan Tempat Tinggal, 2012 <i>Percentage of Households By Region Classification and Participation in Groups or Organizations in The Neighbourhood, 2012</i>	62
Gambar 5.2. Persentase Rumah Tangga Menurut Provinsi dan Keikutsertaan dalam Kelompok/Organisasi di Lingkungan Tempat Tinggal, 2012 <i>Percentage of Households By Province and Participation in Groups or Organizations in The Neighbourhood, 2012</i>	64

Gambar 5.3. Persentase Rumah Tangga Menurut Tingkat Partisipasi dalam Kegiatan Bersama dan Keikutsertaan dalam Kelompok/Organisasi di Lingkungan Tempat Tinggal, 2012 <i>Percentage of Households By Participation in Joint Activities and Participation in Groups/Organizations in The Neighbourhood, 2012..</i>	66
Gambar 5.4. Persentase Rumah Tangga menurut Partisipasi dalam Kegiatan Sosial dan Keikutsertaan dalam Kelompok/Organisasi, 2012 <i>Percentage of Households By Participation in Social Activities and Participation in Groups or Organizations, 2012</i>	67
Gambar 6.1. Persentase Desa yang Mengalami Kejadian Perkelahian Massal Antar Warga Menurut Provinsi, 2011 <i>Percentage of Villages That Suffer Massive Fighting Between Local People By Province, 2011</i>	79
Gambar 7.1 Kontribusi Setiap Faktor Pembentuk Indeks Modal Sosial, 2012 <i>Contribution of Each Factor of Social Capital Index, 2012</i>	86
Gambar 7.2. Indeks Modal Sosial Menurut Provinsi, 2009 dan 2012 <i>Social Capital Index By Province, 2009 and 2012</i>	88
Gambar 7.3 Indeks Modal Sosial Menurut Klasifikasi Wilayah, 2012 <i>Social Capital Index By Region Classification, 2012</i>	89
Gambar 7.4 Indeks Modal Sosial 2012 dan Indeks Pembangunan Manusia 2011 <i>Social Capital Index 2012 and Human Development Index 2011</i>	92

DAFTAR LAMPIRAN - LIST OF APPENDIXS

	Halaman Page
Lampiran 1. Persentase Rumah Tangga Menurut Provinsi dan Tingkat Kepercayaan Terhadap Aparatur Desa/Kelurahan dalam Menjalankan Tugas, 2012 <i>Percentage of Households By Province and Level of Trust In Village's Apparatus in Running Tasks, 2012.....</i>	107
Lampiran2. Persentase Rumah Tangga Menurut Provinsi dan Tingkat Kepercayaan Bahwa Tokoh Masyarakat Berperan dalam Membantu Mengatasi Masalah Warga, 2012 <i>Percentage of Households By Province and Level of Trust In Community Leader's Role in Helping People Problem, 2012</i>	110
Lampiran 3. Persentase Rumah Tangga Menurut Provinsi dan Tingkat Kepercayaan Bahwa Tokoh Agama Berperan Sebagai Panutan/Penuntun Moral, 2012 <i>Percentage of Households By Province and Level of Trust That Religious Figure's Role as Moral Guidance, 2012</i>	113
Lampiran 4. Persentase Rumah Tangga Menurut Provinsi dan Tingkat Kepercayaan Menitipkan Rumah pada Tetangga Saat Seluruh Anggota Rumah Tangga Bepergian, 2012 <i>Percentage of Households By Provinsi and Level of Trust To Leave The House To Neighbours When All Household Members Travelling, 2012</i>	116
Lampiran 5. Persentase Rumah Tangga Menurut Provinsi dan Tingkat Kepercayaan Menitipkan Anak Usia 0 - 12 Tahun, 2012 <i>Percentage of Households By Province and Trust To Leave The Children Aged 0 - 12 Years Old, 2012.....</i>	119

Lampiran 6. Persentase Rumah Tangga Menurut Provinsi dan Tanggapan Terhadap Kegiatan di Lingkungan Tempat Tinggal oleh Sekelompok Orang dari Suku Bangsa Lain, 2012 <i>Percentage of Households By Province and Response to Activities in The Neighbourhood By a Group of People from Other Ethnics, 2012 ..</i>	122
Lampiran 7. Persentase Rumah Tangga Menurut Provinsi dan Tanggapan Terhadap Kegiatan di Lingkungan Tempat Tinggal oleh Sekelompok Orang dari Agama Lain, 2012 <i>Percentage of Households By Province and Response to Activities in The Neighbourhood By a Group of People from Other Religions, 2012 ..</i>	125
Lampiran 8. Persentase Rumah Tangga Menurut Provinsi dan Banyaknya Organisasi/Kelompok yang Diikuti di Lingkungan Tempat Tinggal, 2012 <i>Percentage of Households By Province and Number of Organizations/Groups That Followed in The Neighbourhood, 2012....</i>	128
Lampiran 9. Persentase Rumah Tangga Menurut Provinsi dan Kesiapan Membantu Orang Lain yang Membutuhkan Pertolongan di Lingkungan Tempat Tinggal, 2012 <i>Percentage of Households By Province and Readiness of Helping Others That Need Help in The Neighbourhood, 2012.....</i>	131
Lampiran 10. Persentase Rumah Tangga Menurut Provinsi dan Persepsi Kemudahan Mendapatkan Pertolongan dari Tetangga, 2012 <i>Percentage of Households By Provinci and Perception of Getting Help from Neighbours, 2012.....</i>	134
Lampiran 11. Persentase Rumah Tangga Menurut Provinsi dan Partisipasi dalam Kegiatan Bersama Untuk Membantu Warga yang Sedang Mengalami Musibah, 2012 <i>Percentage of Households By Province and Participation in Joint Activities to Help People Who Are Experiencing Disasters, 2012</i>	137
Lampiran 12. Persentase Rumah Tangga Menurut Provinsi dan Partisipasi dalam Kegiatan Bersama Untuk Kepentingan Umum, 2012 <i>Percentage of Households By Province and Participation in Joint Activities for Public Interest, 2012</i>	140

Lampiran 13. Persentase Rumah Tangga Menurut Provinsi dan Partisipasi dalam Kegiatan Sosial Keagamaan, 2012 <i>Percentage of Households By Province and Participation in Religious Social Activities, 2012.....</i>	143
Lampiran 14. Persentase Rumah Tangga Menurut Provinsi dan Partisipasi dalam Kegiatan Sosial Kemasyarakatan, 2012 <i>Percentage of Households By Province and Participation in Society Social Activities, 2012.....</i>	146
Lampiran 15. Persentase Desa yang Melakukan Kegiatan Kerja Bakti Untuk Kepentingan Umum Menurut Provinsi dan Klasifikasi Wilayah, 2011 <i>Percentage of Villages That Held 'Kerja Bakti' for Public Interest By Province and Region Classification, 2011</i>	149
Lampiran 16. Persentase Desa yang Melakukan Kegiatan Gotong Royong Untuk Mengantisipasi Bencana Alam Menurut Provinsi, 2008 dan 2011 <i>Percentage of Villages That Held Mutual Cooperation in Anticipation of Natural Disaster, 2008 and 2011</i>	150
Lampiran 17. Persentase Desa yang Mengalami Kejadian Perkelahian Massal Antar Warga Menurut Provinsi, 2008 dan 2011 <i>Percentage of Villages That Suffer Massive Fighting Between Local People By Province, 2008 and 2011</i>	153

PENDAHULUAN

INTRODUCTION

1

http://www.bps.go.id

PENDAHULUAN *INTRODUCTION* 1

1.1. Latar Belakang

Negara Kesatuan Republik Indonesia merupakan negara kepulauan yang terletak di antara dua benua dan dua samudera. Dua pertiga luas wilayah Indonesia merupakan lautan dimana terdapat 17.504 pulau tersebar di seluruh wilayah Indonesia (Kementerian Dalam Negeri, 2005) dan 15,12 persen desa di Indonesia berbatasan langsung dengan laut (Badan Pusat Statistik - BPS, 2011). Letak geografis ini memberikan berkah kepada bangsa Indonesia berupa sumber daya alam yang berlimpah dengan biodiversitas yang tinggi.

Jumlah penduduk Indonesia yang mencapai 237,6 juta jiwa (BPS, 2010) membuat Indonesia menjadi negara dengan penduduk terbesar ke-4 di dunia (*Population Reference Bureau*, 2011). Selain itu, selama kurun waktu 2011 hingga 2012, Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Indonesia naik tiga peringkat dari peringkat 124 menjadi peringkat 121 dari 187 negara (*United Nations Development Programme*, 2013). Jumlah penduduk yang banyak ditambah dengan kualitas manusia yang semakin meningkat menunjukkan penduduk Indonesia potensial menjadi modal pembangunan yang berperan sebagai penggerak pembangunan.

1.1. *Background*

Indonesia is an archipelago located between two continents and two oceans. Two-thirds area of Indonesia is ocean where there are 17,504 islands spread in all Indonesia territory (Ministry of Home Affairs, 2005) and 15.12 percent of villages in Indonesia are in coastal areas (Statistics Indonesia - BPS, 2011). This geographical position gives much profit to Indonesia such as abundant natural resources with high biodiversity.

Indonesian population that reached 237.6 million people (Statistics Indonesia - BPS, 2010) made Indonesia as the fourth most populated country in the world (Population Reference Bureau, 2011). In addition, during 2011 to 2012 period, Human Development Index (HDI) of Indonesia increased three levels from 124th to 121th among 187 countries (United Nations Development Programme, 2013). Large population together with increasing human qualities show that Indonesian population are potential for capital as an engine of development.

Kekayaan alam dan penduduk Indonesia menjadi modal awal bangsa ini untuk melaksanakan pembangunan demi tercapainya kesejahteraan bagi seluruh rakyat Indonesia. Keberhasilan pembangunan telah ditunjukkan oleh berbagai kemajuan di bidang ekonomi. Laju pertumbuhan ekonomi Indonesia telah meningkat 6,5 persen selama tahun 2010-2011 (BPS, 2013). BPS juga mencatat, pendapatan perkapita penduduk meningkat dari 1.177 dolar AS (tahun 2004) menjadi 3.592 dolar AS (tahun 2012). Penduduk miskin turun dari 16,66 persen pada 2004, menjadi 11,37 persen pada Maret 2013 (BPS). Tingkat pengangguran terbuka juga dapat diturunkan dari 9,86 persen pada 2004 menjadi 5,92 persen pada Februari 2013 (BPS).

Namun di sisi lain, ketika pertumbuhan ekonomi Indonesia meningkat, tren ketimpangan pendapatan yang diukur dengan Angka Koefisien Gini juga meningkat. Dengan kata lain, pendapatan perkapita yang tinggi ternyata hanya dinikmati oleh sebagian kecil penduduk Indonesia. Pada tahun 2011, ketimpangan pendapatan di Indonesia cenderung meningkat pada tingkatan yang cukup mengkhawatirkan, yaitu 0,41, tertinggi sepanjang sejarah (Yustika, dkk, 2012). Ketimpangan pendapatan tersebut menjadi isu utama penyebab terjadinya berbagai permasalahan sosial di Indonesia.

Natural resources and population of Indonesia become initial capital for this country to carry out development in order to achieve well-being of all Indonesians. Development successes have been showed by numerous advances in economics field. The economic growth increased 6.5 percent during 2010-2011 (Statistics Indonesia – BPS, 2013). Income per capita also rose from 1,177 dollar in 2004 to 3,592 dollar in 2012. Poor people decreased from 16.66 percent in 2004 to 11.37 percent in March 2013 (Statistics Indonesia - BPS). Unemployment rate can be reduced from 9.86 percent in 2004 to 5.92 percent in February 2013 (Statistics Indonesia - BPS).

On the other hand, when Indonesian economic growth increased, trend of income inequality as measured by the Gini Coefficient also increased. In other words, high per capita incomes in fact were only enjoyed by minority of Indonesian population. In 2011, the income inequality in Indonesia tended to increase at alarming level, which is 0.41, the highest in history (Yustika, et.al, 2012). The income inequality becomes the major cause of many social problems in Indonesia.

Jumlah kasus kejahatan di Indonesia terus meningkat dari tahun ke tahun. Berdasarkan data dari Markas Besar Kepolisian Republik Indonesia (Mabes Polri), sebanyak 332.490 kasus kejahatan dilaporkan pada tahun 2010, meningkat menjadi 347.605 kasus pada tahun 2011 (BPS, 2011). Selang waktu terjadinya kejahatan menjadi lebih cepat dari 1 menit 35 detik pada tahun 2010 menjadi 1 menit 31 detik pada tahun 2011. Hal ini menyebabkan risiko penduduk untuk terkena kejahatan juga meningkat dari 142 per 100.000 penduduk pada tahun 2010 menjadi 149 penduduk pada tahun 2011. Selain itu, wilayah terjadinya perkelahian massal juga meluas, dari 3,03 persen desa pada tahun 2008 menjadi 3,26 persen desa pada tahun 2011 (BPS, 2011).

Selama ini, orientasi pembangunan cenderung ke arah pembangunan ekonomi sehingga perlu diiringi oleh pembangunan di bidang sosial. Pembangunan sosial tidak hanya diukur melalui peningkatan akses pelayanan seperti kesehatan dan pendidikan, melainkan juga melalui peningkatan kapabilitas manusia untuk bertindak secara kreatif. Hal ini sejalan dengan Sen (1987) yang menyatakan "kapabilitas sosial" individu berperan penting dalam menggerakkan potensi individu sehingga mampu memenuhi kebutuhan hidup dan mencapai kesejahteraan yang diinginkan.

The number of crime cases continues to increase from year to year. Based on data from Central Headquarters of Indonesian National Police, there were 332,490 cases of crime reported in 2010, increased to 347,605 cases in 2011 (Statistics Indonesia – BPS, 2011). Time interval of crime occurrences (crime clock) was also shorten from 1 minute 35 seconds in 2010 to 1 minute 31 seconds in 2011. This result in people getting more risks of crime (crime rate) which increased from 142 per 100,000 population in 2010 to 149 people in 2011. Furthermore, coverage of massive fighting also extended, from 3.03 percent villages in 2008 became 3.26 percent in 2011 (Statistics Indonesia - BPS, 2011).

So far, orientations of development tend toward economic development, so it should be accompanied by social development. Social development is not only measured by improved access of services such as health and education, but also measured by human capabilities improvement to act creatively. This is suitable with Sen (1987) who says that individual "social capabilities" plays an important role in mobilizing individual potential so it can fulfill life needs and achieve the desired prosperity.

Kemampuan sosial individu dapat meningkatkan potensi diri mereka dalam memenuhi kebutuhan dasar, melaksanakan peran sosial serta menghadapi goncangan dan tekanan kehidupan. Kemampuan sosial individu dapat menjadi modal sosial yang bekerja melalui kelompok dan jejaring sosial di mana individu menjadi bagian di dalamnya. Modal sosial melekat dalam hubungan sosial sehingga salah satu strategi pembangunan yang dapat dilakukan adalah pemberdayaan masyarakat. Pembangunan sosial penduduk secara swadaya dapat membentuk usaha pelayanan masyarakat guna memberdayakan masyarakat.

Keberadaan modal sosial sangat kental terasa dalam masyarakat Indonesia. Modal sosial tercermin dalam berbagai kegiatan yang dilakukan secara gotong royong. Bahkan 'gotong royong' sudah mengakar dalam kehidupan bermasyarakat, terutama berbagai kegiatan yang bertujuan untuk kepentingan bersama. Tingginya modal sosial juga telah menumbuhkan rasa solidaritas dan kebersamaan di antara masyarakat. Salah satu wujudnya terlihat pada saat terjadi musibah yang menimpa negeri ini, seperti: tsunami Aceh, gempa Yogyakarta, dan sebagainya. Masyarakat dari beragam kalangan melakukan aksi sosial, seperti: penggalangan dana, pemberian makanan dan non makanan, dan bantuan proses evakuasi.

Individual social capabilities can increase skill to fulfill basic needs, execute social role and reconcile shocks and stresses of life. Individual social capabilities can be social capital which works through groups or social networks where individual become part of them. Social capital embedded in social relationships so that one of the development strategies which can be done is through community empowerment. Social development can form community services independently in order to empower communities.

The existence of social capital in Indonesian society is strongly felt. Social capital is reflected in various actions which are collective or 'gotong royong'. Gotong royong in Indonesia is embedded in the society, especially in variety of activities aimed to collective or common interest. High social capital has been foster a sense of solidarity and unity among people. One of the forms that can be seen is when there is a disaster, for example: Aceh tsunami, earthquake Yogyakarta earthquake and so on. People from all walks of life carried out social activities, for instance: fundraising, provision of food and non-food assistance, and aid in evacuation process.

Namun, informasi terkait statistik modal sosial yang terdapat dalam masyarakat Indonesia masih sangat terbatas. Publikasi Statistik Modal Sosial 2012 berusaha memberikan informasi tersebut berdasarkan tiga jenis pendekatan indikator modal sosial, yaitu (1) sikap percaya dan kepatuhan terhadap norma yang berlaku; (2) keanggotaan dalam perkumpulan dan jejaring lokal; dan (3) aksi bersama. Publikasi ini menjadi langkah awal bagi BPS untuk menyajikan statistik modal sosial secara berkesinambungan.

1.2. Ruang Lingkup

Publikasi ini menyajikan statistik modal sosial dengan sumber data utama adalah hasil Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) dengan Modul Sosial Budaya dan Pendidikan (MSBP) tahun 2012. Unit analisis terkecil dalam publikasi ini adalah provinsi karena metodologi survei yang digunakan telah dirancang untuk dapat menyajikan angka estimasi pada tingkat provinsi dan nasional. Publikasi ini juga dilengkapi oleh data-data pendukung pada masing-masing provinsi, seperti Statistik Potensi Desa, Produk Domestik Regional Bruto (PDRB), Kemiskinan, Pengangguran, dan Indeks Pembangunan Manusia (IPM).

However, information regarding statistics of social capital in Indonesian society in a comprehensive manner so far is still very limited. Publication of Social Capital Statistics 2012 provides information based on three types of social capital indicators, namely (1) trust and adherence to norms; (2) membership in local associations and networks; and (3) collective action. This publication is the first step for Statistics Indonesia - BPS to present continuing statistics of social capital.

1.2. Scope

This publication presents statistics of social capital with main data source is the National Socio-Economic Survey especially Module of Socio-Cultural and Educational, which was conducted in 2012. The smallest unit of analysis in this publication is province due to survey methodology that has been designed to be able to present estimation on the provincial and national levels. This publication is also complemented by the supporting data in each province, such as Village Potential Statistics, Gross Regional Domestic Products, Poverty, Unemployment, and The Human Development Index (HDI).

1.3. Tujuan

Publikasi Statistik Modal Sosial 2012 mempunyai tujuan utama untuk menyajikan data dan informasi terkait kondisi modal sosial masyarakat Indonesia menurut provinsi. Tujuan khususnya adalah:

1. Menyediakan data dan informasi terkait sikap percaya dan kepatuhan terhadap norma yang berlaku, keanggotaan dalam kelompok/organisasi dan jejaring lokal serta aksi bersama dalam kehidupan masyarakat.
2. Menyediakan data dan informasi terkait indeks komposit modal sosial menurut provinsi.
3. Memberikan gambaran umum mengenai hubungan modal sosial dan kemajuan pembangunan suatu wilayah.

1.4. Manfaat

Publikasi ini dapat memberikan perspektif tentang pentingnya modal sosial bagi pembangunan. Instansi pemerintah baik pusat maupun daerah sebagai pengambil kebijakan diharapkan dapat memanfaatkan publikasi ini sebagai salah satu input dalam rangka merancang, melaksanakan dan mengevaluasi program pembangunan nasional.

1.3. Objectives

The main objective of Publication of Social Capital Statistics 2012 is to provide data and information related to condition of society social capital by province. The specific objectives are:

1. *Provides data and information related to trust and adherence to norms; memberships in groups/organizations and local networks; and collective action in community.*
2. *Provides data and information related to the composit index of social capital by province.*
3. *Provides a general overview of the relationship of social capital and the development of a region.*

1.4. Benefits

This publication can give perspective about importance of social capital for development. National and local government as policy makers should use this publication as an input in order to design, implement and evaluate national development programs.

1.5. Sistematika Penyajian

Statistik modal sosial dalam publikasi ini disajikan berdasarkan tiga kelompok pendekatan indikator modal sosial yang berperan dalam akumulasi modal sosial pada komunitas masyarakat setingkat desa, yaitu (1) indikator sikap percaya dan toleransi, (2) kelompok dan jejaring, serta (3) resiprositas dan aksi bersama. Selain itu, publikasi ini juga menyajikan besaran modal sosial tersebut dalam satu indikator komposit, yaitu Indeks Modal Sosial.

Gambaran mengenai sikap percaya anggota masyarakat terhadap para tokoh di lingkungan desa dan sikap toleransi terhadap perbedaan suku dan agama yang ada dalam masyarakat desa yang mewakili indikator sikap percaya dan toleransi disajikan pada Bab 4. Indikator tersebut diharapkan dapat mencerminkan keberlangsungan nilai-nilai dan norma yang ada dalam masyarakat desa. Bab ini juga ingin memperlihatkan manfaat yang diperoleh dari sikap percaya dan toleransi yang dimiliki masyarakat dengan menghubungkan indikator tersebut dengan kemudahan memperoleh pertolongan dari tetangga.

1.5. Structures of Presentation

Statistics of social capital in this publication is presented by using three groups of proxy indicators of social capital that play role in the accumulation of social capital in community-village level, namely (1) trust and tolerance indicator, (2) groups and networks indicator, and (3) reciprocity and collective action indicator. In addition, this publication also presents amount of social capital in a single composite indicator, which is called Social Capital Index.

Overview of trust of society members to their community figures in village and tolerance to ethnics and religious differences in village society is represented by trust and tolerance indicators in Chapter 4. These indicators are expected to reflect sustainability of values and norms that exist in village society. This chapter also shows benefits gained from trust and tolerance in communities by linking this indicators with ease of obtaining help from neighbours.

Gambaran mengenai keanggotaan dalam berbagai kelompok/organisasi di lingkungan desa mewakili indikator kelompok dan jejaring modal sosial yang disajikan pada Bab 5. Indikator ini diharapkan dapat menjelaskan besarnya jejaring yang memfasilitasi terjalinnya hubungan sosial yang lebih erat antar anggota masyarakat di lingkungan desa. Perbedaan jumlah kelompok/organisasi yang diikuti akan berpengaruh terhadap partisipasi anggota masyarakat dalam berbagai kegiatan yang dilaksanakan di lingkungan desa.

Partisipasi anggota masyarakat dalam berbagai aksi bersama yang dilakukan di lingkungan tempat tinggal merupakan output dari tingginya modal sosial yang ada dalam masyarakat. Kohesifitas masyarakat juga diperlihatkan oleh adanya kesiapan rumah tangga untuk membantu warga lain dan kemudahan rumah tangga untuk memperoleh pertolongan. Semua itu disajikan dalam Bab 6. Selain itu, disajikan pula hubungan antara kohesifitas masyarakat, yang digambarkan dengan partisipasi dalam aksi bersama dalam lingkungan tempat tinggal, dengan permasalahan sosial yang sering terjadi dalam masyarakat, seperti perkelahian massal.

Overview of membership in local associations in village society is represented by groups and networks indicators in Chapter 5. Input indicators are expected to explain width of networking to facilitate tighter social relation within members of society in the village. Differences in amount of membership in local associations affect participation of society members in various activities carried out in the village.

Participation of community members in various collective actions carried out in the neighbourhood is output of high social capital that exists in society. Community cohesiveness is also shown by readiness of household to help other member in the community and ease of household to obtain help. All of these are discussed in Chapter 6. In addition, it also presents relationship between community cohesiveness, which is illustrated by the participation in collective action in the neighbourhood, with social problems that often occur in the community, for example massive fighting.

Bab 7 menyajikan besaran modal sosial dalam masyarakat desa pada suatu wilayah tertentu yang digambarkan oleh Indeks Modal Sosial. Bab ini, secara rinci memaparkan cara penghitungan indeks yang dilakukan. Selain itu, peran modal sosial dalam pembangunan juga diperlihatkan dengan menghubungkan indeks modal sosial dengan beberapa indikator keberhasilan pembangunan, seperti IPM, tingkat kemiskinan dan pengangguran. Bab ini juga diperkaya oleh bukti sederhana terkait hubungan modal sosial dan permasalahan sosial.

Chapter 7 discusses the amount of social capital in village society in certain regions described by the Social Capital Index. This chapter describes in detail how the index calculation is done. Moreover, the role of social capital in development is also showed by linking social capital index with some success indicators of development, such as HDI, poverty and unemployment. This chapter is also enriched with simple evidence regarding relationship of social capital and social problems.

**KERANGKA KERJA
MODAL SOSIAL**

SOCIAL CAPITAL FRAMEWORK

2

http://www.bps.go.id

KERANGKA KERJA MODAL SOSIAL *SOCIAL CAPITAL FRAMEWORK* 2

2.1. Peran Modal Sosial dalam Pembangunan

Pembangunan yang dilakukan oleh seluruh negara di dunia bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat. Kesejahteraan tidak hanya dipandang dari sisi ekonomi namun juga mencakup kesejahteraan lainnya seperti kebebasan sipil, kebebasan dari tindak kejahatan, lingkungan hidup yang bersih serta kondisi penduduk yang sehat secara fisik dan mental (*Organization for Economic Co-operation and Development - OECD, 2011*). Gambar 2.1. menunjukkan kesejahteraan manusia sebagai sebuah lingkaran besar yang mencakup kesejahteraan ekonomi dan Produk Domestik Bruto (PDB).

Kesejahteraan manusia sebagian besar dapat dilihat dari kesejahteraan ekonomi dimana Produk Domestik Bruto (PDB) mempunyai kontribusi yang paling besar. Pertumbuhan ekonomi, ditandai dengan peningkatan PDB, akan memperbesar kesempatan penduduk untuk memperoleh pekerjaan, membuka usaha, melanjutkan pendidikan dan lainnya. Inilah alasan PDB selalu digunakan sebagai salah satu indikator kesejahteraan rakyat suatu negara.

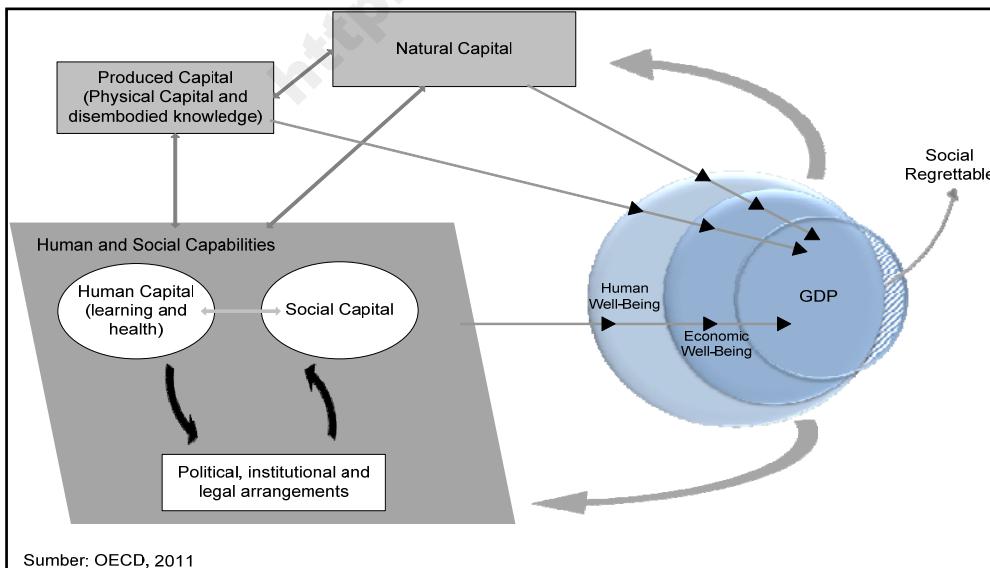
2.1. *Social Capital Contribution in The Development*

The development conducted by all countries has been intended to increase human welfare. Welfare is not only considered from an economic standpoint, but also includes other perspectives of well-being such as enjoyment of civil liberties, freedom from crime, clean environment and individual state of mental and physical health (Organization for Economic Co-operation and Development - OECD, 2011). Figure 2.1. illustrates human well being as a large circle that includes economic well being and Gross Domestic Product (GDP).

Human well-being can be seen from economic well-being in which the Gross Domestic Product (GDP) has the greatest contribution. Economic growth, characterized by increase in GDP, rises employment opportunities for residents, opens businesses, gives more chances to pursue higher education etc. This is the reason GDP is always used as welfare indicator of a country.

PDB dihitung berdasarkan nilai semua barang dan jasa yang diproduksi oleh suatu negara pada periode tertentu. PDB tidak mencakup besarnya aktivitas non ekonomi dari rumah tangga, seperti waktu yang diluangkan seorang ibu untuk mengasuh serta mendidik anak, berbagai kegiatan konservasi alam yang dilakukan rumah tangga dan sebagainya yang juga berkontribusi terhadap kesejahteraan. Selain itu PDB tidak memilah nilai barang dan jasa yang dihasilkan untuk menanggulangi dampak negatif pembangunan, seperti polusi, perceraian, kejahatan, dan sebagainya. Dalam Gambar 2.1. hal tersebut ditunjukkan oleh "social regrettables", yang besarnya merupakan bagian dari PDB namun tidak mencerminkan kesejahteraan manusia.

Gambar 2.1. Indikator Input Bagi Kesejahteraan Manusia dan Keterkaitannya
Figure 2.1. Key Inputs To Human Well-Being and Their Inter-Relationships



GDP is calculated based on value of all goods and services produced by a country in a given period. GDP does not include amount of non-economic activities of households, such as mother's time spent on caring for and educating children, nature conservation activities conducted by households or other activities that also contribute to wellbeing. In addition, GDP includes values of goods and services produced to manage negative impacts of development, such as pollution, divorce, crime, and so on. In Figure 2.1. it is depicted as "social regrettables", which is part of GDP, but it does not reflect human well being.

Lebih jauh, Gambar 2.1. memperlihatkan bahwa kesejahteraan manusia dipengaruhi oleh tiga hal, yaitu: (1) modal alam, (2) modal fisik serta (3) modal manusia dan modal sosial. Modal alam, fisik dan manusia dikenal sebagai modal tradisional pembangunan. Modal sosial erat kaitannya dengan modal manusia. Jika modal manusia mewakili pengetahuan, keterampilan dan kesehatan, maka modal sosial merujuk pada norma dan jejaring yang memfasilitasi kerjasama antar manusia di dalam kelompok maupun antar kelompok.

Modal sosial terbentuk dari hubungan sosial antar manusia sehingga besaran modal sosial tergantung pada kapabilitas sosial individu. Sen (1987) menekankan bahwa "kapabilitas sosial" individu mempunyai peran yang sama penting dengan modal pembangunan lainnya (OECD, 2011). Kapabilitas sosial individu dapat membentuk modal sosial yang bekerja melalui jejaring sosial. Ini menyebabkan modal sosial seringkali dianggap sebagai perekat yang memungkinkan modal pembangunan lainnya bekerja secara efektif dan efisien. Modal sosial bersama modal manusia secara langsung berpengaruh terhadap kesejahteraan manusia, namun keduanya juga berperan melalui modal pembangunan lainnya dalam bentuk 'kapabilitas manusia dan sosial'.

Furthermore, Figure 2.1. shows that human wellbeing is influenced by three factors: (1) natural capital, (2) produced capital as well as (3) human capital and social capital. The first three types of capital are known as traditional capital of development. Social capital is closely related to human capital. If human capital represents knowledge, skills and health embodied in individual, then social capital refers to norms and networks facilitating cooperation among people either within or between groups.

Social capital is made up of social relationships between people so the amount of social capital depends on individual's social capabilities. Sen (1987) emphasizes that "social capabilities" of individual has the same part as other important capital development in order to achieve well-being (OECD, 2011). Individual's social capability can form social capital that works through social network. This is why social capital is often considered as adhesive that allows other development capital can work effectively and efficiently. Social capital and human capital jointly influence well-being and other development capital in the form of 'human and social capabilities'.

2.2. Teori Modal Sosial

Teori modal sosial pertama kali diperkenalkan secara sistematis oleh Bourdieu pada tahun 1972 dan Coleman pada tahun 1988 (Hauberer, 2011). Definisi mendasar yang diperkenalkan adalah modal sosial merupakan sumber daya yang melekat dalam hubungan sosial. Individu yang terlibat dalam hubungan sosial dapat memanfaatkan sumber daya tersebut untuk kepentingan pribadi maupun kelompok. Definisi dasar tersebut juga disepakati oleh Putnam, Burt dan Lin, walaupun masing-masing mempunyai perspektif yang agak berbeda (Hauberer, 2011).

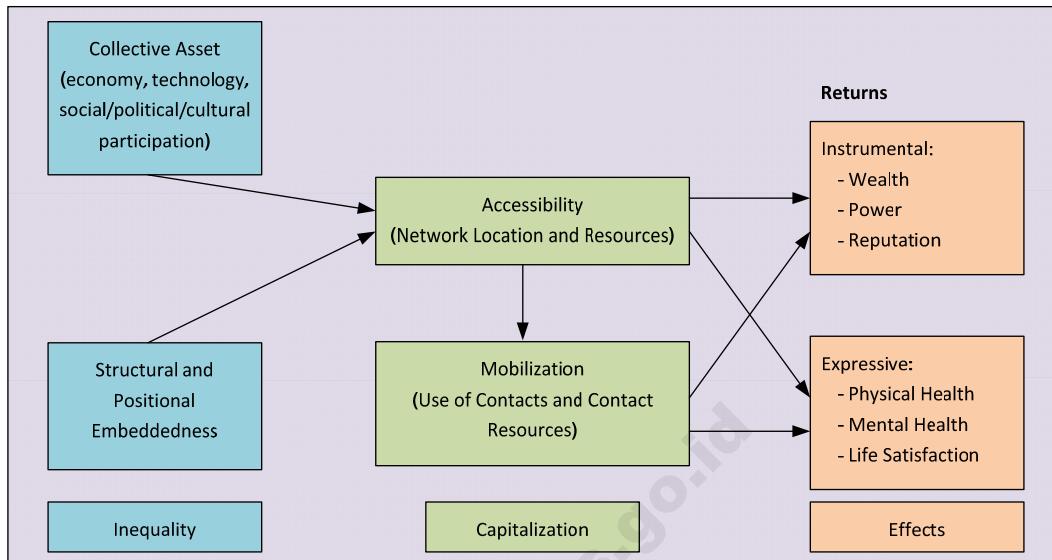
Bourdieu mengangkat pemberian dukungan dan pembentukan serta pelestarian kepercayaan oleh modal sosial. Menurut Bourdieu, modal sosial merupakan agregat sumber daya aktual atau potensial yang dihubungkan dengan pemanfaatan jejaring atau keanggotaan dalam kelompok sehingga setiap anggota mempunyai dukungan modal bersama dan mandat untuk menggunakannya (Bourdieu, 1986). Coleman memandang modal sosial sebagai aspek dari struktur sosial yang memfasilitasi tindakan individu dalam struktur sosial tersebut (Coleman, 1990). Sementara, Putnam (1995) mengaitkan modal sosial dengan penguanan demokrasi dan ekonomi masyarakat melalui jejaring keterlibatan sipil yang memfasilitasi terciptanya kepercayaan dan norma resiprokitas.

2.2. Social Capital Theory

Social capital theory was first introduced systematically by Bourdieu in 1972 and Coleman in 1988 (Hauberer, 2011). The basic definition introduced social capital as resources embedded in social relationship. Actors engaged in social relationships can use and benefit resources for personal or group purposes. This basic definition is also agreed by Putnam, Burt and Lin, although they use different perspectives (Hauberer, 2011).

Bourdieu highlights provision of support and production as well as preservation. According to Bourdieu, social capital is aggregate of the actual or potential resources which are linked to possession of a durable network or to membership in a group so that it provides each of its members with the backing of the collectivity-owned capital, a ‘credential’ which entitles them to credit. (Bourdieu, 1986). Coleman considers social capital as an aspect of social structure which facilitates certain actions of individuals who are within the structure (Coleman, 1990). Whereas, Putnam (1995) deals with the strengthening of democracy and economic outputs of society via networks of civic engagement that facilitates the creation of trust and norms of reciprocity.

Gambar 2.2. **Model Modal Sosial Lin**
Figure **Lin's Social Capital Model**



Sumber/Source: Lin, 1999

Kerangka teori modal sosial yang paling lengkap diajukan oleh Lin (1999). Lin menjelaskan proses pembentukan modal sosial dan manfaatnya bagi individu melalui bagan yang dikenal dengan model modal sosial Lin (Gambar 2.2). Model modal sosial Lin terbagi dalam 3 (tiga) kelompok, yaitu: ketidaksetaraan, pembentukan modal sosial dan dampak modal sosial.

Lin menjelaskan adanya ketidaksetaraan individu dalam mengakses modal sosial yang disebabkan karena perbedaan aset bersama dan posisi individu dalam struktur sosial. Ketidaksetaraan tersebut dapat mempengaruhi peluang individu untuk membangun dan memelihara modal sosial. Aset bersama mencakup

The most comprehensive theoretical framework of social capital was introduced by Lin (1999). Lin describes process of capitalization of social capital and benefits to individuals through a chart known as Lin's social capital model (see Figure 2.2). The model consist of three blocks: inequality, capitalization and effects of social capital.

Lin describes individual inequalities in access to social capital due to differences in collective assets and each individual's position in the social structure. The inequality affect opportunities to construct and maintain social capital. Collective assets include economy, technology, social/political and cultural participation. Those also include

partisipasi ekonomi, teknologi, sosial-politik dan budaya. Termasuk pula sikap percaya, nilai-nilai, dan norma yang dipedomani sebagai acuan bersikap, bertindak dan bertingkah laku dalam suatu hubungan sosial yang berlaku secara umum dalam suatu komunitas.

Sebuah struktur sosial dapat dikelompokkan berdasarkan karakteristik tertentu, seperti ekonomi, teknologi, budaya dan sebagainya. Di dalam struktur tersebut, setiap individu digambarkan mempunyai posisi yang berbeda menurut strata sosial, budaya, politik dan ekonomi. Hubungan sosial yang terbentuk di dalamnya dapat bersifat horisontal, yang menghubungkan individu dari status dan kekuasaan yang sama, maupun vertikal, yang menghubungkan individu dengan kekuasaan yang berbeda dalam hubungan hirarki (Putnam 1993: 173). Lin kemudian memasukkan perbedaan posisi individu dan struktur sosial sebagai salah satu komponen ketidaksetaraan dalam mengakses modal sosial.

Selanjutnya, pembentukan modal sosial tergantung pada besarnya akses terhadap sumber daya yang ditentukan oleh lokasi jejaring dan sumber daya sosial yang dapat dimobilisasi. Dengan demikian, semakin baik akses individu terhadap modal sosial, semakin banyak sumber daya melekat yang dapat dimanfaatkan. Selain itu, pembentukan

trusts, values, and norms guided as reference of behaviour, action and attitude in a social relationship that applies generally in a community.

The social structure may be grouped by many variations, such as economy, technology, cultural and so on. Within the structure, individuals may be described as occupying different position in social, cultural, political and economic strata. The social associations in community can be formed horizontally and vertically. Horizontal associations connect people from the same status and authority, while the vertical associations connect people from different authority in a hierarchy relationship (Putnam 1993: 173). Lin put differences in individual positions and social structures as one of inequality components in access to social capital.

Furthermore, capitalization of social capital depends on individual's access to resources via network location and mobilization of social resources. Thus, the better individual access to social capital, the more embedded resources can be mobilized for purposive action. Capitalization definitely needs investment, the investment of social

modal sosial juga membutuhkan investasi yang dapat dilakukan dengan menjalin hubungan sosial yang baru dan memelihara hubungan sosial yang telah terbentuk.

Secara umum, tindakan yang dilakukan individu dalam rangka investasi modal sosial dapat dibagi menjadi dua (2) jenis, yaitu: tindakan instrumental dan tindakan ekspresif. Tindakan instrumental merupakan usaha individu untuk menjalin hubungan sosial dengan tujuan memperoleh manfaat dari sumber daya yang tidak dimiliki individu. Sementara, tindakan ekspresif merupakan upaya individu untuk mempertahankan sumber daya yang telah dimiliki (Lin 1986, 1990).

Modal sosial, pada akhirnya, diharapkan dapat memberikan kesejahteraan individu. Dampak modal sosial dapat dikelompokkan berdasarkan jenis tindakan investasi modal sosial yang dilakukan, yaitu dampak instrumental seperti kekayaan, otoritas, reputasi, dan dampak ekspresif seperti kesehatan fisik dan mental serta dan kepuasan hidup.

2.3. Cakupan dan Tipologi Modal Sosial

Perbedaan definisi modal sosial seringkali disebabkan karena cakupan dan tipologi modal sosial yang dibahas memang berbeda. Analisis modal sosial dapat dilihat dari dua sisi yaitu 1)

capital is supposedly done by constructing and maintaining social relationship intensively.

Generally, individual action within the social capital investment can be split into two types, namely the instrumental and expressive action. Instrumental action is taken to obtain benefit from resources which are not possessed by the actor. Meanwhile, expressive action is taken to maintain resources that have already been possessed by the actor (Lin, 1986, 1990).

Social capital, in the end, is expected to bring human well-being. Returns of social capital can be divided into instrumental returns, such as wealth, power, reputation, and expressive returns such as physical health, mental health and life satisfaction.

2.3. Scope and Typology of Social Capital

Differences in social capital definition often emerge because the scope and typology of social capital are different. Analysis of social capital can be seen from 2 sides, namely: the level of

tingkatan analisis yang digunakan dan 2) manifestasi modal sosial yang diteliti. Point pertama, memandang modal sosial dari level mikro sampai dengan makro. Point kedua, memperluas jangkauan modal sosial dari manifestasi struktural ke kognitif.

Level mikro meliputi individu, rumah tangga, ataupun masyarakat dalam komunitas tertentu. Pada level ini, modal sosial tercermin dari hubungan horisontal. Interaksi yang terjadi dalam jaringan sosial pada komunitas tertentu akan menjamin kepatuhan terhadap norma dan nilai serta resiprositas antar manusia. Jejaring sosial yang terbentuk akan menciptakan eksternalitas yang tidak hanya mampu memberi hasil positif tetapi juga dampak negatif bagi komunitas secara keseluruhan (Putnam, 1993). Penelitian Putnam (1993) mengenai demokrasi di Italia merupakan contoh penelitian modal sosial pada level mikro.

Modal sosial pada level meso memandang modal sosial secara lebih luas yang tidak hanya melibatkan hubungan horisontal namun juga mencakup hubungan vertikal di dalam kelompok maupun antar kelompok. Hubungan vertikal dilakukan terhadap pemilik otoritas/kekuasaan yang lebih tinggi sebagai akibat dari struktur sosial dalam kelompok. Pandangan ini sesuai dengan definisi modal sosial yang diperkenalkan oleh Coleman (1990).

analysis and manifestation of social capital that is observed. The first part concerns with views of social capital along micro to macro continuum. While the second one involves spanning the range from structural manifestations of social capital to cognitives ones.

Micro level includes individual, household, community or society in particular. At this level, social capital is manifested in horizontal associations. Interactions that occur within particular social network in the community will ensure adherence to the norms, values and reciprocity among people. The formed social networks will create externalities that are not only able to give positive result but also negative impact for the community as a whole (Putnam, 1993). Research by Putnam (1993) on democracy in Italy is example of social capital research at the micro level.

Social capital at meso level has a broader view that involves not only horizontal associations but also includes vertical associations within and among groups. Vertical associations were done to the owner of higher authority/power as a result of the social structure within the group. This view is consistent with definition of social capital that was introduced by Coleman (1990).

Pada level makro, modal sosial merujuk pada hubungan mencakup hubungan sosial yang sangat luas meliputi lingkungan sosial dan politik yang membentuk struktur sosial dan memungkinkan norma untuk berkembang. Modal sosial dipandang sebagai pembentuk utama hubungan antar institusi formal (pemerintah maupun non pemerintah) dan tata kelola pemerintahan yang dianut (politik, hukum, peradilan, kebebasan politik dan sipil). Menurut Grotaert (2001) penelitian modal sosial pada level makro ditunjukkan oleh hasil penelitian dari Mancur Olson (1982) dan Douglass North (1990). Hasil penelitiannya menjelaskan bahwa organisasi progesif atau lebih dikenal dengan "*distributional coalitions*", yang merupakan kerjasama dari banyak pelaku dengan tujuan yang lebih besar dari sekedar pendapatan nasional, telah mengakibatkan masalah-masalah ekonomi yang utama. Diantaranya: pertumbuhan ekonomi yang lambat, kesenjangan, pengangguran dan inflasi.

Perbedaan manifestasi modal sosial dapat dilihat dari variabel yang digunakan untuk membangun indikator modal sosial. Modal sosial struktural mengacu pada wujud yang lebih mudah terlihat dan lebih nyata seperti: institusi lokal, organisasi, dan jaringan antara orang, berdasarkan kondisi budaya,

At the macro level, social capital covers a very broad social relations including the social and political environment that forms the social structure and enables norms to develop. Social capital is seen as a major element forming relationship between formal institutions (government and non-government) and the applied governance (political, legal, judicial, political and civil liberties). According to Grotaert (2001) social capital research at the macro level is indicated by study conducted by Mancur Olson (1982) and Douglass North (1990). The research asserts that progressive organizations as named by "distributional coalitions", which means cooperation from many actors aimed greater than national income has led to major economic problems. Those include: slow economic growth, inequalities, unemployment and inflation.

Differences in manifestation of social capital can be viewed from variable that form indicators of social capital. Structural social capital refers to the more visible and perhaps more tangible aspects of the concept, such as local institutions, organization, and networks among people, based on the

sosial, ekonomi, politik, atau tujuan lain. Modal sosial kognitif mengacu pada wujud yang lebih abstrak seperti kepercayaan, norma, dan nilai-nilai, yang mengatur interaksi antara orang-orang. Jika pengukuran kelompok/organisasi dapat diamati secara langsung berdasarkan ukuran keanggotaannya, intensitas pertemuan dan kegiatan, maka norma-norma dan kepercayaan harus diperhatikan secara tidak langsung, melalui persepsi masyarakat yang bertindak berdasarkan kepatuhan terhadap norma-norma tersebut.

Modal sosial yang ada dalam masyarakat menggambarkan proses interaksi sosial dalam hal akses terhadap jejaring sosial dan partisipasi di dalam kelompok (Woolcock dan Narayan, 2000). Bentuk proses interaksi sosial dalam mengakses sumber daya dapat dibedakan menjadi tipologi modal sosial yaitu *bonding*, *bridging* dan *linking*. Tipologi modal sosial menggambarkan karakteristik interaksi sosial masyarakat yang berbeda-beda.

Modal sosial suatu masyarakat dikatakan sebagai *bonding* ketika anggota masyarakat saling berserikat dan bekerja sama membentuk jejaring diantara mereka yang memiliki kesamaan karakteristik tertentu saja, misalnya: kesamaan suku, daerah, keanggotaan keluarga, tetangga, sahabat karib, dan rekan kerja (Narayan 1999).

conditions of cultural, social, economic, political, or other objectives. Cognitive social capital refers to more abstract manifestation, such as trust, norms, and values, which govern interactions among people. If the measurement of group/organization can be observed directly by the size of its member, the intensity of relation and activities, then norms and trusts must be observed indirectly, through perception of people that act based on adherence to those norms.

Social capital in society illustrates process of social interaction in accessing social network and participation in the group (Woolcock and Narayan, 2000). Process of social interaction in accessing resources can be distinguished into three types of social capital typology, which are bonding, bridging, and linking. Social capital typology describes various social interaction characteristics in society.

Social capital in a society is called bonding when members of society as cooperate and assemble each other to form network amongst them who have the same characteristics, such as same tribes, region, family, neighbourhood, close friends, and colleagues (Narayan, 1999). While, social capital is considered bridging when society who has similar

Sementara, modal sosial dikatakan *bridging* ketika masyarakat yang memiliki kesamaan karakteristik geografis dan kesetaraan pemilikan otoritas, hak, dan kewajiban, saling bersekutu dan bekerja sama dalam suatu jejaring (Narayan 1999; Narayan dan Cassidy 2001). Tipologi modal sosial yang ketiga adalah, *linking*. Modal sosial dikatakan sebagai *linking* ketika masyarakat atau kelompok masyarakat memiliki hubungan jejaring terhadap pihak-pihak lain yang memiliki otoritas atau kekuasaan yang lebih tinggi misalnya: instansi pemerintah, institusi pendidikan, institusi pelayanan kesehatan, partai politik, kepolisian, perbankan, dsb (Woolcock 1998; World Bank 2000).

2.4. Statistik Modal Sosial di Berbagai Negara

Cakupan dan tipologi modal sosial yang cukup luas memberikan konsekuensi bahwa modal sosial tidak mudah untuk dijelaskan dan dibutuhkan banyak indikator untuk menggambarkan modal sosial suatu komunitas. Tercatat beberapa lembaga internasional, seperti Bank Dunia, dan OECD telah melakukan penelitian secara mendalam terkait pengukuran modal sosial. Berbagai penelitian tersebut dilakukan untuk memperoleh satu kerangka pikir mengenai pengukuran modal sosial yang diharapkan dapat diterapkan oleh semua

geographical characteristics and equal authority, right, and obligation is assemble and cooperate mutually within network (Narayan 1999; Narayan and Cassidy, 2001). The third typology of social capital is linking. Social capital is regarded linking when the society or the group has network to other parties who have higher authority or power such as government institution, educational institution, health service, political parties, police institution, banking institution, etc (Woolcock 1998; World Bank 2000).

2.4. Social Capital Statistics in Some Countries

The broad scope and typology of social capital give consequence that social capital is not easily described by a single indicator but it need many indicators. It is noted that several international institutions, such as the World Bank and the OECD have been conducting in-depth research related to the measurement of social capital. Many researches have been done to acquire one framework of social capital measurement which is expected to be applicable in all countries. However, so far, OECD definition regarding social

negara. Namun sejauh ini, definisi OECD mengenai modal sosial paling umum digunakan oleh berbagai negara di dunia, seperti Inggris, Australia dan Kanada, sebagai acuan dalam membangun indikator modal sosial.

Inggris menggambarkan modal sosial menggunakan lima (5) indikator utama modal sosial yang diidentifikasi sebagai: partisipasi sosial; jejaring sosial dan dukungan sosial; resiprositas dan sikap percaya; partisipasi sipil; dan pandangan positif terhadap lingkungan sekitar. Australia hanya menggunakan pendekatan empat indikator pertama yang digunakan oleh Inggris untuk menggambarkan modal sosial. Sementara, Kanada, walaupun mengadopsi definisi modal sosial dari OECD namun Kanada menggunakan kerangka kerja yang dibangun oleh ONS. Terdapat lima pendekatan indikator yang digunakan, yaitu: partisipasi sosial, keterikatan sosial dan komitmen sosial; tingkat pemberdayaan; persepsi komunitas; jejaring sosial, dukungan sosial dan interaksi sosial; sikap percaya, resiprositas dan kohesi sosial.

Perbedaan instrumen dan definisi variabel yang digunakan dalam menggambarkan modal sosial pada masing-masing negara menyebabkan indikator yang dihasilkan belum dapat diperbandingkan secara internasional. Walaupun demikian, secara umum,

capital is the most commonly used by various countries in the world, such as United Kingdom, Australia, and Canada as a reference to develop social capital indicators.

In United Kingdom, social capital research are based on five major indicators of social capital: social participation; social network and social support; reciprocity and trust; civic participation, and positive views of local area. Australian approach uses only four first indicators used by the UK to describe social capital. While in Canada, although the approach has adopted social capital definition from OECD, but it uses social capital framework made by ONS. There were five indicators used in Canada, namely; social participation, social engagement and commitment; level of empowerment; perception of community; social network, social support and social interaction; trust, reciprocity and social cohesion.

Differences in instrument and definition of variables used in describing social capital of each country allow the indicators to be hardly comparable internationally. Despite of that, generally, Grootaert and Bastelaar (2002) suggest three types of proxy

Grootaert dan Bastelaar (2002) merekomendasikan tiga jenis indikator yang dapat digunakan sebagai pendekatan untuk menggambarkan modal sosial pada level mikro, yaitu indikator terkait sikap percaya dan kepatuhan terhadap norma yang berlaku, keanggotaan dalam perkumpulan dan jejaring lokal, dan indikator terkait aksi bersama.

1. Sikap percaya dan kepatuhan pada norma merupakan modal sosial kognitif yang membutuhkan persepsi dan pengalaman responden terkait perilaku yang memerlukan sikap percaya.
2. Keanggotaan dalam perkumpulan dan jejaring lokal merupakan indikator modal sosial struktural yang meliputi banyaknya perkumpulan dan anggotanya, keragaman internal anggota, dan pengelolaan perkumpulan seperti pengambilan keputusan yang demokratis.
3. Aksi bersama mencakup berbagai kegiatan yang dilaksanakan oleh sekelompok orang. Sejauh mana aksi bersama tersebut dapat diukur dan ini merupakan indikator yang mendasari kohesi sosial.

indicators of social capital at micro level, namely trust and adherence to norms, membership in local associations and networks, and indicator of collective action.

1. *Trust and adherence to norms is a cognitive social capital that requires asking respondents about their expectations concerning behaviour and experiences related to trust.*
2. *Membership in local associations and networks is indicator of structural social capital that involves the number of associations and their members, various aspect of membership, and institutional management such as democratic decision-making.*
3. *Collective action consist of various action done by a group of individuals. The extent to which this collective action occurs can be measured and this is an indicator of the underlying social cohesion.*

METODOLOGI
METHODOLOGY **3**

http://www.bps.go.id

METODOLOGI

METHODOLOGY

3

3.1. Sumber Data

Data utama yang digunakan dalam publikasi Statistik Modal Sosial ini merupakan hasil Survei Sosial Ekonomi Nasional dengan Modul Sosial Budaya dan Pendidikan tahun 2012 (Susenas MSBP 2012). Susenas merupakan salah satu survei BPS dengan pendekatan rumah tangga. Pengumpulan data Susenas MSBP 2012 dilaksanakan pada bulan September tahun 2012 (triwulan III) yang mencakup sekitar 72.000 rumah tangga yang tersebar di seluruh Indonesia. Responden terkait keterangan modal sosial adalah salah satu anggota rumah tangga yang telah berumur 17 tahun ke atas pada setiap rumah tangga terpilih sampel. Secara metodologi, jumlah sampel tersebut sudah cukup untuk menyajikan angka estimasi pada level nasional dan provinsi.

Publikasi ini juga dilengkapi dengan beberapa informasi pendukung dan terkait modal sosial yang bersumber dari data-data yang dihasilkan oleh BPS, diantaranya: data Potensi Desa. Sebagai data spasial, informasi dari data Potensi Desa dapat menambah analisis modal sosial dari aspek kewilayahannya dan karakteristiknya. Di samping itu, publikasi ini juga memanfaatkan informasi terkait

3.1. Data Source

The main data used in Publication of Statistics of Social Capital is data of Socio-Economic Survey (Susenas), Socio-Cultural and Educational Modules (MSBP) 2012. Susenas is one of household surveys conducted by Statistics Indonesia-BPS. 2012 Susenas MSBP was held in September (the third quarter of 2012) including approximately 72,000 households across Indonesia. Respondent of social capital questionnaire is a member of household who is at least 17 years old. Methodologically, the amount of samples used is lot enough to estimate national and provincial level.

In addition to Susenas data, this publication is also supplemented with much supporting information that relates to social capital produced by Statistics Indonesia – BPS, for example: The Village Potential Data. As spatial data, information from Village Potential Data can add the social capital analysis with regional aspects and characteristics. In addition, this publication also uses data

Indeks Pembangunan Manusia (IPM), kemiskinan dan pengangguran. Informasi tersebut digunakan untuk melihat peran modal sosial dalam pembangunan.

3.2. Metode Analisis

Analisis deskriptif pada Bab 4 sampai dengan Bab 6 menyajikan persentase rumah tangga menurut provinsi berdasarkan tiga kelompok indikator modal sosial, yaitu: (1) indikator sikap percaya dan toleransi, (2) kelompok dan jejaring, serta (3) resiprositas dan aksi bersama. Perbedaan kondisi modal sosial antar provinsi dapat dilakukan dengan membandingkan besaran persentase yang disajikan. Persentase rumah tangga tersebut telah memperhitungkan penimbang jumlah rumah tangga pada pertengahan tahun 2012.

Penghitungan indeks modal sosial pada Bab 7 menggunakan Metode Analisis Faktor Eksploratori. Indeks komposit yang dihasilkan diharapkan mencakup 3 kelompok indikator modal sosial. Metode tersebut digunakan untuk mengidentifikasi struktur hubungan antar variabel dan dimensi modal sosial. Dalam tahapan persiapan data, semua skala data diseragamkan menggunakan skala 10. Selanjutnya, faktor yang terbentuk diekstrasi dengan *Principal Axis Factoring* (PAF).

of Human Development Index (HDI), poverty, and unemployment. This information is used to see the role of social capital in the development.

3.2. Analytical Method

Analysis described in Chapter 4-6 presents comparation of population percentage by province based on three indicators, namely: (1) indicator of trust, (2) group and networks, and (3) reciprocity and collective action. Social capital differences among the provinces can be seen by comparing percentages shown. The percentage of households presented has been calculated with certain multiplier used in the mid-year of 2012.

The calculation of social capital index in Chapter 7 uses Exploratory Factor Analytical Method. The composite index is expected to consist of 3 groups of social capital indicators. The method identifies relation structures between social capital variables and dimension. In the data preparation part, all data are converted to 10 scale data. Next, the resulted factors are extracted by using Principal Axis Factoring (PAF).

3.3. Konsep dan Definisi

Pembangunan Sosial dapat didefinisikan sebagai strategi kolektif dan terencana guna meningkatkan kualitas hidup manusia melalui seperangkat kebijakan sosial yang mencakup sektor pendidikan, kesehatan, perumahan, ketenagakerjaan, jaminan sosial dan penanggulangan kemiskinan. Pembangunan sosial lebih berorientasi pada peningkatan kualitas hidup manusia dalam arti luas (Widiowati, 2009).

Modal Sosial, menurut OECD, mengacu pada lembaga, hubungan, dan norma-norma yang membentuk kualitas dan kuantitas interaksi sosial suatu masyarakat. Kohesi sosial sangat penting bagi masyarakat untuk mencapai kesejahteraan ekonomi dan pembangunan berkelanjutan. Modal sosial tidak sekedar jumlah institusi yang mendukung masyarakat – modal sosial merupakan perekat diantara mereka.

Modal Sosial, adalah jaringan bersama dengan norma, nilai dan pemahaman yang memfasilitasi kerja sama diantara atau antar kelompok (World Bank).

Bonding mengacu pada hubungan yang seseorang miliki dengan orang-orang seperti dirinya. Ini menghasilkan loyalitas yang kuat 'dalam kelompok' (Woolcock, 2000). Hubungan *bonding* digambarkan sebagai ikatan yang kuat yang berkembang antara orang-orang dari latar belakang yang sama dan kepentingan, biasanya

3.3. Concept and Definition

Social Development is collective and well-planned strategy to improve quality of human life through a set of social policies that include education, health, housing, employment, social security and poverty reduction. Social development more oriented on increasing quality of human life in its broad sense (Widiowati, 2009).

Social Capital, according to OECD, refers to the institutions, relationships, and norms that shape the quality and quantity of society's social interactions. Social cohesion is critical to assist societies in promoting prosperity and sustainable development. Social capital is not just the amount of institutions which underpin society – it is the glue that holds them together.

Social Capital, is network together with the shared norms, values and understandings that facilitate cooperation within or among groups (World Bank).

Bonding refers to those relationships that someone has with others similar with him. It produces strong 'in-group' loyalty (Woolcock, 2000). Bonding ties are described as strong ties that develop among people of similar background and interests, usually include family and friends, provide

termasuk keluarga dan teman-teman, menyediakan bahan dan dukungan emosional, dan lebih melihat ke dalam dan cenderung protektif (*Measuring Social Capital, An Australian Framework and Indicators, 2004*).

Bridging mengacu pada hubungan dengan teman-teman, rekan dan kolega dengan latar belakang yang berbeda, misalnya berbeda status sosial ekonomi, usia, generasi, ras atau etnis (Woolcock 2000). *Bridging* juga merujuk kepada hubungan-hubungan di mana satu orang atau sejumlah kecil anggota dari kelompok yang beragam (*Measuring Social Capital, An Australian Framework and Indicators, 2004*).

Linking mengacu pada hubungan dalam hirarki lapisan sosial yang berbeda, di mana kekuasaan, status sosial dan kekayaan diakses oleh kelompok-kelompok yang berbeda (OECD 2001a). Modal sosial *lingking* melibatkan hubungan dengan orang-orang dalam otoritas dan posisi kekuasaan dan berguna untuk mengumpulkan sumber daya (Stone, Gray & Hughes 2003). Hubungan antara pemerintah dan masyarakat termasuk dalam hal ini (*Measuring Social Capital, An Australian Framework and Indicators, 2004*).

Struktur Sosial adalah suatu sistem tertentu, stabil dari hubungan-hubungan sosial yang ada dalam masyarakat. Hal ini tidak berhubungan dengan manusia sebagai individu, grup, atau organisasi

material and emotional support, and are more inward-looking and protective (Measuring Social Capital, An Australian Framework and Indicators, 2004).

Bridging refers to relations with friends, associates and colleagues with different backgrounds, for example different socio economic status, age, generation, race or ethnicity (Woolcock, 2000). Bridging may also refer to those relationships where a single person or a small number of people are members of diverse groups (Measuring Social Capital, An Australian Framework and Indicators, 2004).

Linking refers to relations within a hierarchy of different social layers, where power, social status and wealth are accessed by different groups (OECD 2001a). Linking social capital involves relationships with those in authority and positions of power and is useful for garnering resources (Stone, Gray & Hughes 2003). Relationships between the government and communities are included here (Measuring Social Capital, An Australian Framework and Indicators, 2004).

Social Structure is the distinctive, stable system of social relations that exists in any human society. It is not concerned with people as individuals, in groups, or in the organizations forming

yang membentuk masyarakat, maupun tujuan akhir dari hubungan antar manusia. Namun, struktur sosial berkaitan dengan organisasi antar hubungan manusia: bagaimana dibangun sampai terbentuk pola. Karena itu, konsep struktur sosial mengasumsikan bahwa hubungan sosial manusia tidak terjadi secara acak atau kebetulan, namun cenderung mengikuti pola yang dapat diidentifikasi. (www.newworldencyclopedia.org).

Interaksi sosial merupakan suatu hubungan antara dua orang atau lebih individu, dimana kelakuan individu memengaruhi, mengubah atau memengaruhi individu lain atau sebaliknya (Bonner dalam Ali, 2004).

Produk Domestik Bruto (PDB) pada dasarnya merupakan jumlah nilai tambah yang dihasilkan oleh seluruh unit usaha dalam suatu negara tertentu atau merupakan jumlah nilai barang dan jasa akhir yang dihasilkan oleh seluruh unit ekonomi (BPS, 2012).

Pendapatan Per Kapita adalah jumlah (nilai) barang dan jasa rata-rata yang tersedia bagi setiap penduduk suatu negara pada suatu periode tertentu. Pendapatan per kapita diperoleh dari pendapatan nasional pada tahun tertentu dibagi jumlah penduduk suatu negara pada tahun tersebut.

the society, nor the ultimate goal of their relationships. Rather, social structure deals with the organization of their relationships: how they are arranged into patterns. Thus, the concept of social structure assumes that human social relationships are not arbitrary or coincidental, but rather they follow certain patterns that can be identified (www.newworldencyclopedia.org).

Social Interaction is a relationship between two or more individuals, who the individual's behaviour influences or changes other individual or vice versa (Bonner in Ali, 2004).

Gross Domestic Products (GDP) is the number of value added that resulted by all business units in a country or the number of the final goods and services value that resulted by all economy units (Statistics Indonesia -BPS, 2012).

Per Capita Income is the average number of goods and services that available for people in a country. Per capita income is derived from the national income in a given year divided by the population of a country in that year.

Penduduk Miskin adalah penduduk yang tidak mampu dari sisi ekonomi untuk memenuhi kebutuhan dasar makanan dan bukan makanan. Dalam aplikasinya dihitunglah garis kemiskinan absolut. Penduduk yang memiliki rata-rata pengeluaran/pendapatan per kapita per bulan di bawah garis kemiskinan disebut penduduk miskin (BPS, 2011).

Angka Koefisien Gini adalah ukuran kemerataan pendapatan yang dihitung berdasarkan kelas pendapatan. Angka Koefisien Gini terletak antara 0 (nol) dan 1 (satu). Nol mencerminkan kemerataan sempurna dan satu menggambarkan ketidakmerataan sempurna (BPS, 2012).

Pengangguran Terbuka merupakan bagian dari angkatan kerja yang tidak bekerja atau sedang mencari pekerjaan (baik bagi mereka yang belum pernah bekerja sama sekali maupun yang sudah pernah bekerja), atau sedang mempersiapkan suatu usaha, mereka yang tidak mencari pekerjaan karena merasa tidak mungkin untuk mendapatkan pekerjaan dan mereka yang sudah memiliki pekerjaan tetapi belum mulai bekerja. Tingkat pengangguran terbuka adalah ukuran yang menunjukkan berapa banyak dari jumlah angkatan kerja yang sedang aktif mencari pekerjaan (BPS, 2003).

The Poor are people who can not afford the economic side to fulfill the basic needs of food and non-food. In its application, it is calculated by the absolute poverty line. People who have an average expenditure/income per capita per month below the poverty line are called poor people (Statistics Indonesia -BPS, 2011).

Gini Coeficient is a value of income prevails calculated based on class of incomes. The value of Gini Coeficient lies between 0 (zero) and 1 (one). Zero describes the perfect evenness and one (1) describes the perfect inequality (Statistics Indonesia -BPS, 2012).

Unemployment is part of the labor force who are not working or looking for work (both of the experience and no experience one), or are preparing a business, are not looking for work because they feel it is impossible to get a job and those who already have a job but have not started to work yet. Unemployment rate shows how many of the total labor force who are actively looking for work (Statistics Indonesia - BPS, 2003).

Selang waktu terjadinya kejahatan adalah selisih waktu terjadinya suatu kejahatan dengan kejahatan berikutnya (Statistik Kriminal 2012, BPS – 2012).

Formula:

$$\frac{365 \times 24 \times 60 \times 60}{\text{Jumlah kejahatan tahun } t} \times \text{detik}$$

Resiko kejahatan adalah jumlah peristiwa kejahatan pada tahun t terhadap 100.000 penduduk (BPS – 2012).

Perkelahian massal adalah perkelahian yang terjadi secara massal melibatkan banyak pelaku, antara lain: antar warga, pelajar, suku, atau lainnya yang terjadi di desa selama setahun terakhir yang disebabkan oleh saling ejek, salah paham, kenakalan remaja, dendam lama atau lainnya (Statistik Potensi Indonesia 2011, BPS – 2011).

Indeks Pembangunan Manusia (IPM) merupakan sebuah ukuran capaian pembangunan manusia berbasis sejumlah komponen dasar kualitas hidup. Sejumlah komponen tersebut yaitu: (1) angka harapan hidup yang mewakili kesehatan; (2) angka melek huruf dan rata-rata lama sekolah yang mengukur capaian pembangunan di bidang pendidikan; dan (3) kemampuan daya beli masyarakat terhadap sejumlah kebutuhan pokok yang dilihat dari rata-rata besarnya pengeluaran per kapita sebagai pendekatan pendapatan yang mewakili capaian pembangunan untuk hidup layak (BPS, 2008).

The Crime Clock is the difference between the time of a crime with the next crime (Crime Statistics 2012, BPS – 2012),

The formula:

$$\frac{365 \times 24 \times 60 \times 60}{\text{The number of crime in year } t} \times \text{clock}$$

The Crime Rate is the number of crime in year t per 100,000 population (BPS – 2012).

Massive fighting incident is a fight in bulk that involves many actors such as: among the resident, students, ethnic groups, or others in the village during the past year caused by mutual ridicule, misunderstanding, juvenile delinquency, old grudges, or others (Village Potential Statistics of Indonesia 2011, BPS – 2011).

Human Development Index (HDI) is an indicator of human development gains based on some basic components of life quality. The components are: (1) life expectancy which represents health; (2) illiteracy rate and means years of schooling which measure achievement of education development; and (3) purchasing power parity of basic needs as seen from the average amount of spending per capita as the income approach that represents achievements of development for a decent life (Statistics Indonesia -BPS, 2008).

Jaringan

a. **Jaringan** adalah pola hubungan dan juga pola sumber daya yang dibawa ke arah hubungan oleh peserta (*Measuring Social Capital, An Australian Framework and Indicators, 2004*).

b. **Jaringan** dapat dilihat pada tingkatan yang berbeda – jaringan individual, jaringan subkelompok atau subkelompok yang berbeda sebagai sebuah sistem yang terstruktur. Agregasi tingkatan ini ditandai oleh sebuah dimensi hubungan/kepadatan hubungan dan sebuah dimensi posisi (*Social Capital Theory. Towards a Methodological Foundation*).

Keterlibatan Sosial merujuk pada kondisi alami dan kekuatan dari relasi yang dimiliki antar individu. Hal ini termasuk hubungan yang dekat seperti keluarga dan pertemanan maupun asosiasi dengan individu atau organisasi dalam komunitas yang lebih luas. Secara umum, hal ini merujuk pada cara/media manusia saling terikat, berinteraksi, dan memiliki perasaan tentang orang lain, organisasi dan institusi (seperti kelompok, organisasi bisnis, partai politik dan berbagai organisasi pemerintah) (*Measuring Social Capital, An Australian Framework and Indicators, 2004*).

Networks

a. **Networks** are patterns of relationships and also patterns of resources brought to the relationship by participants (*Measuring Social Capital, An Australian Framework and Indicators, 2004*).

b. **Networks** can be viewed on different levels – networks of individuals, networks of subgroups, or different subgroups as a structured system. These levels of aggregation are characterized by a relational dimension or the intensity of relations and a positional dimension (*Social Capital Theory. Towards a Methodological Foundation*).

Social Engagement refers to the nature and strength of relationships that people have with each other. It includes the more intimate relationships with family and friends as well as people's associations with individuals and organisations in the wider community. More generally, it refers to the way in which people bond, interact with, and feel about other people, organisations and institutions (such as clubs, business organisations, political parties and various government organisations) (*Measuring Social Capital, An Australian Framework and Indicators, 2004*).

Kohesifitas Sosial adalah karakter suatu masyarakat dalam menghadapi koneksi dan relasi antar unit sosial seperti individu, grup, asosiasi atau unit teritorial (McCracken 1998).

Ketimpangan/Kesenjangan Sosial adalah distribusi yang tidak merata (ketidakadilan dan ketidaksetaraan) yang dialami oleh individu dan kelompok yang dianggap penting dalam suatu masyarakat dan penilaian yang tidak sama dan pengecualian berdasarkan posisi sosial dan gaya hidup. Ketimpangan sosial atau kesenjangan sosial terjadi pada suatu keadaan di mana kelompok individu dalam sebuah masyarakat tidak memiliki status sosial yang sama, kelas sosial yang sama, dan lingkungan sosial yang sama.

Partisipasi Sosial adalah partisipasi dalam aktivitas yang menyenangkan sekaligus bermanfaat, baik formal, dalam organisasi, ataupun informal, dengan keluarga dan teman (*Measuring Social Capital, An Australian Framework and Indicators, 2004*).

Resiprokitas adalah hubungan antara dua pihak atau hal-hal di mana ada tindakan/aksi bersama, memberi dan menerima (Jary & Jary 2000) (*Measuring Social Capital, An Australian Framework and Indicators, 2004*).

Sikap Percaya mengacu pada kepercayaan pada keandalan seseorang atau sebuah sistem. Hal ini didasarkan

Social Cohesiveness is a characteristic of a society dealing with the connections and relations between societal units such as individuals, groups, associations as well as territorial units (McCracken 1998).

Social Inequality is the unequal (unfair and uneven) distribution experienced by individuals and groups that are considered important in a society and unequal appraisal and exclusion based on social position and lifestyle. Social inequality occurs in a situation in which a group of individuals in a society do not have the same social status, the same social class, and the same social environment.

Social Participation is participation in inherently enjoyable activities valued in their own right, either formal, provided by organised groups, or informal, with family and friends (Measuring Social Capital, An Australian Framework and Indicators, 2004).

Reciprocity is any relationship between two parties or things where there is a mutual action, giving and taking (Jary & Jary 2000) (Measuring Social Capital, An Australian Framework and Indicators, 2004).

Trust refers to confidence in the reliability of a person or a system. It is based on the expectation that people or

pada harapan bahwa orang atau organisasi akan bertindak dengan cara yang diharapkan atau dijanjikan dan akan memperhitungkan kepentingan orang lain. Kepercayaan melibatkan kejujuran, akuntabilitas, perdagangan yang adil dan tingkat kompetensi (*Measuring Social Capital, An Australian Framework and Indicators, 2004*).

Aset kolektif adalah aset atau fitur kolektif yang tersedia untuk semua anggota kelompok, baik itu kelompok sosial atau masyarakat dan terlepas di mana setiap anggota tersebut memberikan kontribusi di dalamnya. Contoh dari aset kolektif diantaranya adalah sikap percaya, norma, sanksi, dll. Sebagai aset kolektif, modal sosial sangat bergantung pada niat dari anggota. Sehingga, norma, kepercayaan, sanksi, wewenang dan hal lain menjadi penting dalam mempertahankan modal sosial (Nan Lin, 1999).

Tindakan instrumental merupakan usaha individu untuk menjalin hubungan sosial dengan tujuan memperoleh manfaat dari sumber daya yang tidak dimiliki individu, seperti manfaat ekonomi (kesejahteraan), kekuatan dan reputasi (Lin 1986, 1990).

Tindakan ekspresif merupakan upaya individu untuk mempertahankan sumber daya yang telah dimiliki, seperti kesehatan fisik, kesehatan mental dan kepuasan hidup (Lin 1986, 1990).

organisations will act in ways that are expected or promised and will take into account the interest of others. Trustworthiness involves honesty, accountability, fair dealing and level of competence (Measuring Social Capital, An Australian Framework and Indicators, 2004).

Collective assets are assets or collective features which are available to all members of the group, whether it is social or community groups and regardless each member contributes something to it. The examples of collective assets are trust, norms, sanctions, etc. As a collective asset, social capital depends on intention of the members. Thus, norms, beliefs, sanctions, authority and other elements are important in maintaining social capital (Nan Lin, 1999).

Instrumental action is individual action taken to obtain benefit of resources not possessed by the actor, such as wealth, power and reputation (Lin, 1986, 1990).

Expressive action is individual action taken to maintain resources which have already possessed by the actor, such as physical health, mental health and life satisfaction (Lin, 1986, 1990).

SIKAP PERCAYA DAN TOLERANSI

TRUST AND TOLERANCE

4

http://www.bps.go.id

SIKAP PERCAYA DAN TOLERANSI

TRUST AND TOLERANCE

4

Rasa percaya merupakan unsur utama pembentuk modal sosial. Tanpa adanya rasa percaya antar individu, maka sulit terjadi interaksi sosial apalagi hubungan sosial yang baik. Model modal sosial yang dikemukakan oleh Nan Lin (1999) memposisikan rasa percaya sebagai salah satu aset kolektif yang mempengaruhi akses individu terhadap sumber daya di dalam jaringan. Bahkan, pada konferensi internasional tentang pengukuran modal sosial yang diselenggarakan oleh OECD di Budapest pada tahun 2003, sikap percaya disetujui sebagai dimensi kunci dari modal sosial.

Rasa percaya antar individu dalam suatu hubungan sosial dapat dipandang dalam dua sisi yang berbeda, yaitu sebagai input sekaligus output modal sosial. Grootaert, dkk (2004) menyebutkan rasa percaya merupakan input modal sosial karena adanya rasa saling percaya antar individu menjadi landasan terjalinnya interaksi sosial yang mengarah kepada hubungan sosial yang lebih erat antar anggota masyarakat. Di sisi lain, kuantitas dan kualitas interaksi sosial seperti lamanya hubungan sosial yang telah terjalin akan meningkatkan rasa percaya antar individu.

Trust is the main element of social capital formation. Without trust between individuals, it is difficult to form social interaction especially a good social relationship. Social capital model proposed by Nan Lin (1999) positions trust as a collective asset that affects individual access to resources on the network. In fact, on international conference on the measurement of social capital held by OECD in Budapest 2003, trust is approved as a key dimension of social capital.

Trust between individuals in a social relationship can be viewed in two different sides, as an input or output of social capital. Grootaert et al (2004) mentions that trust is an input of social capital because mutual trust between individuals can be foundation to establish social interactions that lead to strong social ties among community members. On the other hand, quantity and quality of the social interaction such as duration of the social relationship increases trust between individuals.

Rasa percaya merupakan perwujudan dari modal sosial kognitif yang dapat tercermin dari persepsi sikap percaya individu terhadap anggota komunitas. Pada lingkup mikro seperti masyarakat desa, sikap percaya tercermin dalam interaksi sosial sehari-hari antar anggota masyarakat yang bersifat vertikal maupun horisontal. Selain itu, modal sosial kognitif juga tercermin dari sikap toleransi antar anggota masyarakat yang tergambar dalam kerukunan hidup bermasyarakat.

4.1. Sikap Percaya Terhadap Tokoh di Lingkungan Desa

Salah satu bentuk hubungan sosial yang biasa dilakukan oleh individu sebagai bagian dari komunitas masyarakat desa adalah hubungan vertikal dengan anggota lainnya yang memiliki otoritas/kekuasaan yang lebih tinggi di lingkungan desa seperti aparatur desa, tokoh masyarakat di desa dan sebagainya. Susenas MSBP 2012 memuat data persepsi sikap percaya rumah tangga terhadap tokoh di lingkungan desa yang meliputi aparatur desa/kelurahan, tokoh masyarakat, dan tokoh agama. Persepsi sikap percaya terhadap tokoh masyarakat menggambarkan besaran modal sosial kognitif suatu rumah tangga dengan pihak yang dianggap berpengaruh atau memiliki otoritas.

Trust is manifestation of cognitive social capital that can be reflected in the perception of trust in members of the community. At the micro scope such as village society, trust is reflected from day to day social interaction among members of the society which includes the horizontal and vertical interactions. In addition, cognitive social capital is also reflected in tolerance among members of the society which is reflected in the harmony of their social life.

4.1. Trust In Village's Figures

One form of social relationships that is usually done by people as part of village community members is vertical relationship with other members who have higher authority in village, such as village apparatus, community leaders in village and etc. The 2012 Susenas-MSBP consists of data on perceptions of household trust in village's figures which include village apparatus, community leaders and religious figures. Trust perceptions in the village's figures illustrate the amount of cognitive social capital between a household community with those who are considered influential or have authority.

Secara umum, masyarakat Indonesia mempunyai sikap percaya yang tinggi terhadap tokoh di lingkungan desa, seperti aparatur desa/kelurahan, tokoh masyarakat maupun tokoh agama. Tabel 4.1 menunjukkan persentase rumah tangga yang percaya terhadap tokoh di lingkungan desa mencapai angka di atas 88 persen. Angka yang disajikan pada tabel tersebut merupakan persentase rumah tangga yang mempunyai sikap ‘percaya’ atau ‘sangat percaya’ terhadap tokoh di lingkungan desa. Namun begitu, berdasarkan data yang digunakan, masih terdapat sekitar 0,18 persen rumah tangga yang menyatakan tidak mempunyai tokoh agama di lingkungan tempat tinggal.

Sikap percaya rumah tangga terhadap tokoh di lingkungan desa juga sangat bervariasi antar provinsi. Tabel 4.1 memperlihatkan persentase rumah tangga yang mempunyai sikap percaya terhadap tokoh agama mencapai 95,66 persen. Angka ini merupakan persentase paling tinggi dibandingkan persentase rumah tangga yang mempunyai sikap percaya terhadap aparatur desa/kelurahan ataupun tokoh masyarakat. Kepercayaan terhadap tokoh agama juga mempunyai variasi antar provinsi yang paling rendah dengan selisih antara nilai tertinggi dan terendah sekitar sembilan persen. Hasil ini menunjukkan masyarakat pada tingkat desa lebih percaya kepada tokoh agama dan tokoh masyarakat dibandingkan kepada aparatur desa/kelurahan.

In general, Indonesian society has high trust in village's figures, such as village apparatus, community leaders and religious figures. Table 4.1. shows that percentage of households who believed in village's figures reached above 88 percent. The figures presented in this table are percentage of households who 'believe' or 'strongly believe' to the village's figures. However, based on the data used, there were about 0.18 percent of the households who claimed to have no religious figures in their neighbourhood.

Trust in the village's figures also varies between provinces. Table 4.1. shows the percentage of households who trusted their religious figures reached 95.66 percent. This was the highest percentage compared to the percentage of the households who had trust in the village apparatus or community leaders. Trust in religious figures also had the lowest varians with differences between the highest and the lowest was only around nine percent. This result indicates that society in the village level trust their religious figures and community leaders more than their village apparatus.

**Percentase Rumah Tangga yang Percaya Terhadap Tokoh di Lingkungan Desa
Menurut Provinsi, 2012**
Table 4.1. Percentage of Households Who Trust The Village's Figures By Province, 2012

Provinsi <i>Province</i>	Aparatur Desa Kelurahan <i>Village Apparatus</i>	Tokoh Masyarakat <i>Community Leaders</i>	Tokoh Agama <i>Religious Figures</i>
(1)	(2)	(3)	(4)
Aceh	90.88	91.98	94.69
Sumatera Utara	87.38	91.09	95.30
Sumatera Barat	85.58	89.50	93.75
Riau	89.90	91.63	95.30
Jambi	91.17	93.87	97.58
Sumatera Selatan	89.57	94.27	95.82
Bengkulu	86.93	91.38	93.86
Lampung	90.19	93.11	95.77
Kepulauan Bangka Belitung	85.27	90.91	94.86
Kepulauan Riau	83.69	86.88	89.47
DKI Jakarta	83.94	91.54	93.32
Jawa Barat	90.37	93.63	96.31
Jawa Tengah	90.53	92.75	95.87
DI Yogyakarta	91.37	92.73	94.91
Jawa Timur	89.96	92.46	95.70
Banten	81.03	91.88	94.88
Bali	94.59	94.66	95.10
Nusa Tenggara Barat	86.36	93.70	96.31
Nusa Tenggara Timur	90.05	94.00	96.77
Kalimantan Barat	89.87	91.84	96.07
Kalimantan Tengah	91.28	95.31	98.22
Kalimantan Selatan	86.21	91.94	95.74
Kalimantan Timur	88.31	92.07	94.62
Sulawesi Utara	91.86	94.42	98.39
Sulawesi Tengah	88.05	92.01	97.28
Sulawesi Selatan	89.90	92.20	96.20
Sulawesi Tenggara	88.42	91.92	97.21
Gorontalo	92.19	94.12	97.88
Sulawesi Barat	86.54	93.26	96.46
Maluku	83.51	90.97	97.22
Maluku Utara	85.48	91.19	96.94
Papua Barat	79.43	85.77	92.49
Papua	75.67	87.99	92.55
Indonesia	88.89	92.56	95.66

Sumber/Source: Susenas, 2012

Dari Tabel 4.1. terlihat bahwa rumah tangga di Sulawesi Utara mempunyai persentase tertinggi untuk sikap percaya terhadap tokoh agama (98,39%). Untuk sikap percaya terhadap tokoh masyarakat, persentase tertinggi diperoleh Provinsi Kalimantan Tengah (95,31%), sementara Bali mempunyai persentase tertinggi untuk sikap percaya terhadap aparatur desa (94,59%). Provinsi Sulawesi Utara, dan Kalimantan Tengah juga mempunyai persentase di atas angka nasional untuk persepsi sikap percaya penduduk terhadap tokoh masyarakat, aparatur desa dan tokoh agama. Selain itu, masih terdapat tujuh provinsi lagi yang mempunyai persentase penduduk percaya terhadap tokoh di lingkungan desa lebih tinggi dari angka nasional, yaitu Jambi, Sumatera Selatan, Jawa Barat, Jawa Tengah, Nusa Tenggara Timur, Lampung dan Gorontalo. Hasil ini menunjukkan bahwa sembilan provinsi tersebut mempunyai modal sosial kognitif yang tinggi berupa sikap percaya terhadap tokoh di lingkungan desa.

Beberapa provinsi lain seperti Papua, Papua Barat dan Kepulauan Riau mempunyai persentase terendah masing-masing untuk sikap percaya terhadap aparatur desa, tokoh masyarakat dan tokoh agama. Ketiga provinsi tersebut bersama beberapa provinsi seperti: Sumatera Utara, Sumatera Barat, Bengkulu, Kepulauan Bangka Belitung, DKI Jakarta, Banten, dan Kalimantan

Table 4.1. shows that households in Sulawesi Utara had the highest percentage of trust in the religious figures (98.39%). As for trust in community leaders, the highest percentage was seen in Kalimantan Tengah (95.31%), while Bali had the highest percentage of trust in the village apparatus (94.59%). Sulawesi Utara and Kalimantan Tengah also had the percentages above the national average rate for trust in community leaders, village apparatus and religious figures. In addition, there were seven provinces that had percentage of trust in the village's figures were higher than the national rate, namely province of Jambi, Sumatera Selatan, Jawa Barat, Jawa Tengah, Nusa Tenggara Timur, Lampung, and Gorontalo. These indicate that nine provinces have highly cognitive social capital in the form of trust in the village's figures.

Some provinces such as Papua, Papua Barat and Kepulauan Riau had the lowest percentage of trust in village apparatus, community leaders and religious figures. These provinces with some other provinces, such as Sumatera Utara, Sumatera Barat, Bengkulu, Kepulauan Bangka Belitung, DKI Jakarta, Banten, and Kalimantan Timur had lower percentages than the national rate

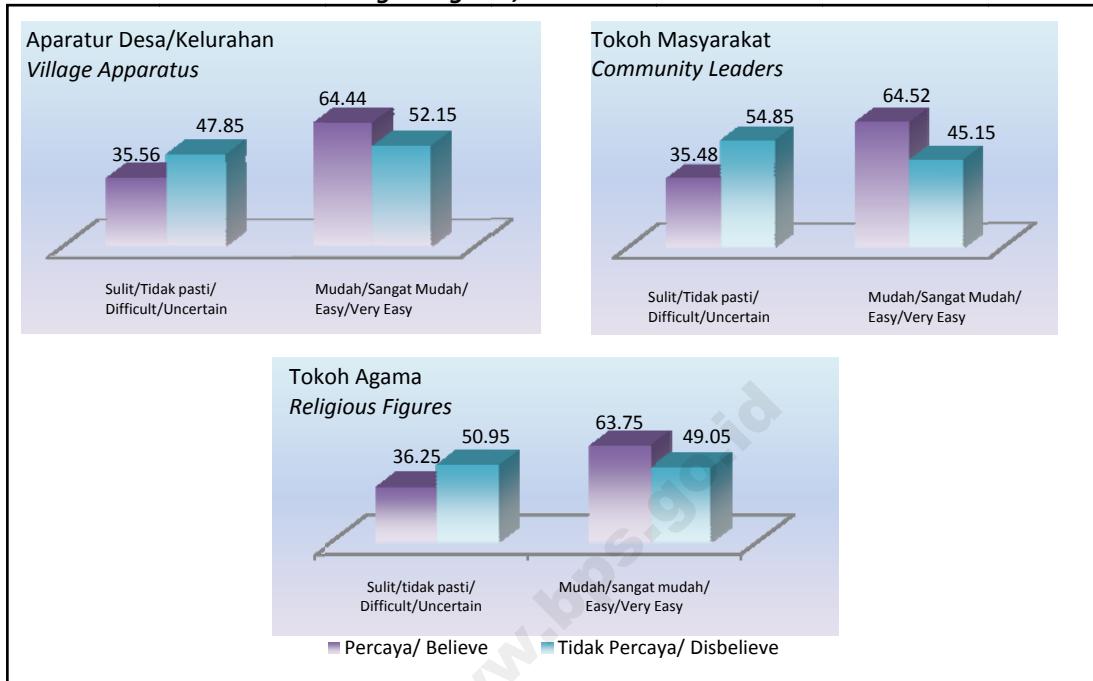
Timur mempunyai persentase di bawah angka nasional untuk persepsi sikap percaya penduduk terhadap tokoh masyarakat, aparatur desa dan tokoh agama. Meskipun lebih rendah dari angka nasional, namun secara umum persentase penduduk yang percaya dengan tokoh di lingkungan desa untuk sejumlah provinsi tersebut tetap relatif tinggi.

Rasa percaya, yang disebut Nan Lin sebagai aset kolektif, menjadi faktor ketidaksetaraan yang mempengaruhi akses anggota komunitas terhadap modal sosial. Gambar 4.1. ingin memperlihatkan keterkaitan antara sikap percaya terhadap tokoh di lingkungan desa dengan kemudahan mendapatkan pertolongan. Kemudahan mendapatkan pertolongan didefinisikan sebagai pertolongan atau bantuan dari tetangga yang bukan kerabat ketika individu sedang mengalami masalah keuangan. Hasilnya, rumah tangga yang percaya terhadap tokoh di lingkungan desa mempunyai persentase lebih tinggi untuk mempunyai persepsi mudah mendapatkan pertolongan dibandingkan rumah tangga yang tidak percaya.

for the trust perception in community leaders, village apparatus and religious figures. Although it was lower than the national rate, the percentage of people who believed in village's figures in these provinces remained relatively high.

Trust, called by Nan Lin as collective asset, determines the amount of resources that can be accessed by members of the community. Figures 4.1. shows the relationship between trust in the village's figures and ease in getting help. The easiness to get help is defined as aid or help from neighbours when the respondent is experiencing financial problem. As a result, households who believe in the village's figures have higher percentage to be 'easy to get help' than households who do not believe.

Gambar 4.1. Persentase Rumah Tangga Menurut Persepsi Kemudahan Mendapatkan Pertolongan dan Sikap Percaya Terhadap Tokoh di Lingkungan Desa, 2012
Figure 4.1. Percentage of Households By Perception of Getting Help from Others and Trust in The Village's Figures, 2012



4.2. Sikap Percaya Terhadap Tetangga

Hubungan horisontal merupakan salah satu bentuk hubungan sosial sehari-hari yang dilakukan antar anggota masyarakat desa yang mempunyai posisi yang setara dalam struktur sosial, contohnya hubungan antar tetangga. Susenas 2012 memuat data persepsi sikap percaya rumah tangga terhadap tetangga dalam hal: (1) percaya menitipkan rumah pada tetangga ketika semua anggota rumah tangga (ART) bepergian/menginap di tempat lain dan (2) percaya menitipkan anak (0-12 tahun) pada tetangga jika tidak satupun ART dewasa ada di rumah.

4.2. Trust In Neighbours

Horizontal interaction is one of the forms of everyday social interactions conducted among community members who have equal position in the social structure, for example, relationship between neighbours. The 2012 Socio-Economic Survey consists of perception of trust in neighbours in terms of: (1) trust to watch the house when all household members travelling/staying elsewhere and (2) trust to watch their children (aged 0-12 years old) when no adult household members at home.

Tabel 4.2 Persentase Rumah Tangga yang Percaya Terhadap Tetangga Menurut Provinsi, 2012
Table 4.2 Percentage of Households Who Trust The Neighbours By Province, 2012

Provinsi Province	Menitipkan Rumah To Watch The House	Menitipkan Anak (0-12 Tahun) To Watch The Children (0-12 Years)
(1)	(2)	(3)
Aceh	81.71	63.31
Sumatera Utara	86.46	67.74
Sumatera Barat	82.93	62.41
Riau	87.95	62.45
Jambi	81.62	60.07
Sumatera Selatan	87.92	66.24
Bengkulu	89.43	65.83
Lampung	89.79	69.27
Kepulauan Bangka Belitung	81.52	66.99
Kepulauan Riau	77.59	44.19
DKI Jakarta	73.15	35.16
Jawa Barat	87.98	70.93
Jawa Tengah	90.23	75.07
DI Yogyakarta	85.13	63.56
Jawa Timur	82.43	62.45
Banten	85.22	65.44
Bali	85.13	64.84
Nusa Tenggara Barat	89.39	75.87
Nusa Tenggara Timur	84.21	67.56
Kalimantan Barat	83.05	64.60
Kalimantan Tengah	86.62	63.41
Kalimantan Selatan	84.88	67.24
Kalimantan Timur	81.73	59.49
Sulawesi Utara	87.36	67.54
Sulawesi Tengah	89.16	70.03
Sulawesi Selatan	88.08	73.01
Sulawesi Tenggara	84.96	73.25
Gorontalo	80.31	65.99
Sulawesi Barat	90.28	76.02
Maluku	80.04	65.70
Maluku Utara	81.19	67.30
Papua Barat	76.31	49.59
Papua	68.86	56.56
Indonesia	85.50	66.36

Sumber/Source: Susenas, 2012

Tabel 4.2. menyajikan persentase rumah tangga yang percaya kepada tetangga dalam hal menitipkan rumah dan menitipkan anak. Angka yang disajikan pada tabel tersebut merupakan persentase rumah tangga yang menyatakan ‘percaya’ atau ‘sangat percaya’ terhadap tetangga. Hasilnya menunjukkan bahwa persentase rumah tangga yang percaya menitipkan anak kepada tetangga (66,36%) lebih rendah dibandingkan persentase rumah tangga yang percaya menitipkan rumah (85,50%).

Sikap percaya rumah tangga terhadap tetangga cukup bervariasi antar provinsi. Namun secara umum, kepercayaan dalam hal menitipkan rumah pada tetangga memiliki variasi antar provinsi yang lebih rendah dengan selisih antara nilai tertinggi dan terendah sekitar 21 persen, sementara kepercayaan dalam hal menitipkan anak kepada tetangga mempunyai selisih sekitar 41 persen. Hasil ini menunjukkan kepercayaan antar anggota masyarakat sangat beragam yang mungkin dipengaruhi oleh faktor budaya atau sosial di daerah masing-masing.

Dari Tabel 4.2. terlihat, bahwa Sulawesi Barat memiliki persentase rumah tangga tertinggi untuk sikap percaya menitipkan rumah kepada tetangga (90,28%) dan sikap percaya menitipkan anak (76,02%). Selain

Table 4.2. illustrates the percentage of households who trust their neighbours in terms of watching the house and children when the adult members are not around. The figures presented in this table are the percentage of household who ‘believe’ or ‘strongly believe’ to neighbours in the village. The result shows that the percentage of households who trusted their children at neighbours watch (66.36%) was lower than the percentage of household who trusted their house at the neighbours’ watch (85.50).

Trust in neighbours in the village also varies between provinces. But generally, trusting the neighbours to watch the house had lower variance with differences between the highest and the lowest was only around 21 percent, while the range of trusting the neighbours to watch the children was 41 percent. This result indicates that trust between members of society is very various and this might be influenced or affected by other factors such as cultural or social factors of each region.

Table 4.2. shows that province of Sulawesi Barat had the highest household percentage of trust to leave the house (90.28%) and the highest percentage of trust to leave children (76.02%) at neighbours watch. Besides Sulawesi

Sulawesi Barat, masih terdapat delapan provinsi lain yang mempunyai sikap percaya terhadap tetangga lebih tinggi dari angka nasional, yaitu: Sumatera Utara, Lampung, Jawa Barat, Jawa Tengah, Nusa Tenggara Barat, Sulawesi Utara, Sulawesi Tengah dan Sulawesi Selatan. Hal ini menunjukkan bahwa kesembilan provinsi tersebut mempunyai modal sosial kognitif yang tinggi dalam hal sikap percaya terhadap tetangga.

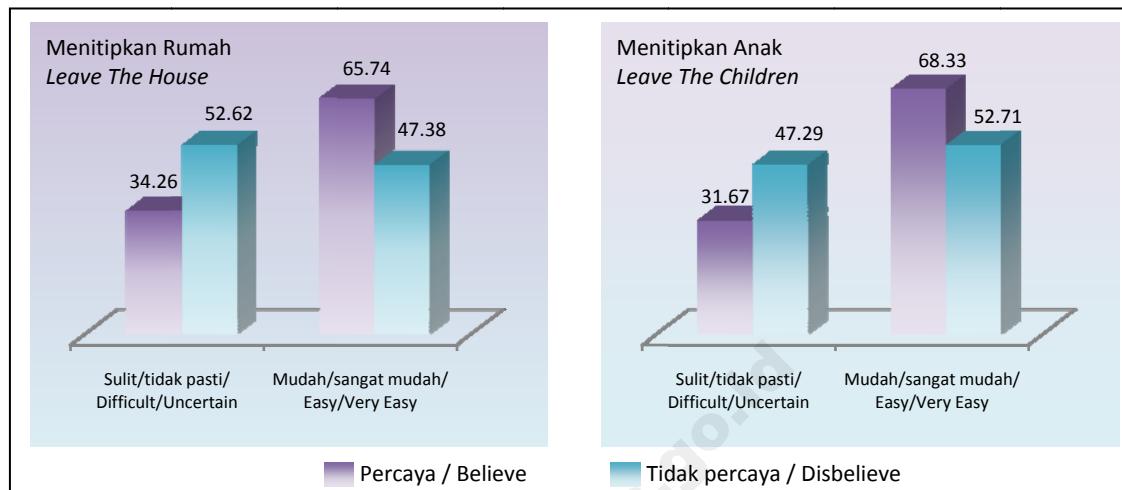
Beberapa provinsi seperti Papua dan DKI Jakarta mempunyai persentase terendah masing-masing untuk sikap menitipkan rumah dan menitipkan anak (usia 0-12 tahun). Kedua provinsi tersebut bersama beberapa provinsi seperti: Aceh, Sumatera Barat, Jambi, Kepulauan Riau, Jawa Timur, Bali, Kalimantan Barat, Kalimantan Timur, Gorontalo, Papua Barat, Maluku, Banten, dan DI Yogyakarta mempunyai persentase di bawah angka nasional untuk persentase penduduk yang percaya terhadap tetangga. Hasil ini menunjukkan sejumlah provinsi tersebut mempunyai modal sosial kognitif yang rendah.

Barat, there were eight other provinces which had trust in neighbours higher than the national rate, namely: Sumatera Utara, Lampung, Jawa Barat, Jawa Tengah, Nusa Tenggara Barat, Sulawesi Utara, Sulawesi Tengah and Sulawesi Selatan. It shows that these nine provinces have high cognitive social capital to the neighbours.

Some provinces such as Papua and DKI Jakarta had the lowest percentage of trust in the neighbours to watch the house and children (aged 0-12 years old). The two provinces (Papua and Jakarta) with some other provinces such as Aceh, Sumatera Barat, Jambi, Kepulauan Riau, Jawa Timur, Bali, Kalimantan Barat, Kalimantan Timur, Gorontalo, Papua Barat, Maluku, Banten, and DI Yogyakarta had the percentage below the national rate for perception of trust in the neighbours. It shows that there is a lower cognitive social capital in those provinces.

Gambar
Figure

Percentase Rumah Tangga Menurut Persepsi Kemudahan Mendapatkan Pertolongan dan Sikap Percaya Terhadap Tetangga di Lingkungan Desa, 2012
4.2. 2012
Percentage of Households By Perception of Getting Help from Others and Trust in Neighbours in The Village, 2012



Sumber/Source: Susenas, 2012

Gambar 4.2. berusaha menggambarkan keterkaitan antara sikap percaya terhadap tetangga dengan kemudahan mendapat pertolongan. Secara umum, terlihat bahwa rumah tangga yang mempunyai sikap percaya dengan tetangga mempunyai persentase yang lebih tinggi untuk mempunyai persepsi ‘mudah’ mendapatkan pertolongan di lingkungan desa dibandingkan rumah tangga yang tidak percaya. Pola ini ditunjukkan oleh kedua bentuk sikap percaya terhadap tetangga, menitipkan anak (68,33%) maupun menitipkan rumah (65,74%) dengan perbandingan persentase yang tidak berbeda jauh.

Figure 4.2. describes the relationship between trust in neighbours and perception of getting help from others. Generally, it appears that households who believe in their neighbours had higher percentage to have perception 'easy' in getting help in village than households who did not believe. This pattern is showed by two forms of trust in neighbours, to watch the children (68.33%) and the house (65.74%), with difference that was not too big.

4.3. Toleransi

Toleransi juga merupakan salah satu perwujudan modal sosial kognitif yang dipahami sebagai sikap mau menerima dan menghargai perbedaan di antara anggota masyarakat. Toleransi antar anggota masyarakat dapat menjamin hak setiap individu untuk bebas dan bertanggung jawab dalam melakukan kegiatan apapun dengan tidak melanggar nilai-nilai yang berlaku di komunitas dan hak-hak orang lain. Toleransi dalam kehidupan masyarakat desa dapat terlihat dari sikap toleransi terhadap kegiatan di lingkungan tempat tinggal yang diselenggarakan oleh sekelompok orang yang berbeda suku bangsa maupun berbeda agama.

Secara umum, masyarakat Indonesia mempunyai sikap toleransi yang cukup tinggi. Tabel 4.3. menunjukkan persentase rumah tangga yang mempunyai persepsi ‘senang’ dengan kegiatan yang dilakukan oleh suku bangsa lain atau agama lain. Angka yang disajikan pada tabel tersebut merupakan persentase rumah tangga yang merasa ‘senang’ atau ‘sangat senang’ terhadap kegiatan yang dilakukan oleh sekelompok orang dari suku bangsa lain atau agama lain di lingkungan tempat tinggal. Hasil yang diperoleh menunjukkan bahwa persentase masyarakat Indonesia yang senang dengan kegiatan yang dilakukan oleh suku bangsa lain (71,53%) lebih tinggi daripada kegiatan yang dilakukan oleh agama lain (61,72%).

4.3. Tolerance

Tolerance is also a form of cognitive social capital that is understood as a willing to accept differences in attitude and tolerance in the society. Tolerance in the community can ensure right of every individual to have freedom and responsibility of any action without colliding with others' values and rights. Tolerance in society can be seen from tolerance to activity held by other ethnic or religious groups in neighbourhood.

In general, Indonesian people have enough tolerance level regarding activities carried out by other ethnics or religions. Table 4.3. shows percentage of households who have ‘happy’ perception towards activities carried out by other ethnics or religions. The figures presented in this table are the percentage of households who have ‘happy’ or ‘very happy’ perception to those activities. The result shows that the percentage of Indonesian society who felt happy with activities carried out by other ethnics (71.53%) was higher than those who felt the same towards activities carried out by other religions (61.72%).

Jika dilihat menurut wilayah, sikap toleransi rumah tangga cukup bervariasi antar provinsi. Sikap toleransi terhadap kegiatan yang dilakukan oleh suku bangsa lain mempunyai variasi yang lebih rendah dengan selisih antara persentase tertinggi dan terendah sekitar 38 persen, sementara sikap toleransi terhadap kegiatan dari agama lain mempunyai selisih mencapai 57 persen. Keberagaman tingkat toleransi antar agama dalam masyarakat dapat dipengaruhi oleh (1) atmosfir positif di lingkungan masyarakat, (2) pendidikan budaya dan (3) kemampuan empati atau intelegensi sosial atau kepekaan sosial (Allport, 1954).

Pada Tabel 4.3. terlihat Papua Barat mempunyai persentase rumah tangga dengan nilai tertinggi untuk sikap senang terhadap kegiatan oleh suku bangsa lain (93,85%) dan Sulawesi Utara untuk sikap senang terhadap kegiatan oleh agama lain (89,64%). Kedua provinsi tersebut beserta 19 provinsi lainnya mempunyai persentase penduduk yang senang terhadap kegiatan dari suku bangsa lain maupun agama lain di atas angka nasional. Selain itu, Nusa Tenggara Barat mempunyai persentase penduduk terendah untuk sikap senang terhadap kegiatan dari suku bangsa lain (56,23 persen) dan Aceh untuk sikap senang terhadap kegiatan dari agama lain (32,21 persen).

If it is viewed by region, tolerance of households is varied between provinces. Tolerance for activities carried out by other ethnics had lower variations with the differences between the highest and lowest percentage was only around 38 percent, while tolerance to the activities carried out by other religions had differences of 57 percent. The diversity level of tolerance among different religions in society can be influenced by (1) a positive atmosphere in the community, (2) education and culture (3) empathy ability or social intelligence or social sensitivity (Allport, 1954).

Table 4.3. indicates that Papua Barat has the highest percentage of households who felt happy about other ethnic activities (93.85%) while Sulawesi Utara had the highest percentage of households who felt happy about other religious activities (89.64%). Both provinces with 19 other provinces had percentages above the national average for the perception of tolerance to activities of other ethnics and religions. In addition, Nusa Tenggara Barat had the lowest percentage of people who felt happy about other ethnic activities (56.23 percent) while Aceh had the lowest percentage of people who felt happy about other religious activities (32.21 percent).

**Tabel
Table**

**4.3. Persentase Rumah Tangga yang Senang Terhadap Kegiatan oleh Suku Bangsa Lain dan Agama Lain di Lingkungan Tempat Tinggal Menurut Provinsi, 2012
*Percentage of Households Who Feel Happy About Other Ethnic and Religious Activities in The Neighbourhood By Province, 2012***

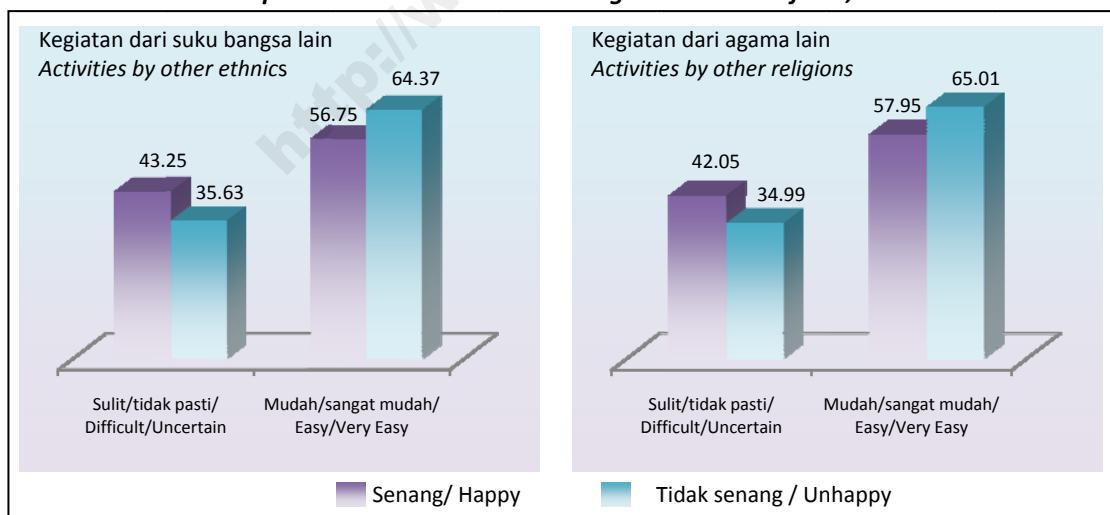
Provinsi <i>Province</i>	Pelaku Kegiatan / Actor	
	Suku bangsa lain <i>Other Ethnics</i>	Agama lain <i>Other Religious</i>
(1)	(2)	(3)
Aceh	69.23	32.21
Sumatera Utara	80.50	74.35
Sumatera Barat	64.81	45.25
Riau	83.12	69.42
Jambi	77.88	58.14
Sumatera Selatan	80.13	66.51
Bengkulu	82.95	66.87
Lampung	87.53	82.31
Kepulauan Bangka Belitung	73.50	64.41
Kepulauan Riau	89.10	86.21
DKI Jakarta	82.00	72.65
Jawa Barat	63.15	46.58
Jawa Tengah	61.14	60.75
DI Yogyakarta	77.88	82.20
Jawa Timur	69.68	62.36
Banten	69.89	50.10
Bali	66.41	71.47
Nusa Tenggara Barat	56.23	39.20
Nusa Tenggara Timur	79.32	79.90
Kalimantan Barat	87.75	85.03
Kalimantan Tengah	92.37	88.70
Kalimantan Selatan	79.42	58.04
Kalimantan Timur	86.03	77.82
Sulawesi Utara	89.01	89.64
Sulawesi Tengah	92.07	85.57
Sulawesi Selatan	75.63	63.49
Sulawesi Tenggara	84.61	63.49
Gorontalo	65.07	55.48
Sulawesi Barat	80.88	66.87
Maluku	83.55	80.03
Maluku Utara	87.23	76.26
Papua Barat	93.85	86.35
Papua	63.71	62.87
Indonesia	71.53	61.72

Sumber/Source: Susenas, 2012

Tingginya sikap toleransi antar anggota masyarakat akan menciptakan kohesifitas dalam suatu komunitas. Toleransi menjadi salah satu modal sosial kognitif karena adanya kecenderungan dalam masyarakat yang kohesif untuk melakukan imbal balik dalam kebaikan (resiprositas). Gambar 4.3. memperlihatkan bahwa rumah tangga yang senang terhadap kegiatan yang diselenggarakan oleh agama lain (65,01%) ataupun suku bangsa lain (64,37%). mempunyai persentase lebih tinggi untuk mempunyai persepsi mudah mendapatkan pertolongan dibandingkan mereka yang tidak senang.

Gambar 4.3.
Figure

Percentase Rumah Tangga Menurut Persepsi Kemudahan Mendapatkan Pertolongan dan Tanggapan Terhadap Kegiatan oleh Suku atau Agama Lain, 2012
Percentage of Households By Perception of Getting Help from Others and Response To Other Ethnics or Religious Activities from, 2012



Sumber/Source: Susenas, 2012

The high tolerance among members of the community creates cohesiveness within them. Tolerance becomes one of the cognitive social capital forms because cohesive society tends to perform reciprocity. Figure 4.3. shows that households who felt happy to activities from other religions (65,01%) or other ethnics (64,37%) had the higher percentage to have perception 'easy to get help' than whom that unhappy.

KELOMPOK DAN JEJARING

GROUPS AND NETWORKS

5

http://www.bps.go.id

KELOMPOK DAN JEJARING GROUPS AND NETWORKS

5

Modal sosial merupakan sumber daya yang melekat dalam hubungan sosial. Peluang untuk memanfaatkan modal sosial dapat ditingkatkan dengan menjalin hubungan sosial sebanyak mungkin. Lin (2001) menyebutnya sebagai investasi modal sosial. Investasi modal sosial yang dilakukan sejak dulu akan memperluas dan memperkuat jaringan sosial yang dimiliki. Manfaat hubungan sosial mungkin tidak secara langsung dirasakan karena kualitas hubungan sosial yang terbentuk juga menentukan besaran manfaat yang dapat diperoleh. Oleh karena itu, investasi modal sosial termasuk pula memelihara hubungan antar pribadi dengan interaksi sosial yang baik berdasarkan norma dan nilai-nilai kepercayaan yang berlaku dalam masyarakat.

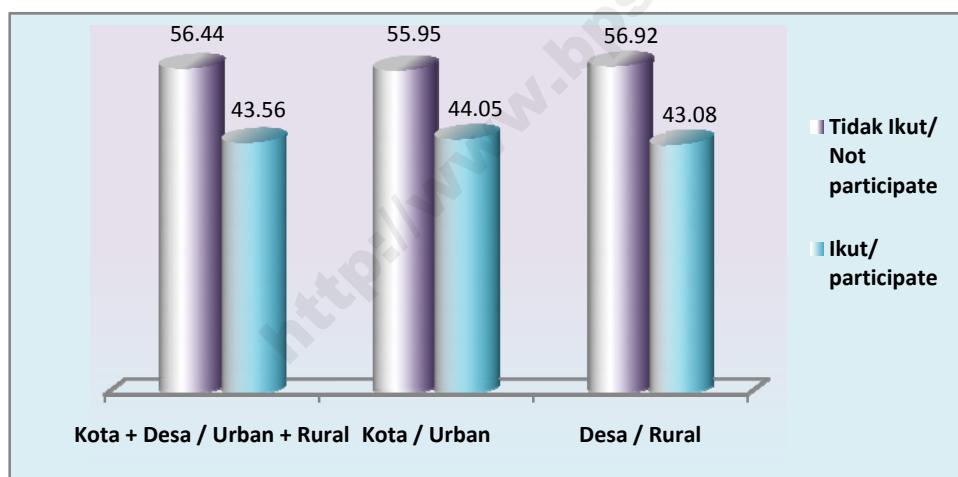
Umumnya individu membangun ataupun memperluas jejaring sosial dengan ikut serta dalam suatu kelompok sosial. Selain itu pemeliharaan hubungan sosial dilakukan dengan aktif mengikuti berbagai kegiatan. Semakin besar dan banyak kelompok sosial yang diikuti, semakin terbuka kesempatan seseorang untuk mengakses dan memanfaatkan modal sosial yang ada dalam jejaring.

Social capital involves resources embedded in social relationship. Opportunity to utilize social capital can be enhanced by doing social relations as much as possible. Lin (2001) refers it as social capital investment. Social capital investment done early expands and strengthens social networks owned. Social relation benefits may not be directly perceived because quality of social relationships that are formed also determines the amount of benefits obtained. Therefore, social capital investment also consists of maintaining interpersonal relationships with good social interaction based on the applied norms and values in society.

Generally, individuals build or expand social networks by participating in a social group. In addition, maintenance of social relationships is done by participate actively in various activities. The larger and more social groups that are followed, the more opportunities someone will get to access and utilize social capital that exist in the network.

Berdasarkan data Susenas 2012, diketahui terdapat sekitar 56,44 persen rumah tangga yang tidak ikut serta dalam kelompok ataupun organisasi di lingkungan tempat tinggal (Gambar 5.1.). Angka tersebut menunjukkan kemauan rumah tangga untuk menjadi bagian dari sebuah kelompok atau organisasi dalam lingkungan tempat tinggal relatif masih rendah. Hal ini terjadi baik di perkotaan (55,95%) maupun di perdesaan (56,92%) dengan persentase yang hampir sama.

Gambar 5.1. **Figure 5.1.** **Persentase Rumah Tangga Menurut Klasifikasi Wilayah dan Keikutsertaan dalam Kelompok/Organisasi di Lingkungan Tempat Tinggal, 2012**
Percentage of Households By Region Classification and Participation in Groups or Organizations in The Neighbourhood, 2012



Sumber/Source: Susenas, 2012

Modal sosial merupakan aset kolektif yang dapat dimanfaatkan oleh semua orang yang berada dalam jejaring sosial yang sama. Lin (2001) menegaskan adanya ketidaksetaraan dalam akses sumber daya yang disebabkan oleh perbedaan posisi individu dalam struktur sosial. Informasi ini belum tersedia

Based on The National Socio-Economic Survey in 2012, there were 56.44 percent of households who did not follow any group/organization in the neighbourhood (Figure 5.1.). The figure shows that household awareness to become part of a group/organization in the neighbourhood is still low. This occurred both in urban (55.95%) and rural areas (56.92%) with the similar percentage.

Social capital is a collective asset that should be accessible to everyone who is in the same social network. Lin (2001) confirms the inequalities in accessing resources are caused by the difference of person's position in the social structure. This information is not available because Susenas does not especially ask

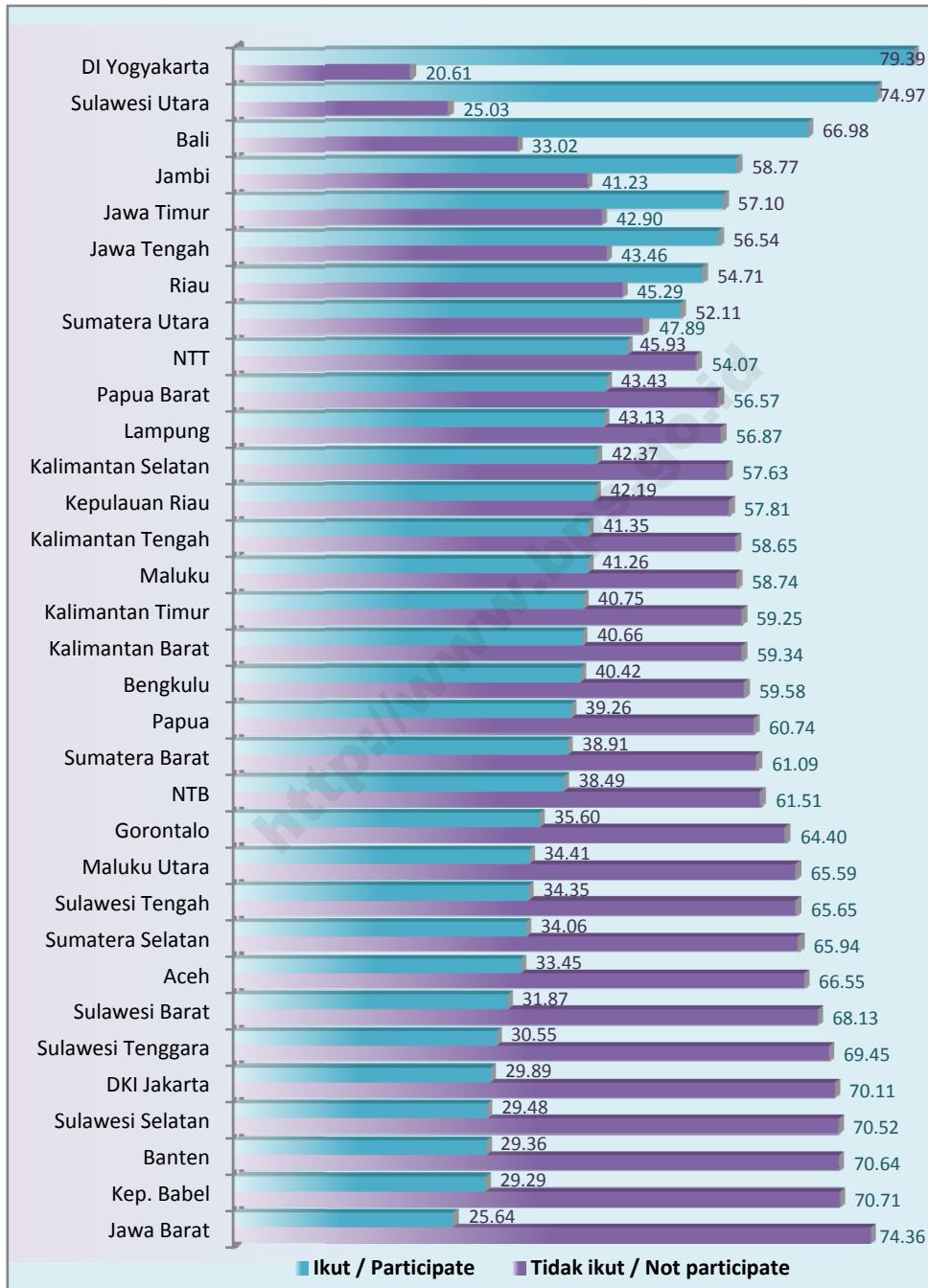
karena Susenas tidak secara khusus menanyakan posisi seseorang dalam kelompok/organisasi sosial yang diikutinya.

Jika dilihat menurut wilayah, keikutsertaan rumah tangga dalam kegiatan kelompok atau organisasi di lingkungan tempat tinggal sangat bervariasi antar provinsi. Gambar 5.2. menyajikan persentase rumah tangga menurut banyaknya organisasi atau kelompok yang diikuti. Keikutsertaan rumah tangga dalam kegiatan kelompok atau organisasi mempunyai perbedaan persentase yang sangat besar antar provinsi (53,75%). Provinsi Yogyakarta dan Sulawesi Utara mempunyai persentase rumah tangga dengan keikutsertaan yang relatif tinggi yaitu di atas 70 persen. Keikutsertaan rumah tangga pada provinsi tersebut masing-masing adalah 79,39 persen dan 74,97 persen. Dari gambar tersebut juga terlihat bahwa keikutsertaan rumah tangga dalam kegiatan organisasi atau kelompok yang paling rendah berada di Provinsi Jawa Barat. Hanya sekitar 26 persen rumah tangga Jawa Barat yang ikut serta dalam kegiatan organisasi atau kelompok di lingkungan tempat tinggal. Provinsi lain yang mempunyai tingkat partisipasi yang sangat rendah (di bawah 30%) adalah Kepulauan Bangka Belitung, DKI Jakarta, Banten dan Sulawesi Selatan.

individual's position in their social groups/organizations.

Participation of households in activities of groups or organizations in neighbourhood is varied between provinces. Figure 5.2. presents percentage of households by the number of organizations or groups that are followed. Participation of households in activities of groups or organizations had a very large percentage difference between provinces (53,75%). The province of Yogyakarta and Sulawesi Utara had percentage of households with relatively high participation which were over 70 percent. Participation of the households in each province, respectively, were 79.39 percent and 74.97 percent. From that chart, it can also be seen that the lowest participation of households occurred in Jawa Barat. Only about 26 percent of households in this province that followed organizations or groups in the neighbourhood. Other provinces that had low participation level (under 30 percent) were Kepulauan Bangka Belitung, DKI Jakarta, Banten and Sulawesi Selatan.

Gambar 5.2. Persentase Rumah Tangga Menurut Provinsi dan Keikutsertaan dalam Kelompok/Organisasi di Lingkungan Tempat Tinggal, 2012
Figure 5.2. Percentage of Households By Province and Participation in Groups or Organizations in The Neighbourhood, 2012



Sumber/Source: Susenas, 2012

Keikutsertaan rumah tangga dalam berbagai kelompok atau organisasi di lingkungan tempat tinggal dapat membawa dampak positif bagi rumah tangga maupun masyarakat sekitar. Pertama, rumah tangga yang aktif dalam berbagai kelompok atau organisasi akan mempunyai keinginan yang lebih kuat untuk melakukan kegiatan secara bersama di lingkungan tempat tinggal. Keinginan ini muncul sebagai bentuk rasa kepedulian dan keeratan masyarakat terhadap lingkungan sosial di sekitarnya. Kedua, dengan melakukan kegiatan secara bersama, masyarakat dapat mengakses sekaligus memanfaatkan modal sosial yang ada dalam kelompok sosial maupun modal sosial yang ada pada individu masing-masing anggota kelompok.

Data Susenas 2012 mencakup informasi mengenai frekuensi partisipasi dalam aksi bersama di lingkungan tempat tinggal. Aksi bersama yang dilakukan oleh masyarakat desa dapat dikelompokkan menjadi dua, yaitu: kegiatan bersama dan kegiatan sosial. Informasi kegiatan bersama yang dikumpulkan mencakup kegiatan untuk membantu warga yang terkena musibah dan kegiatan untuk kepentingan umum. Informasi kegiatan sosial yang dikumpulkan mencakup kegiatan sosial keagamaan dan kemasyarakatan di lingkungan tempat tinggal.

Participation of households in every group or organization in the neighbourhood brings positive impacts both to the household and communities. First, household who actively participate in various groups or organizations will have stronger awareness to be active in joint activities in the neighbourhood. This awareness appears because of care and closeness in the society to the social environment. Second, by doing joint activities, society can access and utilize the existing social capital in social group or social capital that exists in each of the group member.

The National Socio-Economic Survey 2012 data includes information regarding frequency of participation in collective action in the neighbourhood. Collective action undertaken by village society can be classified into two groups, namely joint activities and social activities. Information of joint activities includes activities undertaken to assist the affected people and activities undertaken for the public interest. Whereas information of social activities includes religious social activities and society social activities in the neighbourhood.

Percentase Rumah Tangga Menurut Tingkat Partisipasi dalam Kegiatan Bersama dan Keikutsertaan dalam Kelompok/Organisasi di Lingkungan

Gambar 5.3. Tempat Tinggal, 2012

Figure Percentage of Households By Participation in Joint Activities and Participation in Groups/Organizations in The Neighbourhood, 2012



Sumber/Source: Susenas, 2012

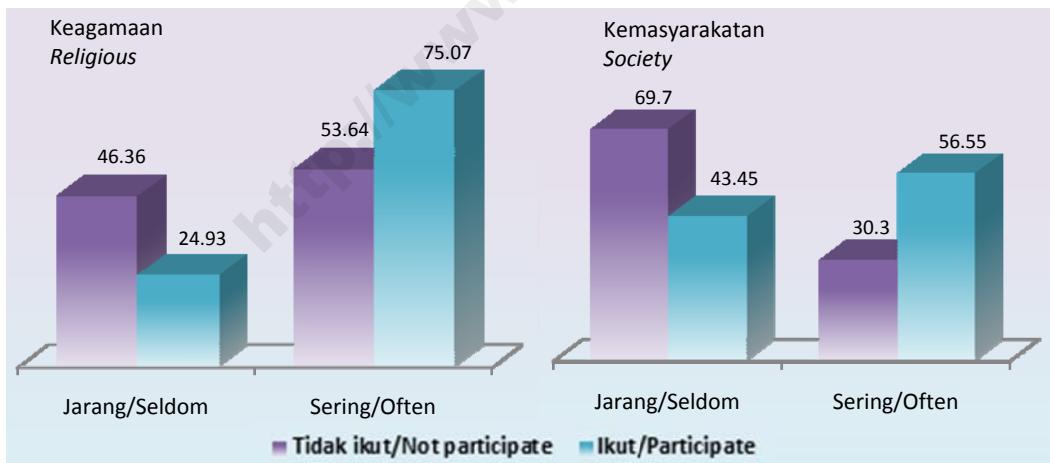
Pada Gambar 5.3. terlihat bahwa rumah tangga yang ikut serta dalam kelompok atau organisasi mempunyai tingkat partisipasi dalam kegiatan bersama yang lebih tinggi dibandingkan mereka yang tidak ikut serta dalam kelompok/organisasi di lingkungan tempat tinggal. Rumah tangga yang ikut serta dalam kelompok atau organisasi mempunyai persentase yang lebih tinggi untuk sering/selalu berpartisipasi dalam kegiatan bersama untuk membantu warga yang sedang mengalami musibah dibandingkan mereka yang tidak. Pola yang sama juga ditunjukkan dalam kegiatan bersama untuk kepentingan umum. Ini menunjukkan bahwa rumah tangga yang aktif berorganisasi cenderung lebih sering berpartisipasi dalam kegiatan bersama di lingkungan tempat tinggal.

Figure 5.3. shows that households who participate in groups/ organizations have higher participation in joint activities than those who do not follow. Household who follow in groups or organizations have higher percentage to often or always to participate in joint activities in assisting the affected people. As for joint activities for public interest, the similar result was also seen. These show that households who actively participate in organizations will tend to participate in joint activities in the neighbourhood.

Keikutsertaan rumah tangga dalam berbagai kelompok atau organisasi di lingkungan tempat tinggal juga berpengaruh terhadap partisipasi rumah tangga dalam kegiatan sosial. Pada Gambar 5.4. terlihat bahwa rumah tangga yang ikut serta dalam kelompok atau organisasi mempunyai persentase yang lebih tinggi untuk berpartisipasi dalam kegiatan sosial dibandingkan mereka yang tidak ikut. Hasil ini ditunjukkan pada kegiatan sosial kemasyarakatan maupun kegiatan sosial keagamaan.

Gambar 5.4.
Figure 5.4.

Persentase Rumah Tangga Menurut Partisipasi dalam Kegiatan Sosial dan Keikutsertaan dalam Kelompok/Organisasi, 2012
Percentage of Households By Participation in Social Activities and Participation in Groups or Organizations, 2012



Sumber/Source: Susenas, 2012

Participation of households in various groups or organizations in neighbourhood also influences their participation in social activities. Figure 5.4. illustrates that households who participate in groups or organizations have higher participation in social activities than those who do not. This result is seen in society sosial activities and religious social activities.

**RESIPROSITAS
DAN AKSI BERSAMA**

***RECIPROCITY
AND COLLECTIVE ACTION***

6

RESIPROSITAS DAN AKSI BERSAMA

RECIPROCITY AND COLLECTIVE ACTION

6

Putnam dalam Hasbullah (2006) menyatakan bahwa bangsa yang memiliki modal sosial tinggi cenderung lebih efisien dan efektif dalam menjalankan berbagai kebijakan untuk menyejahterakan dan memajukan kehidupan rakyatnya. Modal sosial dapat meningkatkan kemampuan individu untuk menyelesaikan kompleksitas permasalahan bersama, mendorong perubahan yang cepat di dalam masyarakat, menumbuhkan kesadaran kolektif untuk memperbaiki kualitas hidup, dan mencari peluang yang dapat dimanfaatkan untuk peningkatan kesejahteraan. Hal ini terbangun karena adanya kohesifitas dalam masyarakat yang ditandai dengan semangat untuk melakukan kebaikan secara ikhlas dan berpartisipasi aktif dalam rangka mendukung berbagai kegiatan yang dilaksanakan untuk peningkatan kesejahteraan rakyat.

6.1. Resiprositas

Kekuatan modal sosial sebagai energi kolektif yang berasal dari masyarakat sendiri tergantung pada kualitas dan kuantitas hubungan sosial antar individu dalam masyarakat. Adler dan Kwon dalam Agus Supriono dkk (2009: 4) mengatakan bahwa "dimensi modal sosial merupakan gambaran dari

Putnam in Hasbullah (2006) states that nation which has high social capital tend to be more efficient and effective in carrying out various policies to promote welfare and life of its people. Social capital can enhance individual's ability to solve the complexities of the shared problems, encourage rapid changes in society, collect awareness to improve the quality of life, and look for opportunities that can be exploited to increase welfare. This can be happened because of cohesiveness in societies characterized by spirit to carry out reciprocal kindness and participate actively in supporting various implemented programs for welfare of people.

6.1. Reciprocity

The strength of social capital as collective energy that comes from the society itself depends on the quality and quantity of social relationships between individuals in society. Adler and Kwon in Agus Supriono et al (2009: 4) mention that "the dimension of social capital is a picture of the internal attachment that

keterikatan internal yang mewarnai struktur kolektif dan memberikan kohesifitas dan keuntungan-keuntungan bersama dari proses dinamika yang terjadi dalam masyarakat". Sifat kohesif masyarakat yang memiliki hubungan kuat antar unit sosial (individu maupun kelompok dan organisasi) inilah yang dapat memberikan berbagai keuntungan bersama dari proses dan dinamika sosial yang terdapat dalam masyarakat tersebut.

Salah satu bentuk kohesifitas sosial dalam masyarakat setingkat desa dapat terlihat dari adanya budaya saling tolong-menolong dalam kehidupan ber-masyarakat. Walaupun belum tersedia data yang secara rinci menggambarkan adanya kohesifitas tersebut, data Susenas menyediakan informasi mengenai persepsi kesiapan rumah tangga dalam membantu orang lain yang tidak berdaya (butuh pertolongan) di lingkungan tempat tinggal. Data yang tersedia membagi persepsi kesiapan rumah tangga dalam empat kategori yaitu: tidak siap, tidak pasti, siap dan sangat siap. Informasi ini dilengkapi dengan persepsi rumah tangga dalam kemudahan memperoleh pertolongan, yang juga dibagi dalam empat kategori, yaitu: sangat sulit, tidak pasti, mudah dan sangat mudah. Tabulasi antara persepsi rumah tangga terkait kesiapan membantu orang lain dan kemudahan

characterizes collective structure and provides cohesiveness and mutual benefits of the dynamics in society". Cohesive character of society that has strong relation between social units (individual, social group, and organization) can provide various collective benefits in society.

One form of social cohesiveness in village society can be seen from culture of reciprocity in social life. Although the detail data that explain cohesiveness is not available, Susenas provides information regarding household perception in readiness to help others who are powerless or need help in the neighborhood. This readiness data is divided into four categories, namely: not ready, uncertain, ready and very ready. This information is completed by household perception in the ease of getting help, which is also divided into 4 categories, namely: very difficult, uncertain, easy and very easy. Tabulation between household perception of readiness to help others and ease of getting help is expected to provide a sense of cohesiveness in village society in Indonesia.

memperoleh pertolongan diharapkan dapat memberikan gambaran mengenai kohesifitas dalam masyarakat desa di Indonesia.

Hasil yang diperoleh menunjukkan bahwa secara umum masyarakat Indonesia siap untuk membantu orang lain yang membutuhkan pertolongan di lingkungan tempat tinggal. Hanya sekitar satu persen rumah tangga Indonesia menyatakan tidak siap membantu orang lain yang membutuhkan pertolongan dan 11,13 persen menyatakan tidak pasti (lihat Lampiran 9). Sejalan dengan itu, persentase rumah tangga yang menyatakan mudah mendapatkan pertolongan relatif tinggi. Sebanyak 54,51 persen rumah tangga Indonesia menyatakan mudah mendapatkan pertolongan ketika sedang mengalami masalah keuangan dan 8,56 persen menyatakan sangat mudah (lihat Lampiran 10).

Persepsi rumah tangga terkait kesiapan membantu orang lain berdampak terhadap persepsi mereka terkait kemudahan mendapatkan pertolongan. Tabel 6.1. menunjukkan bahwa rumah tangga yang menyatakan siap membantu orang lain cenderung lebih mudah memperoleh pertolongan daripada rumah tangga yang tidak siap. Rumah tangga yang menyatakan siap ataupun sangat siap mempunyai persentase sekitar 65,59 persen dan 74,15 persen untuk menyatakan mudah

The result shows that, generally, Indonesian society are relatively ready to help others in neighborhood that need help. Only about one percent of Indonesian households that said not ready to help others and 11.13 percent said uncertain (see Appendix 9). Likewise, percentage of households that claimed easy to get help was relatively high. As many as 54.51 percent households claimed that they were able to get help easily when they were in financial problems and 8.56 percent said very easy (see Appendix 10).

Household perception of readiness to help others has effect on perception related to the ease of getting help. Table 6.1. shows that households who are ready to help others tend to get help easier than households who are not ready. Households who said ready or very ready to help others were 65.59 percent and 74.15 percent of them declared can get help easily or very easily. The percentage was higher than the households who were not ready or uncertain to help others.

ataupun sangat mudah memperoleh pertolongan. Persentase tersebut lebih tinggi dibandingkan rumah tangga yang menyatakan tidak siap ataupun tidak pasti dalam membantu orang lain.

Banyak hal yang dapat menjadi pertimbangan rumah tangga dalam menyatakan siap maupun tidak siap dalam memberikan bantuan. Namun, keeratan sosial masyarakat dengan lingkungan sekitarnya diduga menjadi faktor utama yang mempengaruhi persepsi tersebut. Oleh karena itu kohesifitas antar anggota masyarakat sangat mempengaruhi akses rumah tangga untuk menikmati modal sosial yang ada dalam komunitas, seperti kemudahan memperoleh pertolongan.

A lot of factors can interfere household consideration to claim ready or not to give any help. However, social closeness of society with surrounding environment is thought to be the main factor that influences the perceptions. Hence, cohesiveness among the members of society greatly influences household access to enjoy existing social capital within the community, such as ease to get help.

**Tabel 6.1. Persepsi Kemudahan Mendapat Pertolongan di Lingkungan Tempat
Table 6.1. Percentage of Households By Readiness of Helping Others and Perception of Getting Help from Others in The Neighborhood, 2012**

Persepsi Kesiapan Membantu Orang Lain <i>Perception in Readiness of Helping Others</i>	Persepsi Kemudahan Mendapat Pertolongan <i>Perception of Getting Help from Others</i>				Total <i>Total</i>
	Sangat Sulit <i>Very difficult</i>	Tidak Pasti <i>Uncertain</i>	Mudah <i>Easy</i>	Sangat Mudah <i>Very Easy</i>	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Tidak Siap/Not Ready	16.25	38.14	39.04	6.57	100.00
Tidak Pasti/Uncertain	7.62	55.90	33.24	3.24	100.00
Siap/Ready	5.00	29.40	59.16	6.43	100.00
Sangat Siap/Very Ready	4.80	21.05	44.69	29.46	100.00
Total/Total	5.38	31.54	54.51	8.56	100.00

Sumber/Source: Susenas, 2012

6.2. Aksi bersama

Salah satu indikator penting dari output modal sosial adalah adanya aksi bersama dari anggota kelompok yang tercermin dari berbagai bentuk kegiatan yang dilakukan untuk kepentingan umum maupun kelompok (Grootaert, 2002). Bagi masyarakat Indonesia, aksi bersama lebih dikenal dengan istilah gotong royong. Penerapan gotong royong ini misalnya: adanya kegiatan kerja bakti yang dilakukan oleh warga untuk kepentingan umum dan gotong royong dalam rangka upaya untuk mengantisipasi bencana alam.

Secara umum, kebiasaan kerja bakti masih terbina di lingkungan masyarakat Indonesia. Berdasarkan data Podes 2011, (lihat lampiran 15), sebanyak 88,80 persen desa di Indonesia masih mengadakan kegiatan kerja bakti untuk kepentingan umum (BPS, 2011). Namun begitu, data Podes 2008 dan 2011 juga menunjukkan ada tendensi berkurangnya kegiatan gotong royong untuk mengantisipasi bencana alam dalam lingkungan masyarakat desa. Pada tahun 2008 (lihat lampiran 16), sebanyak 43,98 persen desa melakukan gotong royong untuk mengantisipasi bencana alam, sementara pada tahun 2011, hanya sebanyak 41,94 persen desa yang masih melakukannya (BPS, 2011).

Kunci keberhasilan berbagai kegiatan aksi bersama tergantung pada partisipasi aktif dari anggota masyarakat. Dalam Susenas 2012, partisipasi rumah

6.2. Collective Action

One important indicators of social capital output is the collective action of members of community which reflected in the form of activities undertaken for public or group interest (Grootaert, 2002). As for Indonesian people, collective action is known as 'gotong royong'. The implementation of it, for example, is 'kerja bakti' which is done by community for public interest and 'gotong royong' in anticipating natural disaster.

In general, the habit of 'kerja bakti' is still nurtured in society of Indonesia. Based on data of Podes 2011 (see Apendix 15), 88.80 percent of villages in Indonesia held 'kerja bakti' for public interest (Statistics Indonesia-BPS, 2011). However, Podes 2008 and 2011 also showed tendency to decrease for 'gotong royong', which is done to anticipate natural disaster. In 2008 (see Apendix 16), as many as 43.98 percent of villages in Indonesia held 'gotong royong' to anticipate natural disasters, while in 2011, only 41.94 percent of villages that still did it (Statistics Indonesia-BPS, 2011).

The success of various collective activities depends on the active participation of community. In Susenas 2012, the participation rate to engage in

tangga untuk terlibat dalam berbagai kegiatan yang dilakukan di lingkungan tempat tinggal dibedakan menjadi partisipasi dalam kegiatan sosial dan kegiatan bersama. Kegiatan sosial merupakan suatu bentuk aksi bersama yang dilakukan oleh individu maupun kelompok dengan tujuan untuk memaksimalkan utilitas mereka (Burt 1982: 3; Ruiz 1998: 17). Dalam hal ini, kegiatan sosial dibedakan menjadi: (1) sosial keagamaan, seperti: pengajian, perayaan keagamaan, dan (2) sosial kemasyarakatan, seperti: arisan, olahraga, kesenian. Sementara, kegiatan bersama merupakan salah satu wujud dari partisipasi horizontal terhadap prakarsa anggota masyarakat dalam melakukan kegiatan untuk kepentingan umum maupun dalam rangka membantu anggota masyarakat yang lain.

Sebagian besar rumah tangga Indonesia sering berpartisipasi dalam berbagai aksi bersama di lingkungan desa. Namun tingkat partisipasi tersebut berbeda berdasarkan jenis kegiatan. Pada Tabel 6.2. terlihat persentase rumah tangga yang sering berpartisipasi dalam kegiatan bersama untuk membantu warga yang terkena musibah mencapai 71,34 persen. Angka ini merupakan persentase paling tinggi dibandingkan partisipasi rumah tangga pada kegiatan yang lain. Tingkat partisipasi dalam kegiatan ini juga mempunyai variasi yang paling kecil dengan perbedaan antara persentase tertinggi dan terendah sekitar

various activities carried out in the neighbourhood is divided into social and joint activities. Social activity is a form of collective action undertaken by individuals or groups in order to maximize their utility (Burt 1982: 3; Ruiz 1998: 17). In this case, social activities can be divided into (1) religious social activities, such as: moslem recitation, religious celebrations, and (2) civil social activities, such as 'arisan', sports, arts. Whereas, joint activity is one form of horizontal participation initiated by the member of society in performing activity for public interest and helping others.

Most of Indonesian households often participate in various collective actions in the villages. However, the participation level differs by type of activity. Table 6.2. shows percentage of households who often participated in joint activities to help the affected people was 71.34 percent. This figure was higher than participation in other activities. In addition, participation in this activity also had the lowest variation with differences between the highest and the lowest percentage was around 24 percent. Civil participation in joint activities to help the affected people can be seen from various solidarity actions when there is disaster

24 persen. Partisipasi masyarakat dalam kegiatan bersama untuk membantu warga yang terkena musibah tercermin dari berbagai aksi solidaritas saat terjadi bencana di Indonesia. Misalnya, gempa Aceh yang terjadi pada tahun 2004 dan gempa Yogyakarta pada tahun 2006. Berbagai lapisan masyarakat merasa tergerak untuk membantu, baik dalam aksi penggalangan dana, bantuan makanan dan non-makanan, maupun aksi langsung masyarakat untuk membantu proses evakuasi.

Dari Tabel 6.2. terlihat rumah tangga di Sulawesi Utara mempunyai persentase tertinggi untuk partisipasi di kegiatan sosial keagamaan (80,80%) dan Maluku Utara mempunyai persentase tertinggi di kegiatan untuk kepentingan umum (70,11%). Sementara, Yogyakarta mempunyai persentase tertinggi untuk dua kegiatan aksi bersama, yaitu kegiatan sosial kemasyarakatan (72,61%) dan kegiatan untuk membantu warga (81,59%). Di sisi lain, Nusa Tenggara Barat mempunyai persentase terendah dalam hal partisipasi pada kegiatan sosial kemasyarakatan (24,65%) dan DKI Jakarta mempunyai persentase terendah dalam kegiatan untuk membantu warga (57,72%). Sementara, Kepulauan Bangka Belitung mempunyai persentase partisipasi terendah dalam dua kegiatan, yaitu sosial keagamaan (41,12%) dan kegiatan untuk kepentingan umum (30,22%).

in Indonesia. For example, earthquake which happened in Aceh in 2004 and Yogyakarta in 2006. Various parts of community moved to help, in gathering fund, food aid and non-food items, as well as direct public action to help the evacuation.

From Table 6.2., it can be seen that households in Sulawesi Utara had the highest percentage of participation in religious social activities, which was 80.80 percent and Maluku Utara had the highest percentage of participation in public interest, which was 70.11 percent. Whereas, Yogyakarta had the highest percentage of participation both in communal social activities (72.61%) and joint activities to assist the affected people (81.59%). On the other hand, Nusa Tenggara Barat had the lowest percentage of participation in communal social activities (24.65%) and Jakarta had the lowest percentage of joint activities to assist the affected people (57.72%). Meanwhile, Kepulauan Bangka Belitung had the lowest percentage of participation, both in religious social activities (41.12%) and joint activities in the public interest (30.22 %).

Tabel
Table 6.2.

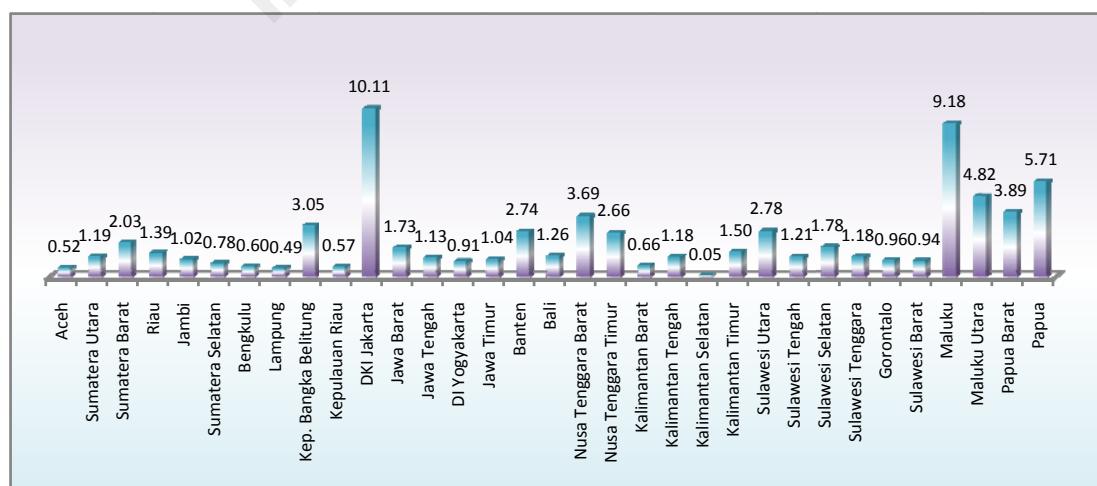
Persentase Rumah Tangga yang Sering Berpartisipasi dalam Aksi Bersama di Lingkungan Tempat Tinggal Menurut Provinsi , 2012
Percentage of Households Who Often Participate in Collective Action in The Neighborhood By Province, 2012

Provinsi Province	Kegiatan Sosial/Social Activities		Kegiatan Bersama/Joint Activities	
	Keagamaan Religious	Kemasyarakatan Social	Membantu Warga Terkena Musibah Help Disaster Victim	Kepentingan Umum Public Interest
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Aceh	73.32	37.07	78.67	52.05
Sumatera Utara	64.99	37.20	66.47	37.92
Sumatera Barat	55.20	35.31	72.73	50.64
Riau	67.97	49.94	73.79	55.03
Jambi	74.12	53.73	75.73	60.16
Sumatera Selatan	55.07	35.79	73.98	49.30
Bengkulu	58.52	47.71	79.94	54.37
Lampung	65.88	35.23	75.71	59.22
Kepulauan Bangka Belitung	41.12	29.21	66.50	30.22
Kepulauan Riau	53.10	36.89	61.62	46.59
DKI Jakarta	44.23	36.01	57.72	38.54
Jawa Barat	57.93	28.33	62.97	45.36
Jawa Tengah	68.94	58.56	79.64	63.92
DI Yogyakarta	70.59	72.61	81.59	69.06
Jawa Timur	67.86	50.25	75.44	52.91
Banten	59.29	32.06	66.81	48.62
Bali	76.37	43.38	74.19	65.54
Nusa Tenggara Barat	62.96	24.65	75.22	55.75
Nusa Tenggara Timur	79.38	51.45	78.22	68.31
Kalimantan Barat	55.96	42.84	68.91	54.01
Kalimantan Tengah	63.09	40.44	66.27	48.20
Kalimantan Selatan	60.15	43.93	66.48	42.07
Kalimantan Timur	56.91	38.49	61.92	44.12
Sulawesi Utara	80.80	59.77	80.91	66.20
Sulawesi Tengah	66.91	38.70	79.51	69.49
Sulawesi Selatan	49.90	31.55	70.15	47.36
Sulawesi Tenggara	53.36	38.85	73.42	58.95
Gorontalo	60.26	34.60	76.25	51.80
Sulawesi Barat	53.95	33.56	77.34	57.43
Maluku	74.26	35.03	77.57	68.34
Maluku Utara	69.35	47.83	74.23	70.11
Papua Barat	70.62	35.95	66.54	59.89
Papua	64.54	34.22	67.95	56.29
Indonesia	62.97	41.74	71.34	52.39

Sumber/Source: Susenas, 2012

Tingginya partisipasi aktif dalam berbagai kegiatan mampu meningkatkan keeratan sosial di antara mereka, yang pada akhirnya dapat menghindari terjadinya gesekan antar kelompok masyarakat di desa, seperti perkelahian massal. Pada Gambar 6.1., terlihat DKI Jakarta yang mempunyai persentase terendah dalam hal partisipasi di dalam aksi bersama, memiliki persentase desa tertinggi untuk kasus perkelahian massal antar warga (10,11%). Hasil ini memberikan pandangan bahwa partisipasi rumah tangga dalam aksi bersama sebagai penerapan dari modal sosial diharapkan mampu menghindari dan menanggulangi berbagai bentuk kerawanan di lingkungan tempat tinggal selain perkelahian massal. Secara lebih lengkap, data persentase desa dengan kasus perkelahian massal ini dapat dilihat pada Lampiran 17.

Gambar 6.1. Persentase Desa yang Mengalami Kejadian Perkelahian Massal Antar Warga Menurut Provinsi, 2011
Figure 6.1. Percentage of Villages That Suffer Massive Fighting Between Local People By Province, 2011



Sumber/Souce: Diolah dari Podes, 2011 / Processed from Podes, 2011

The high of active participation in various activities increases the social cohesion among them, which in turn can prevent friction between groups in village, for example massive fight. In Figure 6.2., it can be seen that Jakarta with the lowest percentage of participation in collective action had the highest percentage on villages having massive fighting between local people (10.11%). This result gives overview that active participation of households in various activities can also be used to tackle and avoid various forms of social and economic vulnerability arises in the community. Data of villages having massive fighting between local people can be seen comprehensively in Appendix 17.

INDEKS MODAL SOSIAL **7**
INDEX OF SOCIAL CAPITAL

http://www.bps.go.id

INDEKS MODAL SOSIAL

INDEX OF SOCIAL CAPITAL

7

Modal sosial merupakan sumber daya yang melekat pada hubungan sosial. Modal sosial selalu ada dalam setiap hubungan sosial yang dilakukan antar individu, antar kelompok, antar organisasi dan bahkan antar negara. Besaran modal sosial tidak dapat dijelaskan hanya dengan satu indikator sederhana. Semakin besar cakupan modal sosial yang ingin diteliti maka semakin kompleks indikator yang digunakan untuk mengukur besaran modal sosial tersebut.

Di Indonesia, desa merupakan wilayah administrasi pemerintahan yang terkecil. Pengukuran modal sosial pada masyarakat desa merupakan suatu hal yang paling sederhana untuk dilakukan. Modal sosial masyarakat desa merupakan akumulasi dari modal sosial rumah tangga pada wilayah tersebut. Informasi terkait keterangan modal sosial rumah tangga terdapat dalam Susenas yang mencakup dari 3 (tiga) kelompok indikator, yaitu: (1) sikap percaya dan kepatuhan terhadap norma yang berlaku; (2) keanggotaan dalam perkumpulan dan jejaring lokal; dan (3) kegiatan aksi bersama. Masing-masing indikator memberikan gambaran modal sosial masyarakat desa dari sudut pandang yang berbeda.

Social capital is resource embedded in social relations. Social capital is always embedded in social relationships between individual, groups, or organizations and between nations. The amount of social capital can not be explained by a simple indicator only. The bigger social capital scope that is researched, the more complex of indicators that are used to measure social capital.

In Indonesia, village is the smallest administrative area. Measurement of social capital in village society should be a simple thing to do. Social capital of village society is an accumulation of social capital in the households at each region. Information about social capital of household can be obtained in Socio-Economics Survey covering 3 groups of indicators, namely: (1) trust and adherence to norms; (2) membership in local associations and networks; and (3) collective action. Each indicator gives overview about social capital in society in different point of view.

Besaran modal sosial perlu dinyatakan dalam satu indeks komposit sehingga besaran modal sosial dapat dibandingkan antar wilayah. Indeks modal sosial merupakan rata-rata modal sosial yang dimiliki oleh rumah tangga pada provinsi tertentu yang diukur berdasarkan keeratan hubungan rumah tangga dengan komunitas di desa tempat tinggalnya. Dengan tersedianya indeks modal sosial maka analisis terkait peran modal sosial dalam pembangunan dapat dikaji lebih mendalam.

7.1. Pengukuran Indeks Modal Sosial

Pengukuran besaran modal sosial yang ada dalam masyarakat Indonesia telah dirintis sejak tahun 2010 dengan menggunakan data Susenas 2009. Pada saat itu, besaran modal sosial diberi nama sebagai stok modal sosial. Indeks komposit yang dihasilkan telah mencakup tiga pendekatan indikator modal sosial. Pada tahun 2012, cara pengukuran mengalami perbaikan dalam skala data dan metode statistik yang digunakan. Dalam tahapan persiapan data, semua skala data diseragamkan menggunakan 10 skala. Kemudian, Indeks Modal Sosial dihitung dengan Metode Analisis Faktor Eksploratori yang digunakan untuk mengidentifikasi struktur hubungan antar variabel dan dimensi modal sosial. Selanjutnya, faktor yang terbentuk diekstrasi dengan *Principal Axis Factoring (PAF)*.

The amount of social capital needs to be explained in one composite index so that social capital can be compared between regions. Index of social capital is social capital average of households in certain province that is measured based on relationship cohesiveness between households and communities in the neighbourhood. Because of availability of social capital index, analysis related to the role of social capital in development can be studied deeply.

7.1. Measurement of Social Capital Index

The measurement of social capital that exist in Indonesian society has been conducted in 2010 using 2009 National Socio-Economics Survey. At that time, the amount of social capital was called stock of social capital. The composit index included three indicator approaches of social capital. In 2012, the measurement of social capital index had improvement in data scale and statistical methods. During data preparation, the data scale was standardized using 10 scale. Then, the social capital index was measured by Exploratory Factor Analysis Method which was used to identify the structure of the relationship between variables and dimensions of social capital. Furthermore, the factors were extracted by Principal Axis Factoring (PAF).

Indeks modal sosial yang dihasilkan terbentuk dari empat faktor, yaitu: sikap percaya terhadap tokoh di lingkungan desa, partisipasi dalam aksi bersama di desa, toleransi dan sikap percaya terhadap tetangga. Keempat faktor tersebut hanya mencakup dua pendekatan indikator modal sosial, yaitu (1) sikap percaya dan kepatuhan terhadap norma yang berlaku dan (2) aksi bersama. Namun begitu keempat faktor tersebut telah dapat menjelaskan 70,81 persen variasi di dalam data.

Tabel 7.1. Variabel dan Faktor Pembentuk Indeks Modal Sosial, 2012
Table 7.1. Variables and Factors of Social Capital Index, 2012

No.	Nama Variabel <i>Name of Variabel</i>	Faktor Loading <i>Loading's Factor's</i>	% Varian <i>% Variance</i>	Nama Faktor <i>Name of Factors</i>
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	Sikap percaya terhadap tokoh agama <i>Trust in the religious figures</i>	0.910		Sikap percaya terhadap tokoh <i>Trust in the figures</i>
2	Sikap percaya terhadap aparatur desa/ kelurahan <i>Trust in the village apparatus</i>	0.717	56.896	
3	Partisipasi dalam kegiatan sosial keagamaan <i>Participation in religious social activities</i>	0.841		
4	Partisipasi dalam kegiatan untuk kepentingan umum <i>Participation in joint activities to public interest</i>	0.819		Aksi bersama <i>Collective Action</i>
5	Partisipasi dalam kegiatan sosial kemasyarakatan <i>Participation in society social activities</i>	0.729	7.242	
6	Partisipasi dalam keg. bersama untuk membantu warga <i>Participation in joint activities to assist people</i>	0.649		
7	Tanggapan terhadap kegiatan dari agama lain <i>Response to activities of other religions</i>	0.881		Toleransi <i>Tolerance</i>
8	Tanggapan terhadap kegiatan dari suku bangsa lain <i>Response to activities of other ethnics</i>	0.796	4.513	
9	Sikap percaya menitipkan anak (usia 0-12 tahun) pada tetangga <i>Trust to leave the children (age 0-12 years) to neighbours</i>	0.865		Sikap percaya terhadap tetangga <i>Trust in the neighbours</i>
10	Sikap percaya menitipkan rumah pada tetangga <i>Trust to leave the house to neighbours</i>	0.848	2.155	
Total Varian/Total of Variance			70.81	

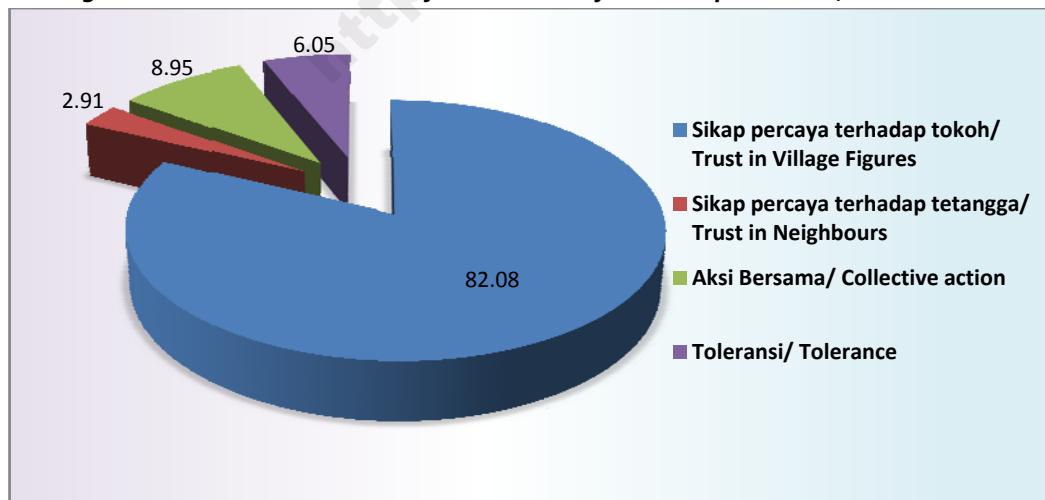
Sumber/Source: Diolah dari Susenas, 2012 / Processed from Susenas, 2012

The social capital index resulted is made up of four factors, namely: trust to village's figures, participation in collective action in village, tolerance and trust to neighbours. Those four factors only include two social capital indicator approaches, namely: (1) trust and adherence to norms and (2) collective action. However, those four factors already had explained 70.81 percent of variance in data.

Keempat faktor pembentuk indeks modal sosial mempunyai kontribusi yang berbeda terhadap besaran indeks yang dihasilkan. Sikap percaya menjadi dimensi utama pembentuk indeks modal sosial yang mempunyai kontribusi sangat dominan, yaitu sekitar 82 persen dari besaran indeks modal sosial yang dihasilkan. Kontribusi tersebut disumbang oleh dua faktor yang sama-sama menggambarkan indikator rasa percaya, yaitu sikap percaya terhadap tokoh di lingkungan desa (82,08%) dan sikap percaya terhadap tetangga (2,91%). Sementara dua faktor lainnya, toleransi dan partisipasi dalam aksi bersama mempunyai kontribusi yang kecil terhadap pembentukan indeks modal sosial, yaitu sekitar 15 persen (Gambar 7.1).

Four factors have different contribution to social capital index. Trust was the main dimension forming social capital index that has dominant contribution, which was 82 percent of the social capital index amount resulted. This contribution is supported by two factors that describe trust indicator, namely trust to the village's figures (82.08%) and trust to the neighbours (2.91%). Whereas, the other two factors, tolerance and participation in collective action, had low contribution to social capital index, which were around 15 percent (Figure 7.1.).

Gambar 7.1. Kontribusi Setiap Faktor Pembentuk Indeks Modal Sosial, 2012
Contribution of Each Factor of Social Capital Index, 2012



Sumber/Source: Diolah dari Susenas, 2012 / Processed from Susenas, 2012

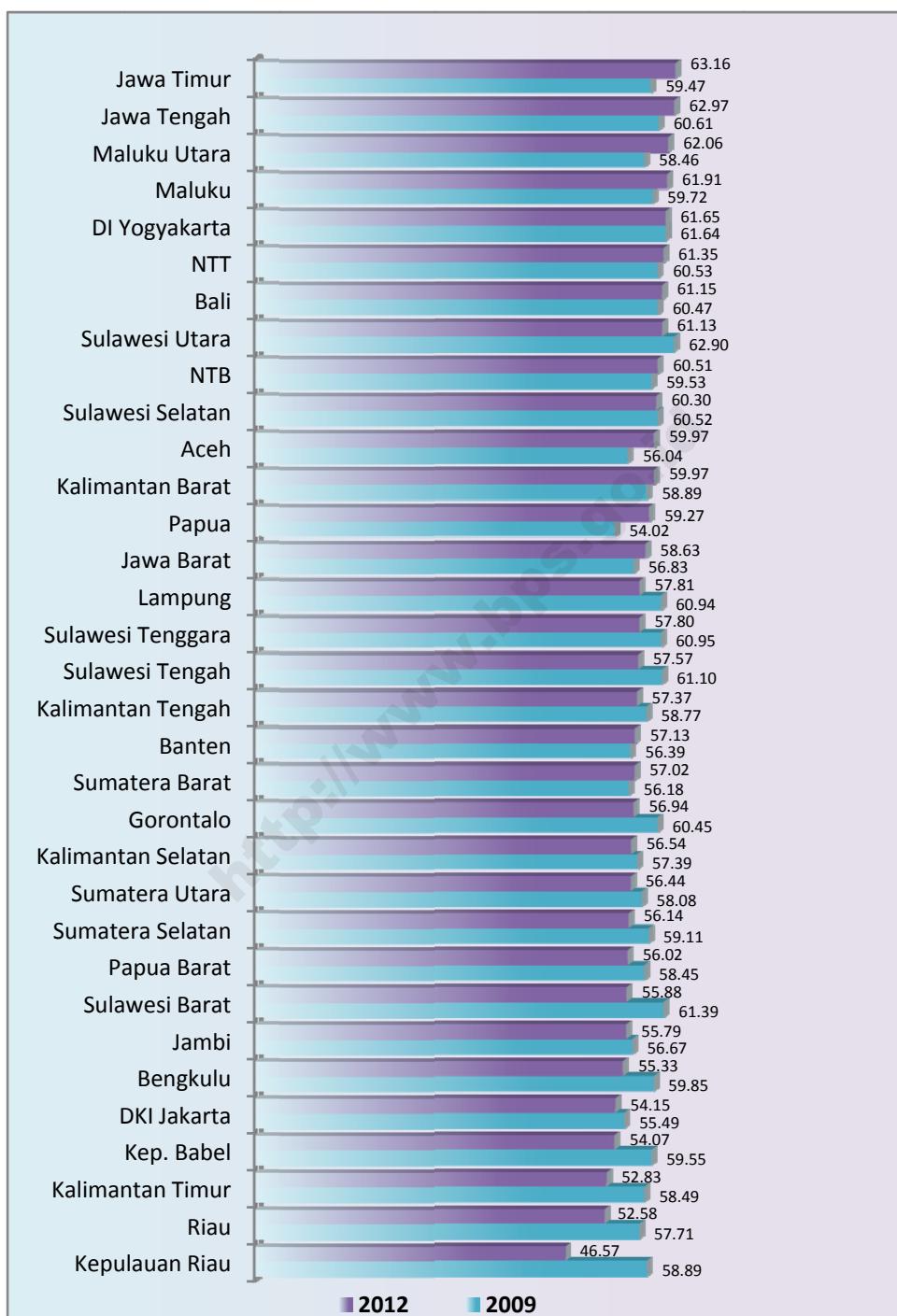
Indeks Modal Sosial tahun 2012 yang dihasilkan adalah sebesar 59,34 dari skala 0-100. Indeks tersebut cukup bervariasi antar provinsi dengan selisih persentase tertinggi dan terendah sebesar 16,59 (lihat Gambar 7.2.). Indeks modal sosial tertinggi terdapat di Provinsi Jawa Timur dengan indeks sebesar 63,16. Kepulauan Riau menjadi satu-satunya provinsi yang mempunyai besaran modal sosial di bawah 50 (46,57).

Secara nasional, Indeks Modal Sosial 2012 mempunyai rata-rata nasional yang lebih tinggi dibandingkan Indeks Modal Sosial 2009. Hasil uji beda rata-rata terhadap indeks modal sosial menurut provinsi pada tahun 2009 dan 2012 juga mendukung adanya perbedaan tersebut (signifikan pada $\alpha=5\%$). Dengan adanya perbaikan metode penghitungan yang digunakan maka kenaikan indeks modal sosial belum dapat disimpulkan sebagai akumulasi modal sosial dalam masyarakat. Meskipun demikian, 12 provinsi yang mempunyai indeks modal sosial di atas rata-rata nasional dan 21 provinsi yang mempunyai indeks modal sosial di bawah rata-rata nasional tidak berbeda.

The resulted 2012 social capital index was 59.34 on scale of 0-100. This index was quite varied among provinces with range of the lowest and the highest percentage was 16.59 (see Figure 7.2.). The highest social capital occurred in Jawa Timur with the social capital index was 63.16. Kepulauan Riau was the only one province that had social capital under 50 (46.57).

The national average of social capital index 2012 was higher than 2009. The result of mean test of differences for social capital index by province in 2009 and 2012 also supports the existence of such differences (significantly at $\alpha=5\%$). With improvement of the calculation method used, the increasing of the social capital index can not be concluded as the accumulation of social capital in society. However, 12 provinces that had social capital index over the national level and 21 provinces that had social capital index under the national level in 2009 were the same in 2012.

Gambar 7.2. Indeks Modal Sosial Menurut Provinsi, 2009 dan 2012
Figure 7.2. Social Capital Index By Province, 2009 and 2012



Sumber/Source: Diolah dari Susenas, 2009 dan 2012 / Processed from Susenas, 2009 and 2012

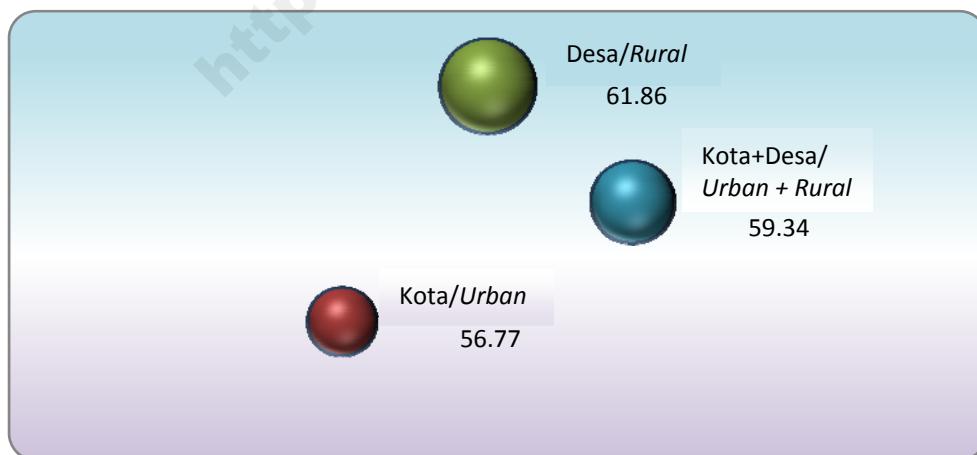
7.2. Indeks Modal Sosial Menurut Klasifikasi Wilayah

Secara nasional, rata-rata indeks modal sosial di Indonesia berbeda berdasarkan klasifikasi wilayah. Rumah tangga yang tinggal di wilayah perdesaan mempunyai indeks modal sosial yang lebih tinggi daripada di perkotaan. Gambar 7.3. menyajikan indeks modal sosial pada kedua wilayah tersebut. Terlihat indeks modal sosial di perdesaan sebesar 61,86, sementara di perkotaan sebesar 56,77. Uji beda rata-rata juga menyimpulkan hal serupa. Dengan tingkat kesalahan 5 persen ($\alpha=5\%$), uji statistik menunjukkan adanya perbedaan secara signifikan antara indeks modal sosial di perkotaan dan perdesaan.

7.2. Social Capital Index By Regions Classification

Nationally, the average of social capital index of Indonesian population are different by region. The social capital index of people in rural area is higher than urban. Figure 7.3. shows the social capital index in two regions. It is seen that social capital index of people in rural area was 61.86, whereas social capital index of people in urban was 56.77. The result of average difference of social capital by province also concludes similar result. With error level 5 percent ($\alpha=5\%$), statistics test shows that there is difference between the social capital index in urban and rural significantly.

Gambar 7.3. Indeks Modal Sosial Menurut Klasifikasi Wilayah, 2012
Figure 7.3. Social Capital Index By Region Classification, 2012



Sumber/Source: Diolah dari Susenas, 2012 / Processed from Susenas, 2012

Masyarakat desa yang umumnya masih menjunjung tinggi norma dan nilai-nilai dari budaya setempat diduga berperan penting terhadap tingginya indeks modal sosial di wilayah perdesaan. Masyarakat desa mempunyai tingkat kepercayaan yang lebih tinggi kepada aparatur desa dan tetangga di sekitar tempat tinggalnya. Data menunjukkan persentase rumah tangga di perdesaan yang percaya terhadap aparatur desa/kelurahan, tokoh masyarakat maupun tokoh agama lebih besar dibanding persentase rumah tangga di perkotaan. Hal yang sama juga terlihat dari sikap percaya terhadap tetangga. Persentase penduduk yang merasa percaya untuk menitipkan anak atau menitipkan rumah ke tetangga di perdesaan juga lebih tinggi dibanding penduduk yang tinggal di perkotaan (lihat Lampiran 1- 5).

Keberadaan modal sosial yang tinggi pada masyarakat di perdesaan juga terlihat dari tingginya partisipasi masyarakat dalam kegiatan gotong royong yang diselenggarakan di lingkungan desa. Lebih dari 52 persen rumah tangga di perdesaan sering berpartisipasi dalam kegiatan untuk kepentingan umum (lihat Tabel 6.2), sementara untuk kegiatan sosial keagamaan, persentasenya jauh lebih besar (lebih dari 62%).

People in rural area that generally still uphold norms and values of local culture are thought to be important to the high social capital index in the area. People in rural have higher trust to figures and neighbours in village. Data shows the percentage of households in rural who trust the village apparatus, community leaders, and religious figures is higher than that in urban. The similar result is seen for trust to the neighbours. The percentage of households who trust neighbours to watch the house is also higher than that in urban (see appendix 1 - 5).

The existence of social capital index in rural is also seen from the high of community participation in mutual cooperation activities (gotong royong) in village. More than 52 percent of household in rural often participated in activities of public interest (see Table 6.2), whereas the percentage of religious social activities was more than 62 percent.

7.3. Modal Sosial dan Pembangunan

Modal sosial merupakan sumber daya yang melekat pada hubungan sosial. Dengan demikian, peran modal sosial terhadap pembangunan tidak dapat dipisahkan dengan modal manusia. Keduanya secara bersama-sama mempengaruhi kesejahteraan manusia baik secara langsung maupun melalui modal pembangunan yang lain. Oleh sebab itu, peran modal sosial terhadap kemajuan pembangunan tidak dapat diukur dengan mudah.

Kolaborasi antara modal sosial dan modal manusia dapat memfasilitasi bekerjanya semua modal pembangunan secara lebih efektif dan efisien. Tingginya modal sosial dan modal manusia pada suatu wilayah diharapkan dapat mempercepat tercapainya kesejahteraan manusia sebagai tujuan akhir dari pembangunan yang dilakukan. Namun modal manusia yang berkualitas pada provinsi tertentu ternyata tidak menjamin adanya modal sosial yang tinggi pada wilayah tersebut. Hal ini ditunjukkan oleh korelasi antara Indeks Pembangunan Manusia (IPM) dan Indeks Modal Sosial (IMS) di 33 provinsi. IPM yang dianggap mampu menggambarkan kualitas modal manusia mempunyai korelasi negatif ($r^2=-0,400$) dengan IMS, korelasi tersebut signifikan dengan tingkat kesalahan 5 persen.

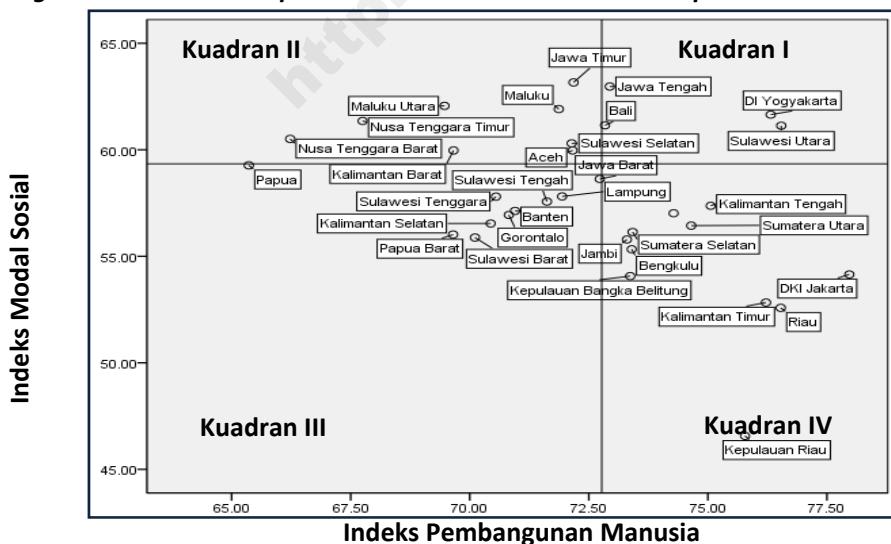
7.3. Social Capital and Development

Social capital is a resource embedded in relations. Thus, the impact of social capital to development can not be separated with human capital. Both of them jointly affect human wellbeing directly or through other development capitals. Therefore, the impact of social capital to development can not be easily measured.

The collaboration between social capital and human capital can facilitate operation of all development capital more effectively and efficiently. High social capital and human capital in a region accelerates the achievement of human wellbeing as the ultimate goal of the development. But, the qualified human capital in a region is not enough to ensure a high social capital. This is showed by correlation between Human Capital Index (HDI) and social capital index in 33 provinces. HDI which is expected to be able to explain quality of human capital had negative correlation ($r^2=-0.400$) with social capital index, this correlation was significant with 5 percent error level.

Pada Gambar 7.4. terlihat sebaran provinsi menurut IMS dan IPM, yang dibagi dalam 4 (empat) kuadran berdasarkan perbandingan terhadap rata-rata nasional. Gambar tersebut memperlihatkan modal sosial yang tinggi pada suatu wilayah tidak selalu diiringi dengan tingginya IPM. Dimana, jumlah provinsi yang terletak pada Kuadran II dan IV (18 provinsi) lebih banyak daripada jumlah provinsi pada Kuadran I dan III. Terdapat 4 (empat) wilayah yang mempunyai modal sosial dan modal manusia tinggi (kuadran I), yaitu: Jawa Tengah, DI Yogyakarta, Sulawesi Utara, dan Bali. Tingginya modal sosial dan modal manusia atau kapabilitas sosial di wilayah tersebut diharapkan dapat menjadi penggerak sehingga pembangunan dapat berjalan secara efektif dan efisien.

Gambar 7.4. Indeks Modal Sosial 2012 dan Indeks Pembangunan Manusia 2011
Figure 7.4. Social Capital Index 2012 and Human Development Index 2011



Sumber : Diolah dari Susenas, 2012 dan Badan Pusat Statistik, 2013
Source : Processed from Susenas, 2012 and Statistics Indonesia, 2013

Figure 7.4. describes the provincial distribution of social capital index and HDI, which is divided into four quadrants based on comparison to the national rate. This figure shows that the high social capital in region is not always followed by high HDI. The number of provinces in quadrant II and IV (18 provinces) is more than the number of provinces in quadrant I and III. There are 4 provinces that have high social capital and human capital (quadrant I), namely: Jawa Tengah, DI Yogyakarta, Sulawesi Utara, and Bali. The high social capital and human capital in those provinces is expected to be the driving force of development so that it can be conducted effectively and efficiently.

Keberhasilan pembangunan di suatu wilayah dapat dilihat dari tiga indikator ekonomi yang utama, yaitu: (1) akselerasi pertumbuhan ekonomi; (2) penurunan kemiskinan; dan (3) penurunan tingkat pengangguran (Mulyani, 2009). Dimana secara umum, Indonesia menunjukkan hasil yang cukup membanggakan. Pembangunan ekonomi Indonesia telah tumbuh rata-rata sebesar 6,27 persen (tahun 2009-2012), jumlah penduduk miskin Indonesia telah turun sebesar 0,73 persen (periode tahun 2009-2012) dan selama tiga tahun terakhir (tahun 2010-2012), Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) di Indonesia turun 1,55 persen.

Tingkat pencapaian keberhasilan pembangunan tersebut sangat bervariasi antar provinsi. Jika besaran modal alam dan modal fisik pada masing-masing wilayah dianggap tetap, maka tingginya modal sosial dan modal manusia di Bali, DI Yogyakarta, Sulawesi Utara, dan Jawa Tengah dapat berfungsi sebagai pelumas terjadinya percepatan pembangunan di wilayah tersebut. Namun laju pertumbuhan ekonomi selama tahun 2009-2012 di wilayah tersebut tidak menunjukkan hasil yang istimewa. Hanya Provinsi Sulawesi Utara yang secara konsisten mengalami peningkatan pertumbuhan ekonomi di atas rata-rata nasional sepanjang tahun 2009 sampai 2012 (lihat Tabel 7.2.).

The success of economic development can be seen from three main indicators, namely: (1) the acceleration of economic growth; (2) reduction of poverty; and (3) decrease in the level of unemployment, (Mulyani, 2009). In general, Indonesia has shown quite encouraging results. The economic development in Indonesia grew 6.27 percent (from 2009 to 2012), the number of poor people in Indonesia decreased by 0.73 percent (from 2009 to 2012), and the unemployment rate also fell by 1.55 percent (from 2010 to 2012).

The achievement of development is various by provinces. If the amount of natural capital and physical capital in each region is held constant, then high social capital and human capital in Bali, DI Yogyakarta, Sulawesi Utara, and Jawa Tengah can serve as a lubricant for the acceleration of development in the region. However, economic growth from 2009 to 2012 in those regions was not qualified. Only Sulawesi Utara that consistently experienced an increase of growth above the national rate from 2009 to 2012 (see Table 7.2.).

Tabel 7.2. Laju Pertumbuhan Produk Domestik Regional Bruto Menurut Provinsi, 2009-2012
Table 7.2. Growth of Gross Domestic Regional Products By Province, 2009-2012

Provinsi/Province	2009/2010	2010/2011	2011/2012
(1)	(2)	(3)	(4)
Aceh	2.74	5.09	5.20
Sumatera Utara	6.42	6.63	6.22
Sumatera Barat	5.94	6.25	6.35
Riau	4.21	5.04	3.55
Jambi	7.35	8.54	7.44
Sumatera Selatan	5.63	6.50	6.01
Bengkulu	6.10	6.45	6.61
Lampung	5.88	6.43	6.48
Kepulauan Bangka Belitung	5.99	6.46	5.72
Kepulauan Riau	7.19	6.66	8.21
DKI Jakarta	6.50	6.73	6.53
Jawa Barat	6.20	6.48	6.21
Jawa Tengah	5.84	6.03	6.34
DI Yogyakarta	4.88	5.17	5.32
Jawa Timur	6.68	7.22	7.27
Banten	6.11	6.39	6.15
Bali	5.83	6.49	6.65
Nusa Tenggara Barat	6.35	-3.15	-1.12
Nusa Tenggara Timur	5.25	5.63	5.42
Kalimantan Barat	5.47	5.97	5.83
Kalimantan Tengah	6.50	6.77	6.69
Kalimantan Selatan	5.59	6.12	5.73
Kalimantan Timur	5.10	4.08	3.98
Sulawesi Utara	7.16	7.39	7.86
Sulawesi Tengah	8.74	9.15	9.27
Sulawesi Selatan	8.19	7.61	8.37
Sulawesi Tenggara	8.22	8.96	10.41
Gorontalo	7.63	7.68	7.71
Sulawesi Barat	6.03	11.89	10.32
Maluku	6.47	6.06	7.81
Maluku Utara	7.95	6.40	6.67
Papua Barat	28.47	27.08	15.84
Papua	-3.19	-5.32	1.08
Indonesia	6.14	6.35	6.30

Sumber/Source: Badan Pusat Statistik / Statistics Indonesia (www.bps.go.id)

Hasil yang sama ditunjukkan oleh dinamika jumlah penduduk miskin selama tahun 2011-2012 pada empat provinsi tersebut. Persentase penduduk miskin di Jawa Tengah dan DI Yogyakarta selalu berada di atas rata-rata nasional (lihat Tabel 7.3.). Sementara, Provinsi DI Yogyakarta, Bali, dan Sulawesi Utara mempunyai persentase penurunan penduduk miskin di bawah angka nasional untuk periode tahun 2011-2012. Hanya Jawa Tengah yang mengalami penurunan kemiskinan di atas angka nasional pada periode tersebut. Demikian pula jika dilihat Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) pada wilayah-wilayah tersebut. Seluruh provinsi di Indonesia mengalami penurunan TPT selama periode 2010-2012 (lihat Tabel 7.4.). Namun Provinsi Jawa Tengah dan Bali masih mengalami penurunan TPT dibawah angka nasional.

Di sisi lain, wilayah-wilayah yang mempunyai modal sosial dan modal manusia yang rendah (terletak pada Kuadran III), seperti: Sulawesi Tengah, Sulawesi Tenggara, dan Papua Barat ternyata telah mengalami pertumbuhan ekonomi di atas rata-rata nasional. Dimana, Papua Barat dan Sulawesi Tenggara tercatat mampu menurunkan jumlah penduduk miskin melampaui angka nasional untuk periode 2011-2012. Hasil tersebut menegaskan peran modal sosial dalam pembangunan belum dapat dijelaskan oleh keterkaitan indeks modal sosial dengan indikator ekonomi.

The similar result is showed by the number of poor people from 2011 to 2012 in those four provinces. The percentage of poor people in Jawa Tengah and DI Yogyakarta were always above the national rate (see Table 7.3.). Whereas, DI Yogyakarta, Bali, and Sulawesi Utara experienced a fall in poverty below the national decrease in 2011-2012. Only Jawa Tengah that experienced a decrease in poverty above the national fall in those periode. The open unemployment shows the similar pattern in those provinces. All provinces in Indonesia experienced a decrease in the open unemployment in 2011-2012 (see Table 7.4.). Nevertheless, Jawa Tengah and Bali still experienced a fall in the open unemployment below the national decrease.

On the other hand, some regions that had low social capital and human capital (Quadran III), such as: Sulawesi Tengah, Sulawesi Tenggara, and Papua Barat, had experienced an increase in growth above the national rise. Papua Barat and Sulawesi Tenggara were able to decrease the number of poor people more than national decrease from 2011 to 2012. This result shows that the role of social capital in development can not be explained by ascociation between social capital and economic indicators.

Tabel 7.3. Persentase Penduduk Miskin Menurut Provinsi, 2009-2012
Table 7.3. Percentage of Poor People By Province, 2009-2012

Provinsi/Province	2009	2010	2011	2012
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Aceh	21.80	20.98	19.57	19.46
Sumatera Utara	11.51	11.31	11.33	10.67
Sumatera Barat	9.54	9.50	9.04	8.19
Riau	9.48	8.65	8.47	8.22
Jambi	8.77	8.34	8.65	8.42
Sumatera Selatan	16.28	15.47	14.24	13.78
Bengkulu	18.59	18.30	17.50	17.70
Lampung	20.22	18.94	16.93	16.18
Kepulauan Bangka Belitung	7.46	6.51	5.75	5.53
Kepulauan Riau	8.27	8.05	7.40	7.11
DKI Jakarta	3.62	3.48	3.75	3.69
Jawa Barat	11.96	11.27	10.65	10.09
Jawa Tengah	17.72	16.56	15.76	15.34
DI Yogyakarta	17.23	16.83	16.08	16.05
Jawa Timur	16.68	15.26	14.23	13.40
Banten	7.64	7.16	6.32	5.85
Bali	5.13	4.88	4.20	4.18
Nusa Tenggara Barat	22.78	21.55	19.73	18.63
Nusa Tenggara Timur	23.31	23.03	21.23	20.88
Kalimantan Barat	9.30	9.02	8.60	8.17
Kalimantan Tengah	7.02	6.77	6.56	6.51
Kalimantan Selatan	5.12	5.21	5.29	5.06
Kalimantan Timur	7.73	7.66	6.77	6.68
Sulawesi Utara	9.79	9.10	8.51	8.18
Sulawesi Tengah	18.98	18.07	15.83	15.40
Sulawesi Selatan	12.31	11.60	10.29	10.11
Sulawesi Tenggara	18.93	17.05	14.56	13.71
Gorontalo	25.01	23.19	18.75	17.33
Sulawesi Barat	15.29	13.58	13.89	13.24
Maluku	28.23	27.74	23.00	21.78
Maluku Utara	10.36	9.42	9.18	8.47
Papua Barat	35.71	34.88	31.92	28.20
Papua	37.53	36.80	31.98	31.11
Indonesia	14.15	13.33	12.49	11.96

Sumber/Source: Badan Pusat Statistik, 2011 dan 2013 / Statistics Indonesia, 2011 and 2013

Tabel 7.4. Tingkat Pengangguran Terbuka Menurut Provinsi, 2010-2012
Table 7.4. Unemployment Rate By Province, 2010-2012

Provinsi/Province	2010	2011	2012
(1)	(2)	(3)	(4)
Aceh	8.71	8.27	7.88
Sumatera Utara	8.45	7.18	6.31
Sumatera Barat	7.97	7.14	6.25
Riau	8.56	7.17	5.17
Jambi	5.54	3.85	3.65
Sumatera Selatan	7.61	6.07	5.59
Bengkulu	5.08	3.41	2.14
Lampung	6.62	5.24	5.12
Kepulauan Bangka Belitung	6.14	3.25	2.78
Kepulauan Riau	8.11	7.04	5.87
DKI Jakarta	12.15	10.83	10.72
Jawa Barat	10.96	9.84	9.78
Jawa Tengah	7.33	6.07	5.88
DI Yogyakarta	6.00	5.47	4.09
Jawa Timur	5.08	4.18	4.13
Banten	14.97	13.5	10.74
Bali	3.13	2.86	2.11
Nusa Tenggara Barat	6.25	5.35	5.21
Nusa Tenggara Timur	3.97	2.67	2.39
Kalimantan Barat	5.44	4.99	3.36
Kalimantan Tengah	4.62	3.66	2.71
Kalimantan Selatan	6.36	5.62	4.32
Kalimantan Timur	10.83	10.21	9.29
Sulawesi Utara	10.56	9.19	8.32
Sulawesi Tengah	5.43	4.27	3.73
Sulawesi Selatan	8.9	6.69	6.46
Sulawesi Tenggara	4.74	4.34	3.1
Gorontalo	5.89	4.61	4.81
Sulawesi Barat	4.51	2.7	2.07
Maluku	10.57	7.72	7.11
Maluku Utara	6.76	5.62	5.31
Papua Barat	7.56	8.28	6.57
Papua	4.08	3.72	2.90
Indonesia	7.87	6.8	6.32

Sumber/Source: Badan Pusat Statistik 2011 dan 2013 / Statistics Indonesia, 2011 and 2013

7.4. Modal Sosial dan Permasalahan Sosial

Peran modal sosial dalam pembangunan tidak dapat hanya disimpulkan dari keterkaitan indeks modal sosial dengan indikator ekonomi. Indikator ekonomi mempunyai keterbatasan dalam merefleksikan kesejahteraan masyarakat yang sesungguhnya. Masih banyak permasalahan sosial yang timbul akibat tidak meratanya hasil-hasil pembangunan yang dapat dinikmati oleh rakyat, misalnya meningkatnya konflik massal di sejumlah wilayah di Indonesia.

Modal sosial yang melekat dalam hubungan sosial antara anggota masyarakat sebenarnya merupakan perekat yang dapat meningkatkan kohesifitas dan kerukunan sosial. Keeratan dalam menjalin hubungan sosial antar anggota masyarakat desa diharapkan mampu menghindari terjadinya gesekan/konflik. Konflik massal yang terjadi dalam masyarakat desa dapat dibedakan menjadi dua jenis, yaitu: konflik horisontal dan vertikal. Konflik horisontal merujuk pada konflik yang berkembang di antara anggota masyarakat, termasuk konflik yang bernuansa suku, ras, antargolongan dan agama. Sedangkan konflik vertikal adalah konflik yang terjadi antara masyarakat dengan aparat negara/pemerintah. Konflik ini biasanya terjadi karena ketidakpuasan warga dengan kinerja aparat pemerintah.

7.4. Social Capital and Social Problems

The role of social capital in development can not be seen only from relationships between social capital index and economic indicators. The economic indicators have limitation of reflecting the real human wellbeing. There are still more social problems that occur as impact of the unequal distribution of development outcomes that can be enjoyed by people, for example increasing of massive conflicts in some regions in Indonesia.

Social capital that embedded in social relations among community members is actually the glue that can increase social cohesiveness and social harmony. Social cohesion in the social relationships among community members is expected to avoid any friction/conflicts. The massive conflicts in village can be divided into two types, which are: horizontal and vertical conflicts. Horizontal conflict refers to the conflict developed between community members, including the nuances of tribal conflicts, racial, and religious intergroup. While, the vertical conflict is the conflict between the community and the government. This conflict generally occurs because of dissatisfaction to the government.

Tabel 7.5. menyajikan persentase desa yang mengalami konflik massal pada tahun 2008 dan 2011 menurut jenis konflik yang terjadi. Secara umum, persentase desa yang mengalami konflik massal di Indonesia mengalami peningkatan sebesar 0,23 persen. Bila dilihat menurut jenisnya, maka persentase desa yang mengalami konflik horisontal lebih tinggi daripada konflik vertikal, yaitu sebesar 3,14 banding 0,23. Di samping itu, secara nasional konflik horisontal mengalami peningkatan persentase yang lebih tinggi dibanding konflik vertikal (0,19% ke 0,05%).

Persentase desa yang mengalami konflik massal sangat bervariasi antar provinsi. Sebanyak 24 provinsi mengalami peningkatan persentase dengan persentase tertinggi terdapat di DKI Jakarta (22,85%) dan persentase terendah terjadi di Kalimantan Selatan (0,65%). Keragaman tersebut diduga disebabkan karena besaran modal sosial dalam masyarakat yang berbeda-beda antar wilayah. Tiga dari empat wilayah yang terletak pada Kuadran I, yaitu Jawa Tengah, DI Yogyakarta, dan Bali mempunyai persentase desa konflik di bawah angka nasional, hanya Sulawesi Utara yang mempunyai persentase di atas angka nasional.

Table 7.5. presents the percentage of village having massive conflicts in 2008 and 2011 by type of conflicts. Generally, the percentage of village having massive conflicts increased about 0.23 percent. It is seen that the percentage of village having horizontal conflicts (3.14) was higher than the percentage of village having vertical conflicts (0.23). Furthermore, the increase of horizontal conflicts was higher than vertical conflicts (0.19% to 0.05%).

The percentage of villages having massive conflicts is various between provinces. There were 24 provinces having increase in the percentage of massive conflicts, the highest percentage was seen in DKI Jakarta (22.85%) while the lowest percentage was seen in Kalimantan Selatan (0.65%). This variation is assumed because the amount of social capital in society is different between regions. Three out of four provinces located in quadran I, which are Jawa Tengah, DI Yogyakarta and Bali, had the percentage of villages having conflicts under the national rate. Only Sulawesi Utara that had percentage above the national rate.

Tabel 7.5. **Percentase Desa yang Mengalami Konflik Massal Menurut Provinsi dan Jenis Konflik, 2008 dan 2011**
Table 7.5. **Percentage of Villages That Suffer Massive Conflicts By Province and Types of Conflicts, 2008 and 2011**

Provinsi Province	Konflik Horisontal Horizontal Conflict		Konflik Vertikal Vertical Conflict		Konflik Massal Massal Conflict	
	2008	2011	2008	2011	2008	2011
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Aceh	1.00	1.00	0.09	0.08	1.00	1.06
Sumatera Utara	2.38	1.98	0.07	0.17	2.43	2.05
Sumatera Barat	3.25	4.74	0.11	0.10	3.25	4.84
Riau/Riau	3.37	2.48	0.12	0.48	3.49	2.84
Jambi	3.99	3.35	0.15	0.22	4.07	3.43
Sumatera Selatan	0.78	1.44	0.10	0.28	0.88	1.60
Bengkulu	1.18	1.39	0.07	0.27	1.26	1.59
Lampung	1.41	1.42	0.17	0.24	1.58	1.62
Kepulauan Bangka Belitung	6.40	7.20	0.00	0.55	6.40	7.76
Kepulauan Riau	1.84	1.42	0.00	0.57	1.84	1.98
DKI Jakarta	3.37	22.10	0.00	0.75	3.00	22.85
Jawa Barat	4.51	3.25	0.15	0.14	4.60	3.30
Jawa Tengah	3.03	2.24	0.03	0.05	3.06	2.26
DI Yogyakarta	2.05	2.97	0.23	0.00	2.05	2.97
Jawa Timur	2.01	1.86	0.09	0.07	2.07	1.91
Banten	4.59	5.15	0.27	0.13	4.59	5.21
Bali	1.12	1.68	0.00	0.00	1.12	1.68
Nusa Tenggara Barat	6.02	6.00	0.11	0.37	6.13	6.27
Nusa Tenggara Timur	5.74	6.04	0.61	0.30	5.89	6.17
Kalimantan Barat	1.01	1.27	0.06	0.15	1.06	1.37
Kalimantan Tengah	0.69	1.64	0.21	0.00	0.83	1.64
Kalimantan Selatan	1.52	0.60	0.15	0.05	1.62	0.65
Kalimantan Timur	1.62	2.73	0.00	0.27	1.62	2.94
Sulawesi Utara	3.21	5.91	0.00	0.24	3.15	5.97
Sulawesi Tengah	2.97	3.42	0.47	0.33	3.32	3.58
Sulawesi Selatan	2.48	3.72	0.14	0.17	2.61	3.79
Sulawesi Tenggara	2.56	2.40	0.20	0.14	2.71	2.55
Gorontalo	2.57	2.33	0.34	0.68	2.74	2.87
Sulawesi Barat	1.49	1.25	0.00	0.31	1.49	1.41
Maluku	11.92	13.67	1.99	1.37	12.36	14.26
Maluku Utara	9.27	9.82	0.97	0.93	9.46	10.19
Papua Barat	1.66	5.28	0.33	0.49	1.91	5.49
Papua	6.83	7.57	0.42	0.71	6.95	7.80
Indonesia	2.95	3.14	0.18	0.23	3.03	3.26

Sumber/Source: Diolah dari Podes, 2008 dan 2011 / Processed from Podes, 2008 and 2011

Korelasi antara indeks modal sosial dan persentase desa yang mengalami konflik massal di 33 provinsi menunjukkan adanya hubungan positif yang tidak signifikan. Namun jika dibedakan berdasarkan jenis konflik massal maka tanda positif dihasilkan untuk korelasi antara indeks modal sosial dan persentase desa yang mengalami konflik horisontal. Sementara korelasi antara indeks modal sosial dan desa yang mengalami konflik vertikal menghasilkan hubungan yang negatif ($r^2 = -0,12$). Walaupun korelasi tersebut tidak signifikan, namun tanda negatif pada r^2 memberikan indikasi awal bahwa modal sosial dapat memiliki andil dalam menghindari gesekan antara masyarakat desa dan pemerintah.

7.5. Kesimpulan

Modal sosial merupakan sumber daya yang melekat pada hubungan sosial. Modal sosial tidak akan langgeng tanpa kehadiran kelompok atau organisasi yang menopangnya. Sebaliknya keberadaan kelompok atau organisasi dalam masyarakat tidak dapat terbangun dengan kuat tanpa modal sosial. Berbagai strategi pembangunan yang dilakukan membutuhkan faktor kepercayaan dan nilai-nilai yang menjadi dasar dalam menentukan perkembangan dan keberlanjutan pembangunan.

Correlation between social capital index and percentage of villages having massive conflicts in 33 provinces showed positive ascociation which was not significant. If it is differentiate by type of conflicts, the correlation between social capital index and percentage of village having horizontal conflicts was positive and significant. Whereas, the correlation between social capital index and percentage of villages having vertical conflicts was negative and not significant ($r^2 = -0.12$). However the correlation was not significant, the negative correlation gives early indication that social capital has a role to avoid the friction between village society and government.

7.5. Conclusion

Social capital is a resource embedded in social relations. Social capital can not exist without the groups or organizations that sustain them. Conversely, the existence of groups or organizations in the community can not be established firmly without social capital. Various strategies of development need factors of trust and values that could be the basis to determine progress and sustainability of development.

Hasbullah (2006) menyatakan bahwa memasukkan modal sosial sebagai salah satu komponen pembangunan tidaklah mudah. Peran modal sosial dalam pembangunan belum dapat secara sederhana dijelaskan oleh keterkaitan indeks modal sosial dengan indikator ekonomi, seperti laju pertumbuhan ekonomi, tingkat kemiskinan dan tingkat pengangguran. Namun, modal sosial terindikasi dapat memiliki andil dalam menghindari gesekan antara masyarakat desa dan pemerintah. Hasil tersebut belum signifikan secara statistik namun telah memberikan harapan yang berarti mengenai peran modal sosial dalam pembangunan.

Lebih jauh, besaran modal sosial dalam masyarakat yang digambarkan hanya dengan satu indeks modal sosial mempunyai banyak konsekuensi. Salah satunya adalah keterwakilan pendekatan indikator modal sosial dalam indeks tersebut. Apalagi dalam penghitungan yang telah dilakukan, indeks modal sosial belum mencapai hasil yang maksimal karena belum mencakup tiga kelompok pendekatan indikator modal sosial secara lengkap, yaitu: (1) sikap percaya dan kepatuhan terhadap norma yang berlaku; (2) keanggotaan dalam perkumpulan dan jejaring lokal; dan (3) kegiatan aksi bersama.

Hasbullah (2006) also states that including social capital as a component of development is not easy. The role of social capital in development can not be explained simply by ascociation between social capital index and economic indicators, such as economic growth, poverty rate and unemployment rate. However, social capital has role to avoid the friction between village society and government. The result is not significant statistically but it gives a valuable expectation about impact of social capital in development.

Furthermore, the amount of social capital in society that is explained only by a social capital index has many consequences. One of them is the responsibility of social capital indicator approach. Moreover, the social capital index has not reached the maximum results in the calculations because it has not include the complete three groups of social capital indicator approaches, namely: (1) trust and adherence to norms; (2) membership in local associations and networks; and (3) collective action.

Variabel yang digunakan sebagai indikator keanggotaan penduduk dalam kelompok dan jejaring lokal tidak berhasil menjadi salah satu faktor pembentuk indeks. Diduga kurangnya jumlah dan jenis pertanyaan terkait kelompok dan jejaring dalam masyarakat desa menjadi salah satu penyebabnya. Seperti diketahui, informasi yang dikumpulkan dalam Susenas hanya mencakup banyaknya kelompok atau organisasi yang diikuti dan kebiasaan menyampaikan pendapat atau saran dalam pertemuan warga. Sementara, informasi lainnya seperti: ukuran kelompok atau organisasi, keragaman internal anggota dan pengurusnya serta intensitas kegiatan kelompok atau organisasi, belum tersedia. Oleh karena itu, pengumpulan informasi terkait modal sosial dalam masyarakat yang lebih lengkap mutlak diperlukan.

Variables which is used as the membership indicator in group and local network can not become one of component of social capital index. The lack of amount and type of questions related to group and network in village community is suspected as one of the the cause. The information collected in Susenas only includes the number of groups or organizations followed by respondent and the delivery of an opinion or suggestion. Whereas, other informations such as the size of groups or organizations, internal diversity of members, and intensity of activities, are not available. As a result, a more complete of information collection related to social capital in society is absolutely needed.

**LAMPIRAN
*APPENDICES***

http://www.bps.go.id

Lampiran : 1.
Appendix

Percentase Rumah Tangga Menurut Provinsi dan Tingkat Kepercayaan
Terhadap Aparatur Desa/Kelurahan dalam Menjalankan Tugas, 2012
*Percentage of Households By Province and Level of Trust in Village's
Apparatus in Running Tasks, 2012*

Kota+Desa / Urban+Rural

Provinsi <i>Province</i>	Tingkat Kepercayaan / <i>Level of Trust</i>				Jumlah <i>Total</i>
	Sangat Tidak <i>Strongly Disbelieve</i>	Tidak <i>Disbelieve</i>	Percaya <i>Believe</i>	Sangat <i>Strongly Believe</i>	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Aceh	0.31	8.81	79.68	11.19	100.00
Sumatera Utara	0.54	12.08	81.24	6.14	100.00
Sumatera Barat	0.42	14.00	82.50	3.08	100.00
Riau	0.66	9.44	83.35	6.55	100.00
Jambi	0.59	8.24	86.45	4.71	100.00
Sumatera Selatan	0.20	10.23	83.20	6.37	100.00
Bengkulu	0.44	12.63	80.79	6.14	100.00
Lampung	0.20	9.61	85.34	4.84	100.00
Kepulauan Bangka Belitung	0.48	14.25	79.51	5.77	100.00
Kepulauan Riau	0.22	16.09	79.84	3.85	100.00
DKI Jakarta	0.40	15.65	80.90	3.04	100.00
Jawa Barat	0.20	9.43	86.21	4.16	100.00
Jawa Tengah	0.62	8.86	82.74	7.79	100.00
DI Yogyakarta	0.28	8.35	85.81	5.56	100.00
Jawa Timur	0.51	9.53	81.37	8.59	100.00
Banten	0.83	18.15	76.21	4.81	100.00
Bali	0.27	5.14	84.77	9.83	100.00
Nusa Tenggara Barat	0.74	12.91	78.89	7.47	100.00
Nusa Tenggara Timur	0.65	9.30	77.34	12.71	100.00
Kalimantan Barat	0.92	9.21	82.29	7.58	100.00
Kalimantan Tengah	0.16	8.57	84.34	6.93	100.00
Kalimantan Selatan	0.71	13.08	80.69	5.52	100.00
Kalimantan Timur	0.88	10.81	79.29	9.02	100.00
Sulawesi Utara	0.42	7.72	78.92	12.94	100.00
Sulawesi Tengah	0.80	11.14	80.99	7.07	100.00
Sulawesi Selatan	0.55	9.55	78.35	11.56	100.00
Sulawesi Tenggara	0.80	10.77	77.05	11.38	100.00
Gorontalo	0.54	7.28	84.45	7.74	100.00
Sulawesi Barat	0.50	12.96	78.07	8.47	100.00
Maluku	1.41	15.09	73.03	10.48	100.00
Maluku Utara	1.07	13.45	68.93	16.55	100.00
Papua Barat	1.33	19.24	68.22	11.21	100.00
Papua	1.43	22.90	66.72	8.95	100.00
Indonesia	0.49	10.62	82.03	6.86	100.00

Sumber/Source: *Susenas, 2012*

**Percentase Rumah Tangga Menurut Provinsi dan Tingkat Kepercayaan
Terhadap Aparatur Desa/Kelurahan dalam Menjalankan Tugas, 2012**
**Percentage of Households By Province and Level of Trust in Village's
Apparatus in Running Tasks, 2012**

Lampiran : 1.1.
Appendix

Provinsi <i>Province</i>	Tingkat Kepercayaan / <i>Level of Trust</i>				Jumlah <i>Total</i>
	Sangat Tidak <i>Strongly Disbelieve</i>	Tidak <i>Disbelieve</i>	Percaya <i>Believe</i>	Sangat <i>Strongly Believe</i>	
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Aceh	0.17	10.82	76.40	12.60	100.00
Sumatera Utara	0.22	12.85	82.14	4.79	100.00
Sumatera Barat	0.37	16.00	80.15	3.48	100.00
Riau	0.91	10.55	83.21	5.32	100.00
Jambi	0.41	7.06	89.94	2.59	100.00
Sumatera Selatan	0.28	12.59	81.29	5.84	100.00
Bengkulu	0.19	17.89	77.59	4.34	100.00
Lampung	0.40	18.96	74.49	6.15	100.00
Kepulauan Bangka Belitung	0.58	15.88	80.11	3.43	100.00
Kepulauan Riau	0.27	16.09	80.30	3.34	100.00
DKI Jakarta	0.40	15.65	80.90	3.04	100.00
Jawa Barat	0.19	9.95	86.47	3.39	100.00
Jawa Tengah	0.56	8.60	84.62	6.22	100.00
DI Yogyakarta	0.19	9.43	84.50	5.89	100.00
Jawa Timur	0.51	9.33	83.13	7.03	100.00
Banten	0.47	18.75	77.21	3.56	100.00
Bali	0.00	5.11	84.84	10.05	100.00
Nusa Tenggara Barat	0.89	11.89	82.13	5.09	100.00
Nusa Tenggara Timur	0.17	11.91	81.41	6.51	100.00
Kalimantan Barat	1.33	9.99	80.92	7.76	100.00
Kalimantan Tengah	0.10	7.31	90.65	1.94	100.00
Kalimantan Selatan	0.40	11.88	81.92	5.81	100.00
Kalimantan Timur	0.71	11.10	81.66	6.53	100.00
Sulawesi Utara	0.46	6.66	80.03	12.85	100.00
Sulawesi Tengah	0.54	13.10	80.55	5.81	100.00
Sulawesi Selatan	0.62	12.58	77.20	9.60	100.00
Sulawesi Tenggara	1.13	11.15	80.97	6.75	100.00
Gorontalo	0.63	4.80	88.07	6.50	100.00
Sulawesi Barat	1.18	22.59	70.64	5.58	100.00
Maluku	1.67	17.38	73.80	7.15	100.00
Maluku Utara	1.30	17.11	70.57	11.01	100.00
Papua Barat	3.41	24.28	61.39	10.92	100.00
Papua	0.95	16.60	77.32	5.12	100.00
Indonesia	0.42	11.34	82.97	5.28	100.00

Sumber/Source: *Susenas, 2012*

**Percentase Rumah Tangga Menurut Provinsi dan Tingkat Kepercayaan
Terhadap Aparatur Desa/Kelurahan dalam Menjalankan Tugas, 2012**
**Percentage of Households By Province and Level of Trust in Village's
Apparatus in Running Tasks, 2012**

Lampiran : 1.2.
Appendix

Provinsi <i>Province</i>	Tingkat Kepercayaan / <i>Level of Trust</i>				Jumlah <i>Total</i>
	Sangat Tidak <i>Strongly Disbelieve</i>	Tidak <i>Disbelieve</i>	Percaya <i>Believe</i>	Sangat <i>Strongly Believe</i>	
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Aceh	0.36	8.02	80.97	10.64	100.00
Sumatera Utara	0.83	11.37	80.40	7.40	100.00
Sumatera Barat	0.46	12.75	83.95	2.84	100.00
Riau	0.51	8.74	83.43	7.31	100.00
Jambi	0.67	8.73	85.01	5.59	100.00
Sumatera Selatan	0.15	9.05	84.15	6.64	100.00
Bengkulu	0.55	10.25	82.25	6.95	100.00
Lampung	0.14	6.66	88.77	4.43	100.00
Kepulauan Bangka Belitung	0.38	12.69	78.93	8.00	100.00
Kepulauan Riau	0.00	16.11	77.56	6.33	100.00
DKI Jakarta	-	-	-	-	-
Jawa Barat	0.21	8.49	85.75	5.55	100.00
Jawa Tengah	0.66	9.07	81.21	9.06	100.00
DI Yogyakarta	0.48	6.08	88.57	4.87	100.00
Jawa Timur	0.50	9.71	79.83	9.96	100.00
Banten	1.54	16.94	74.22	7.30	100.00
Bali	0.68	5.19	84.65	9.47	100.00
Nusa Tenggara Barat	0.63	13.60	76.66	9.11	100.00
Nusa Tenggara Timur	0.76	8.69	76.39	14.16	100.00
Kalimantan Barat	0.76	8.90	82.83	7.51	100.00
Kalimantan Tengah	0.19	9.21	81.14	9.46	100.00
Kalimantan Selatan	0.94	13.96	79.79	5.31	100.00
Kalimantan Timur	1.15	10.36	75.50	12.99	100.00
Sulawesi Utara	0.38	8.66	77.94	13.02	100.00
Sulawesi Tengah	0.89	10.54	81.12	7.46	100.00
Sulawesi Selatan	0.51	7.83	78.99	12.66	100.00
Sulawesi Tenggara	0.69	10.64	75.61	13.07	100.00
Gorontalo	0.49	8.50	82.66	8.35	100.00
Sulawesi Barat	0.29	10.11	80.27	9.32	100.00
Maluku	1.25	13.69	72.57	12.49	100.00
Maluku Utara	0.98	12.07	68.31	18.63	100.00
Papua Barat	0.52	17.29	70.88	11.32	100.00
Papua	1.58	24.88	63.40	10.14	100.00
Indonesia	0.56	9.92	81.11	8.41	100.00

Sumber/Source: *Susenas, 2012*

Lampiran : 2. Masalah Warga, 2012
Appendix Percentage of Households By Province and Level of Trust in Community Leader's Role in Helping People Problem, 2012

Provinsi Province	Tingkat Kepercayaan / Level of Trust					Jumlah Total
	Sangat Tidak Percaya <i>Strongly Disbelieve</i>	Tidak Percaya <i>Disbelieve</i>	Percaya <i>Believe</i>	Sangat Percaya <i>Strongly Believe</i>		
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Aceh	0.21	7.82	80.95	11.03	100.00	
Sumatera Utara	0.33	8.57	86.22	4.87	100.00	
Sumatera Barat	0.41	10.09	86.22	3.28	100.00	
Riau	0.28	8.09	84.60	7.03	100.00	
Jambi	0.48	5.65	88.76	5.11	100.00	
Sumatera Selatan	0.08	5.65	88.65	5.62	100.00	
Bengkulu	0.26	8.36	85.74	5.64	100.00	
Lampung	0.27	6.62	89.28	3.84	100.00	
Kepulauan Bangka Belitung	0.49	8.60	84.82	6.09	100.00	
Kepulauan Riau	0.04	13.08	83.91	2.97	100.00	
DKI Jakarta	0.31	8.15	86.87	4.67	100.00	
Jawa Barat	0.16	6.22	88.09	5.53	100.00	
Jawa Tengah	0.28	6.97	85.79	6.96	100.00	
DI Yogyakarta	0.39	6.88	88.36	4.37	100.00	
Jawa Timur	0.23	7.31	83.62	8.84	100.00	
Banten	0.49	7.64	84.20	7.68	100.00	
Bali	0.15	5.18	85.61	9.05	100.00	
Nusa Tenggara Barat	0.02	6.27	85.71	7.99	100.00	
Nusa Tenggara Timur	0.18	5.82	80.22	13.78	100.00	
Kalimantan Barat	0.73	7.43	84.27	7.57	100.00	
Kalimantan Tengah	0.70	3.98	87.68	7.64	100.00	
Kalimantan Selatan	0.34	7.72	87.58	4.36	100.00	
Kalimantan Timur	0.32	7.62	82.17	9.90	100.00	
Sulawesi Utara	0.19	5.39	84.52	9.90	100.00	
Sulawesi Tengah	0.18	7.80	84.51	7.51	100.00	
Sulawesi Selatan	0.36	7.44	82.18	10.02	100.00	
Sulawesi Tenggara	0.33	7.75	80.74	11.18	100.00	
Gorontalo	0.52	5.36	87.30	6.82	100.00	
Sulawesi Barat	0.28	6.47	84.46	8.80	100.00	
Maluku	0.33	8.70	79.10	11.87	100.00	
Maluku Utara	0.27	8.53	73.25	17.94	100.00	
Papua Barat	1.55	12.69	72.98	12.79	100.00	
Papua	1.19	10.82	76.04	11.95	100.00	
Indonesia	0.28	7.16	85.46	7.10	100.00	

Sumber/Source: Susenas, 2012

**Persentase Rumah Tangga Menurut Provinsi dan Tingkat Kepercayaan
bahwa Tokoh Masyarakat Berperan dalam Membantu Mengatasi**

Lampiran : 2.1. Masalah Warga, 2012

**Appendix Percentage of Households By Province and Level of Trust in Community
Leader's Role in Helping People Problem, 2012**

Provinsi <i>Province</i>	Tingkat Kepercayaan / <i>Level of Trust</i>				Jumlah <i>Total</i>	Kota / <i>Urban</i>
	Sangat Tidak Percaya <i>Strongly Disbelieve</i>	Tidak Percaya <i>Disbelieve</i>	Percaya <i>Believe</i>	Sangat Percaya <i>Strongly Believe</i>		
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Aceh	0.06	9.73	78.38	11.83	100.00	
Sumatera Utara	0.09	9.59	87.24	3.08	100.00	
Sumatera Barat	0.63	12.37	83.85	3.16	100.00	
Riau	0.18	9.30	85.65	4.87	100.00	
Jambi	0.68	7.11	89.87	2.35	100.00	
Sumatera Selatan	0.16	7.87	86.63	5.35	100.00	
Bengkulu	0.30	11.87	83.73	4.10	100.00	
Lampung	0.57	11.61	83.43	4.39	100.00	
Kepulauan Bangka Belitung	0.42	11.70	83.85	4.03	100.00	
Kepulauan Riau	0.05	13.86	83.63	2.46	100.00	
DKI Jakarta	0.31	8.15	86.87	4.67	100.00	
Jawa Barat	0.24	6.99	88.00	4.77	100.00	
Jawa Tengah	0.31	7.35	87.04	5.31	100.00	
DI Yogyakarta	0.35	9.34	85.75	4.56	100.00	
Jawa Timur	0.21	7.42	85.50	6.87	100.00	
Banten	0.47	8.24	84.93	6.36	100.00	
Bali	0.16	6.33	84.07	9.44	100.00	
Nusa Tenggara Barat	0.06	5.83	88.23	5.88	100.00	
Nusa Tenggara Timur	0.00	5.13	84.53	10.34	100.00	
Kalimantan Barat	0.64	10.40	83.42	5.55	100.00	
Kalimantan Tengah	1.16	4.97	90.79	3.08	100.00	
Kalimantan Selatan	0.47	12.24	83.26	4.03	100.00	
Kalimantan Timur	0.30	7.26	84.23	8.21	100.00	
Sulawesi Utara	0.08	3.04	87.08	9.80	100.00	
Sulawesi Tengah	0.00	13.92	80.20	5.88	100.00	
Sulawesi Selatan	0.64	12.03	79.66	7.67	100.00	
Sulawesi Tenggara	0.43	12.11	77.99	9.46	100.00	
Gorontalo	0.08	3.71	87.49	8.72	100.00	
Sulawesi Barat	0.00	9.96	80.72	9.32	100.00	
Maluku	0.64	12.12	78.58	8.66	100.00	
Maluku Utara	0.30	12.39	74.06	13.25	100.00	
Papua Barat	4.49	16.98	70.12	8.42	100.00	
Papua	0.87	15.55	77.30	6.28	100.00	
Indonesia	0.29	8.10	86.03	5.58	100.00	

Sumber/Souce: *Susenas*, 2012

**Persentase Rumah Tangga Menurut Provinsi dan Tingkat Kepercayaan
bahwa Tokoh Masyarakat Berperan dalam Membantu Mengatasi**

Lampiran : 2.2. Masalah Warga, 2012

**Appendix Percentage of Households By Province and Level of Trust in Community
Leader's Role in Helping People Problem, 2012**

Provinsi <i>Province</i>	Tingkat Kepercayaan / <i>Level of Trust</i>				Jumlah <i>Total</i>	Desa / <i>Rural</i>
	Sangat Tidak Percaya <i>Strongly Disbelieve</i>	Tidak Percaya <i>Disbelieve</i>	Percaya <i>Believe</i>	Sangat Percaya <i>Strongly Believe</i>		
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Aceh	0.26	7.07	81.95	10.71	100.00	
Sumatera Utara	0.56	7.63	85.27	6.53	100.00	
Sumatera Barat	0.28	8.67	87.69	3.36	100.00	
Riau	0.35	7.34	83.95	8.36	100.00	
Jambi	0.40	5.04	88.30	6.26	100.00	
Sumatera Selatan	0.04	4.54	89.67	5.75	100.00	
Bengkulu	0.25	6.78	86.64	6.33	100.00	
Lampung	0.18	5.04	91.13	3.66	100.00	
Kepulauan Bangka Belitung	0.55	5.64	85.75	8.05	100.00	
Kepulauan Riau	0.00	9.29	85.29	5.41	100.00	
DKI Jakarta	-	-	-	-	-	-
Jawa Barat	0.00	4.82	88.26	6.92	100.00	
Jawa Tengah	0.26	6.66	84.77	8.31	100.00	
DI Yogyakarta	0.48	1.71	93.87	3.95	100.00	
Jawa Timur	0.24	7.22	81.96	10.57	100.00	
Banten	0.53	6.43	82.74	10.31	100.00	
Bali	0.14	3.41	88.00	8.45	100.00	
Nusa Tenggara Barat	0.00	6.58	83.98	9.44	100.00	
Nusa Tenggara Timur	0.22	5.98	79.21	14.59	100.00	
Kalimantan Barat	0.76	6.26	84.60	8.37	100.00	
Kalimantan Tengah	0.47	3.48	86.10	9.95	100.00	
Kalimantan Selatan	0.25	4.43	90.73	4.59	100.00	
Kalimantan Timur	0.34	8.19	78.86	12.61	100.00	
Sulawesi Utara	0.28	7.48	82.26	9.98	100.00	
Sulawesi Tengah	0.24	5.92	85.83	8.01	100.00	
Sulawesi Selatan	0.20	4.84	83.61	11.35	100.00	
Sulawesi Tenggara	0.29	6.16	81.75	11.80	100.00	
Gorontalo	0.74	6.18	87.20	5.88	100.00	
Sulawesi Barat	0.36	5.43	85.57	8.64	100.00	
Maluku	0.15	6.63	79.41	13.81	100.00	
Maluku Utara	0.26	7.09	72.94	19.70	100.00	
Papua Barat	0.40	11.02	74.09	14.48	100.00	
Papua	1.29	9.34	75.65	13.72	100.00	
Indonesia	0.27	6.24	84.90	8.59	100.00	

Sumber/Souce: *Susenas*, 2012

Lampiran : 3.
Appendix
Percentase Rumah Tangga Menurut Provinsi dan Tingkat Kepercayaan bahwa Tokoh Agama Berperan Sebagai Panutan/Penuntun Moral, 2012
Percentage of Households By Province and Level of Trust that Religious Figure's Role as Moral Guidance, 2012

Provinsi <i>Province</i>	Tidak Ada No	Tingkat Kepercayaan / <i>Level of Trust</i>				Jumlah <i>Total</i>	
		Sangat Percaya <i>Strongly Believe</i>	Tidak Percaya <i>Disbelieve</i>	Tidak Percaya <i>Disbelieve</i>	Percaya <i>Believe</i>		
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Aceh	0.00	0.45	4.86	76.13	18.56	100.00	
Sumatera Utara	0.00	0.14	4.56	87.60	7.71	100.00	
Sumatera Barat	0.00	0.08	6.17	87.41	6.34	100.00	
Riau	0.00	0.33	4.37	86.66	8.64	100.00	
Jambi	0.00	0.14	2.27	89.77	7.82	100.00	
Sumatera Selatan	0.45	0.15	3.58	86.17	9.65	100.00	
Bengkulu	0.00	0.15	5.99	85.15	8.71	100.00	
Lampung	0.00	0.15	4.08	87.47	8.31	100.00	
Kepulauan Bangka Belitung	0.00	0.21	4.93	86.66	8.20	100.00	
Kepulauan Riau	0.00	0.30	10.23	81.45	8.02	100.00	
DKI Jakarta	0.00	0.23	6.45	87.52	5.80	100.00	
Jawa Barat	0.00	0.39	3.30	84.86	11.45	100.00	
Jawa Tengah	0.15	0.35	3.63	83.56	12.30	100.00	
DI Yogyakarta	0.00	0.13	4.96	87.72	7.20	100.00	
Jawa Timur	0.43	0.25	3.62	81.41	14.29	100.00	
Banten	0.00	0.34	4.78	85.65	9.23	100.00	
Bali	1.49	0.17	3.23	82.87	12.23	100.00	
Nusa Tenggara Barat	0.00	0.34	3.35	83.38	12.93	100.00	
Nusa Tenggara Timur	0.63	0.40	2.20	75.59	21.17	100.00	
Kalimantan Barat	0.00	0.15	3.78	84.11	11.96	100.00	
Kalimantan Tengah	0.00	0.11	1.67	87.09	11.13	100.00	
Kalimantan Selatan	1.20	0.62	2.44	80.19	15.55	100.00	
Kalimantan Timur	0.16	0.27	4.94	80.83	13.79	100.00	
Sulawesi Utara	0.00	0.23	1.38	79.74	18.66	100.00	
Sulawesi Tengah	0.00	0.22	2.50	81.52	15.76	100.00	
Sulawesi Selatan	0.25	0.33	3.22	83.18	13.02	100.00	
Sulawesi Tenggara	0.00	0.44	2.35	77.47	19.74	100.00	
Gorontalo	0.00	0.36	1.76	85.46	12.42	100.00	
Sulawesi Barat	0.00	0.71	2.83	82.61	13.85	100.00	
Maluku	0.00	0.07	2.71	71.72	25.50	100.00	
Maluku Utara	0.00	0.08	2.98	65.95	30.99	100.00	
Papua Barat	1.18	0.75	5.58	74.84	17.66	100.00	
Papua	0.26	0.95	6.24	72.94	19.61	100.00	
Indonesia	0.18	0.30	3.86	83.65	12.01	100.00	

Sumber/*Source*: Susenas, 2012

Lampiran : 3.1.
Appendix **Percentase Rumah Tangga Menurut Provinsi dan Tingkat Kepercayaan bahwa Tokoh Agama Berperan Sebagai Panutan/Penuntun Moral, 2012**
Percentage of Households By Province and Level of Trust that Religious Figure's Role as Moral Guidance, 2012

Provinsi <i>Province</i>	Tidak Ada <i>No</i>	Tingkat Kepercayaan / <i>Level of Trust</i>					Jumlah <i>Total</i>
		Sangat Percaya <i>Strongly Believe</i>	Tidak Percaya <i>Disbelieve</i>	Tidak Percaya <i>Disbelieve</i>	Percaya <i>Believe</i>	Sangat Percaya <i>Strongly Believe</i>	
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Aceh	0.00	0.52	4.37	75.66	19.45	100.00	
Sumatera Utara	0.00	0.24	4.87	89.99	4.89	100.00	
Sumatera Barat	0.00	0.06	7.86	85.48	6.59	100.00	
Riau	0.00	0.57	5.13	88.95	5.34	100.00	
Jambi	0.00	0.06	3.72	91.81	4.41	100.00	
Sumatera Selatan	1.34	0.08	4.00	85.37	9.20	100.00	
Bengkulu	0.00	0.08	7.27	85.16	7.48	100.00	
Lampung	0.00	0.63	7.93	82.28	9.17	100.00	
Kepulauan Bangka Belitung	0.00	0.15	7.61	85.50	6.74	100.00	
Kepulauan Riau	0.00	0.36	11.57	80.88	7.20	100.00	
DKI Jakarta	0.00	0.23	6.45	87.52	5.80	100.00	
Jawa Barat	0.00	0.53	3.83	86.10	9.55	100.00	
Jawa Tengah	0.34	0.46	4.11	85.25	9.84	100.00	
DI Yogyakarta	0.00	0.19	6.12	85.51	8.18	100.00	
Jawa Timur	0.51	0.36	4.32	83.15	11.66	100.00	
Banten	0.00	0.40	5.11	86.65	7.84	100.00	
Bali	2.46	0.20	3.97	82.72	10.65	100.00	
Nusa Tenggara Barat	0.00	0.33	2.15	85.79	11.73	100.00	
Nusa Tenggara Timur	0.00	0.60	2.29	84.49	12.62	100.00	
Kalimantan Barat	0.00	0.19	5.42	81.68	12.70	100.00	
Kalimantan Tengah	0.00	0.16	3.13	92.70	4.01	100.00	
Kalimantan Selatan	0.00	1.05	2.92	80.02	16.01	100.00	
Kalimantan Timur	0.00	0.00	5.62	83.91	10.47	100.00	
Sulawesi Utara	0.00	0.21	0.85	79.55	19.39	100.00	
Sulawesi Tengah	0.00	0.47	4.03	84.35	11.14	100.00	
Sulawesi Selatan	0.68	0.46	5.39	82.38	11.09	100.00	
Sulawesi Tenggara	0.00	0.49	2.26	79.44	17.81	100.00	
Gorontalo	0.00	0.08	3.51	84.96	11.45	100.00	
Sulawesi Barat	0.00	1.69	2.66	80.42	15.22	100.00	
Maluku	0.00	0.00	3.84	78.97	17.19	100.00	
Maluku Utara	0.00	0.30	3.54	76.46	19.70	100.00	
Papua Barat	0.00	1.78	2.08	78.21	17.93	100.00	
Papua	0.00	0.75	6.59	78.90	13.76	100.00	
Indonesia	0.22	0.40	4.63	85.16	9.61	100.00	

Sumber/*Source*: Susenas, 2012

Lampiran : 3.2.
Appendix **Percentase Rumah Tangga Menurut Provinsi dan Tingkat Kepercayaan bahwa Tokoh Agama Berperan Sebagai Panutan/Penuntun Moral, 2012**
Percentage of Households By Province and Level of Trust that Religious Figure's Role as Moral Guidance, 2012

Provinsi <i>Province</i>	Tidak Ada No	Tingkat Kepercayaan / <i>Level of Trust</i>					Jumlah <i>Total</i>
		Sangat Percaya <i>Strongly Believe</i>	Tidak Percaya <i>Disbelieve</i>	Tidak Percaya <i>Disbelieve</i>	Percaya <i>Believe</i>	Sangat Percaya <i>Strongly Believe</i>	
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Aceh	0.00	0.43	5.04	76.32	18.21	100.00	
Sumatera Utara	0.00	0.05	4.26	85.37	10.32	100.00	
Sumatera Barat	0.00	0.09	5.12	88.61	6.19	100.00	
Riau	0.00	0.18	3.90	85.23	10.68	100.00	
Jambi	0.00	0.18	1.67	88.92	9.23	100.00	
Sumatera Selatan	0.00	0.19	3.38	86.57	9.87	100.00	
Bengkulu	0.00	0.18	5.42	85.14	9.27	100.00	
Lampung	0.00	0.00	2.86	89.10	8.04	100.00	
Kepulauan Bangka Belitung	0.00	0.26	2.38	87.76	9.60	100.00	
Kepulauan Riau	0.00	0.00	3.75	84.24	12.01	100.00	
DKI Jakarta	-	-	-	-	-	-	-
Jawa Barat	0.00	0.15	2.33	82.60	14.92	100.00	
Jawa Tengah	0.00	0.25	3.24	82.20	14.31	100.00	
DI Yogyakarta	0.00	0.00	2.52	92.36	5.12	100.00	
Jawa Timur	0.36	0.16	3.01	79.88	16.60	100.00	
Banten	0.00	0.22	4.13	83.65	12.00	100.00	
Bali	0.00	0.14	2.09	83.10	14.67	100.00	
Nusa Tenggara Barat	0.00	0.34	4.17	81.72	13.76	100.00	
Nusa Tenggara Timur	0.77	0.36	2.18	73.51	23.18	100.00	
Kalimantan Barat	0.00	0.14	3.13	85.06	11.67	100.00	
Kalimantan Tengah	0.00	0.09	0.93	84.24	14.74	100.00	
Kalimantan Selatan	2.08	0.30	2.09	80.31	15.22	100.00	
Kalimantan Timur	0.42	0.71	3.86	75.90	19.11	100.00	
Sulawesi Utara	0.00	0.25	1.85	79.90	18.01	100.00	
Sulawesi Tengah	0.00	0.15	2.02	80.65	17.18	100.00	
Sulawesi Selatan	0.00	0.25	1.99	83.64	14.12	100.00	
Sulawesi Tenggara	0.00	0.42	2.38	76.75	20.45	100.00	
Gorontalo	0.00	0.49	0.90	85.71	12.90	100.00	
Sulawesi Barat	0.00	0.42	2.88	83.25	13.45	100.00	
Maluku	0.00	0.12	2.02	67.32	30.54	100.00	
Maluku Utara	0.00	0.00	2.77	62.00	35.23	100.00	
Papua Barat	1.63	0.35	6.94	73.53	17.55	100.00	
Papua	0.34	1.02	6.13	71.07	21.44	100.00	
Indonesia	0.14	0.21	3.12	82.18	14.35	100.00	

Sumber/*Source*: Susenas, 2012

Lampiran : 4.
Appendix

**Percentase Rumah Tangga Menurut Provinsi dan Tingkat Kepercayaan
Menitipkan Rumah pada Tetangga Saat Seluruh Anggota Rumah Tangga
Bepergian, 2012**

**Percentage of Households By Province and Level of Trust to Leave The
House to Neighbours When All Household Members Travelling, 2012**

Provinsi Province	Tingkat Kepercayaan / Level of Trust				Jumlah Total
	Sangat Tidak Percaya <i>Strongly Disbelieve</i>	Tidak Percaya <i>Disbelieve</i>	Percaya Believe	Sangat Percaya <i>Strongly Believe</i>	
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Aceh	1.41	16.88	73.66	8.05	100.00
Sumatera Utara	0.64	12.90	79.20	7.26	100.00
Sumatera Barat	0.20	16.87	75.85	7.08	100.00
Riau	0.75	11.31	79.69	8.25	100.00
Jambi	0.91	17.47	75.55	6.07	100.00
Sumatera Selatan	0.33	11.75	79.24	8.68	100.00
Bengkulu	0.51	10.06	76.50	12.93	100.00
Lampung	0.58	9.63	79.61	10.18	100.00
Kepulauan Bangka Belitung	0.49	17.99	72.07	9.46	100.00
Kepulauan Riau	0.53	21.88	73.65	3.94	100.00
DKI Jakarta	2.53	24.32	68.32	4.83	100.00
Jawa Barat	0.66	11.36	81.46	6.52	100.00
Jawa Tengah	0.74	9.03	78.09	12.14	100.00
DI Yogyakarta	0.69	14.17	77.36	7.77	100.00
Jawa Timur	0.68	16.89	72.46	9.97	100.00
Banten	1.36	13.41	76.76	8.47	100.00
Bali	1.00	13.86	71.90	13.23	100.00
Nusa Tenggara Barat	0.39	10.21	76.10	13.29	100.00
Nusa Tenggara Timur	0.96	14.83	71.50	12.71	100.00
Kalimantan Barat	3.44	13.51	75.56	7.50	100.00
Kalimantan Tengah	1.24	12.15	80.57	6.04	100.00
Kalimantan Selatan	0.52	14.60	77.24	7.64	100.00
Kalimantan Timur	0.93	17.34	72.17	9.55	100.00
Sulawesi Utara	0.48	12.16	79.47	7.90	100.00
Sulawesi Tengah	0.43	10.42	76.73	12.43	100.00
Sulawesi Selatan	1.10	10.82	70.55	17.53	100.00
Sulawesi Tenggara	0.71	14.33	70.57	14.39	100.00
Gorontalo	2.24	17.45	71.87	8.44	100.00
Sulawesi Barat	0.52	9.20	74.95	15.33	100.00
Maluku	1.86	18.10	67.72	12.32	100.00
Maluku Utara	0.15	18.67	61.26	19.92	100.00
Papua Barat	1.55	22.14	67.28	9.03	100.00
Papua	1.40	29.73	60.96	7.90	100.00
Indonesia	0.86	13.64	76.20	9.29	100.00

Sumber/Source: *Susenas, 2012*

**Percentase Rumah Tangga Menurut Provinsi dan Tingkat Kepercayaan
Menitipkan Rumah pada Tetangga Saat Seluruh Anggota Rumah Tangga**

Lampiran : 4.1. Bepergian, 2012

**Appendix Percentage of Households By Province and Level of Trust to Leave The
House to Neighbours When All Household Members Travelling, 2012**

Provinsi <i>Province</i>	Tingkat Kepercayaan / <i>Level of Trust</i>				Jumlah <i>Total</i>
	Sangat Tidak <i>Strongly Disbelieve</i>	Tidak <i>Percaya Disbelieve</i>	Percaya <i>Believe</i>	Sangat <i>Strongly Believe</i>	
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Aceh	1.61	19.04	71.53	7.82	100.00
Sumatera Utara	0.64	14.36	79.62	5.38	100.00
Sumatera Barat	0.06	20.66	70.48	8.81	100.00
Riau	1.48	16.95	76.46	5.11	100.00
Jambi	1.36	22.52	73.27	2.85	100.00
Sumatera Selatan	0.19	14.78	76.40	8.64	100.00
Bengkulu	1.09	17.90	70.93	10.08	100.00
Lampung	0.73	17.76	69.90	11.61	100.00
Kepulauan Bangka Belitung	1.00	29.44	63.55	6.00	100.00
Kepulauan Riau	0.34	24.14	72.84	2.68	100.00
DKI Jakarta	2.53	24.32	68.32	4.83	100.00
Jawa Barat	0.74	13.17	80.19	5.90	100.00
Jawa Tengah	0.75	10.67	77.30	11.27	100.00
DI Yogyakarta	1.02	16.61	76.88	5.49	100.00
Jawa Timur	1.10	21.10	69.44	8.37	100.00
Banten	1.62	15.76	74.00	8.62	100.00
Bali	0.92	15.36	71.13	12.60	100.00
Nusa Tenggara Barat	0.02	9.95	78.05	11.97	100.00
Nusa Tenggara Timur	0.62	19.27	69.26	10.84	100.00
Kalimantan Barat	5.11	21.28	68.15	5.45	100.00
Kalimantan Tengah	2.36	14.40	81.00	2.23	100.00
Kalimantan Selatan	1.03	18.78	74.38	5.81	100.00
Kalimantan Timur	0.97	20.67	68.60	9.75	100.00
Sulawesi Utara	0.17	10.51	81.03	8.29	100.00
Sulawesi Tengah	0.90	16.54	71.06	11.51	100.00
Sulawesi Selatan	1.86	16.25	66.79	15.09	100.00
Sulawesi Tenggara	1.25	12.47	73.97	12.30	100.00
Gorontalo	0.79	23.94	65.62	9.65	100.00
Sulawesi Barat	1.07	8.47	75.37	15.09	100.00
Maluku	1.18	24.32	62.67	11.83	100.00
Maluku Utara	0.00	25.85	56.99	17.16	100.00
Papua Barat	3.89	31.12	60.62	4.37	100.00
Papua	1.87	24.24	68.55	5.33	100.00
Indonesia	1.08	16.52	74.59	7.81	100.00

Sumber/Source: *Susenas, 2012*

**Percentase Rumah Tangga Menurut Provinsi dan Tingkat Kepercayaan
Menitipkan Rumah pada Tetangga Saat Seluruh Anggota Rumah Tangga**

Lampiran : 4.2. Bepergian, 2012

**Appendix Percentage of Households By Province and Level of Trust to Leave The
House to Neighbours When All Household Members Travelling, 2012**

Provinsi <i>Province</i>	Tingkat Kepercayaan / <i>Level of Trust</i>				Jumlah <i>Total</i>
	Sangat Tidak <i>Strongly Disbelieve</i>	Tidak <i>Percaya Disbelieve</i>	Percaya <i>Believe</i>	Sangat <i>Strongly Believe</i>	
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Aceh	1.33	16.04	74.49	8.14	100.00
Sumatera Utara	0.64	11.54	78.82	9.01	100.00
Sumatera Barat	0.29	14.53	79.19	6.00	100.00
Riau	0.29	7.81	81.70	10.20	100.00
Jambi	0.73	15.38	76.49	7.41	100.00
Sumatera Selatan	0.40	10.24	80.66	8.69	100.00
Bengkulu	0.25	6.51	79.02	14.22	100.00
Lampung	0.53	7.07	82.67	9.73	100.00
Kepulauan Bangka Belitung	0.00	7.05	80.19	12.75	100.00
Kepulauan Riau	1.46	10.90	77.60	10.04	100.00
DKI Jakarta	-	-	-	-	-
Jawa Barat	0.51	8.05	83.77	7.66	100.00
Jawa Tengah	0.72	7.70	78.74	12.84	100.00
DI Yogyakarta	0.00	9.04	78.37	12.58	100.00
Jawa Timur	0.32	13.20	75.10	11.38	100.00
Banten	0.85	8.75	82.25	8.15	100.00
Bali	1.14	11.55	73.11	14.20	100.00
Nusa Tenggara Barat	0.65	10.39	74.76	14.20	100.00
Nusa Tenggara Timur	1.04	13.79	72.03	13.15	100.00
Kalimantan Barat	2.78	10.44	78.47	8.30	100.00
Kalimantan Tengah	0.66	11.00	80.36	7.98	100.00
Kalimantan Selatan	0.14	11.56	79.32	8.98	100.00
Kalimantan Timur	0.87	12.02	77.88	9.24	100.00
Sulawesi Utara	0.75	13.62	78.08	7.55	100.00
Sulawesi Tengah	0.28	8.53	78.48	12.71	100.00
Sulawesi Selatan	0.66	7.74	72.68	18.91	100.00
Sulawesi Tenggara	0.51	15.01	69.32	15.16	100.00
Gorontalo	2.96	14.24	74.96	7.84	100.00
Sulawesi Barat	0.36	9.42	74.83	15.40	100.00
Maluku	2.27	14.33	70.79	12.62	100.00
Maluku Utara	0.20	15.97	62.87	20.96	100.00
Papua Barat	0.64	18.65	69.87	10.84	100.00
Papua	1.26	31.45	58.58	8.71	100.00
Indonesia	0.65	10.82	77.79	10.74	100.00

Sumber/Source: *Susenas, 2012*

Lampiran : 5.
Appendix

Percentase Rumah Tangga Menurut Provinsi dan Tingkat Kepercayaan
Menitipkan Anak Usia 0 - 12 Tahun, 2012
*Percentage of Households By Province and Trust to Leave The Children
Aged 0 - 12 Years Old to Neighbours, 2012*

Provinsi Province	Tingkat Kepercayaan / Level of Trust				Jumlah Total	Kota+Desa / Urban+Rural
	Sangat Tidak Percaya <i>Strongly Disbelieve</i>	Tidak Percaya <i>Disbelieve</i>	Percaya Believe	Sangat Percaya <i>Strongly Believe</i>		
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Aceh	6.08	30.60	58.43	4.88	100.00	
Sumatera Utara	3.50	28.76	62.74	5.00	100.00	
Sumatera Barat	2.11	35.48	58.45	3.96	100.00	
Riau	4.42	33.13	57.21	5.24	100.00	
Jambi	3.47	36.46	55.94	4.13	100.00	
Sumatera Selatan	1.74	32.02	60.41	5.83	100.00	
Bengkulu	3.93	30.25	58.95	6.87	100.00	
Lampung	3.05	27.67	64.20	5.07	100.00	
Kepulauan Bangka Belitung	1.12	31.89	61.68	5.31	100.00	
Kepulauan Riau	5.86	49.94	40.36	3.83	100.00	
DKI Jakarta	12.24	52.60	33.30	1.86	100.00	
Jawa Barat	2.57	26.50	66.64	4.29	100.00	
Jawa Tengah	2.65	22.28	69.09	5.98	100.00	
DI Yogyakarta	1.09	35.35	60.38	3.18	100.00	
Jawa Timur	2.65	34.90	56.79	5.67	100.00	
Banten	4.94	29.62	59.85	5.59	100.00	
Bali	3.00	32.15	58.26	6.58	100.00	
Nusa Tenggara Barat	2.13	22.00	67.41	8.46	100.00	
Nusa Tenggara Timur	4.24	28.20	59.74	7.82	100.00	
Kalimantan Barat	5.27	30.13	59.52	5.08	100.00	
Kalimantan Tengah	6.52	30.07	59.81	3.60	100.00	
Kalimantan Selatan	2.20	30.56	62.66	4.57	100.00	
Kalimantan Timur	3.42	37.09	54.17	5.31	100.00	
Sulawesi Utara	3.56	28.90	63.27	4.27	100.00	
Sulawesi Tengah	4.69	25.27	63.62	6.42	100.00	
Sulawesi Selatan	3.74	23.24	60.57	12.44	100.00	
Sulawesi Tenggara	3.92	22.83	63.97	9.28	100.00	
Gorontalo	4.11	29.90	60.59	5.40	100.00	
Sulawesi Barat	1.96	22.03	66.77	9.25	100.00	
Maluku	3.03	31.27	54.62	11.08	100.00	
Maluku Utara	3.53	29.18	52.36	14.93	100.00	
Papua Barat	6.64	43.77	45.18	4.41	100.00	
Papua	3.02	40.42	51.15	5.42	100.00	
Indonesia	3.45	30.19	60.88	5.48	100.00	

Sumber/Source: Susenas, 2012

**Percentase Rumah Tangga Menurut Provinsi dan Tingkat Kepercayaan
Menitipkan Anak Usia 0 - 12 Tahun, 2012**
Lampiran : 5.1.
Appendix *Percentage of Households By Province and Trust to Leave The Children
Aged 0 - 12 Years Old to Neighbours, 2012*

Provinsi <i>Province</i>	Tingkat Kepercayaan / Level of Trust					Jumlah <i>Total</i>
	Sangat Tidak <i>Strongly Disbelieve</i>	Tidak <i>Disbelieve</i>	Percaya <i>Believe</i>	Sangat <i>Strongly Believe</i>		
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Aceh	7.40	30.66	57.30	4.64	100.00	
Sumatera Utara	3.23	32.04	61.39	3.35	100.00	
Sumatera Barat	1.38	42.26	52.33	4.03	100.00	
Riau	6.37	44.27	46.07	3.29	100.00	
Jambi	5.92	41.39	50.19	2.50	100.00	
Sumatera Selatan	3.88	45.77	45.61	4.74	100.00	
Bengkulu	9.22	39.43	45.57	5.78	100.00	
Lampung	4.91	40.96	49.52	4.61	100.00	
Kepulauan Bangka Belitung	0.78	41.56	53.42	4.24	100.00	
Kepulauan Riau	5.29	55.57	36.68	2.45	100.00	
DKI Jakarta	12.24	52.60	33.30	1.86	100.00	
Jawa Barat	2.98	31.52	61.94	3.57	100.00	
Jawa Tengah	3.03	25.47	66.98	4.51	100.00	
DI Yogyakarta	1.51	39.67	56.49	2.33	100.00	
Jawa Timur	3.63	40.74	51.61	4.02	100.00	
Banten	6.31	33.96	53.61	6.12	100.00	
Bali	3.58	38.80	51.95	5.67	100.00	
Nusa Tenggara Barat	2.30	23.04	66.08	8.58	100.00	
Nusa Tenggara Timur	8.07	31.43	54.86	5.63	100.00	
Kalimantan Barat	6.52	36.38	53.63	3.46	100.00	
Kalimantan Tengah	7.13	36.53	54.53	1.82	100.00	
Kalimantan Selatan	3.26	35.56	58.46	2.72	100.00	
Kalimantan Timur	4.18	43.85	46.96	5.01	100.00	
Sulawesi Utara	1.71	29.98	63.92	4.39	100.00	
Sulawesi Tengah	6.39	35.16	51.27	7.18	100.00	
Sulawesi Selatan	6.88	34.47	49.26	9.39	100.00	
Sulawesi Tenggara	3.91	24.95	60.18	10.96	100.00	
Gorontalo	1.66	38.03	55.31	5.01	100.00	
Sulawesi Barat	4.03	31.40	58.94	5.63	100.00	
Maluku	2.42	42.76	44.80	10.02	100.00	
Maluku Utara	10.81	28.11	49.27	11.81	100.00	
Papua Barat	13.65	43.71	39.48	3.16	100.00	
Papua	5.11	41.98	47.70	5.20	100.00	
Indonesia	4.45	36.09	55.29	4.16	100.00	

Sumber/Source: Susenas, 2012

**Percentase Rumah Tangga Menurut Provinsi dan Tingkat Kepercayaan
Menitipkan Anak Usia 0 - 12 Tahun, 2012**
Appendix : 5.2.
*Percentage of Households By Province and Trust to Leave The Children
Aged 0 - 12 Years Old to Neighbours, 2012*

Provinsi <i>Province</i>	Tingkat Kepercayaan / <i>Level of Trust</i>				Jumlah <i>Total</i>
	Sangat Tidak <i>Strongly Disbelieve</i>	Tidak <i>Disbelieve</i>	Percaya <i>Believe</i>	Sangat <i>Strongly Believe</i>	
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Aceh	5.57	30.58	58.88	4.97	100.00
Sumatera Utara	3.76	25.70	64.00	6.54	100.00
Sumatera Barat	2.56	31.28	62.24	3.92	100.00
Riau	3.21	26.21	64.13	6.45	100.00
Jambi	2.46	34.41	58.32	4.81	100.00
Sumatera Selatan	0.67	25.16	67.80	6.37	100.00
Bengkulu	1.53	26.09	65.01	7.37	100.00
Lampung	2.46	23.48	68.84	5.22	100.00
Kepulauan Bangka Belitung	1.44	22.65	69.57	6.34	100.00
Kepulauan Riau	8.63	22.55	58.28	10.53	100.00
DKI Jakarta	-	-	-	-	-
Jawa Barat	1.83	17.37	75.20	5.60	100.00
Jawa Tengah	2.33	19.69	70.81	7.17	100.00
DI Yogyakarta	0.19	26.27	68.56	4.98	100.00
Jawa Timur	1.79	29.77	61.33	7.11	100.00
Banten	2.21	20.99	72.26	4.54	100.00
Bali	2.11	21.89	68.01	8.00	100.00
Nusa Tenggara Barat	2.02	21.28	68.33	8.37	100.00
Nusa Tenggara Timur	3.34	27.44	60.88	8.33	100.00
Kalimantan Barat	4.78	27.66	61.84	5.72	100.00
Kalimantan Tengah	6.22	26.79	62.49	4.51	100.00
Kalimantan Selatan	1.42	26.92	65.73	5.92	100.00
Kalimantan Timur	2.21	26.30	65.69	5.81	100.00
Sulawesi Utara	5.20	27.93	62.69	4.17	100.00
Sulawesi Tengah	4.17	22.22	67.43	6.18	100.00
Sulawesi Selatan	1.96	16.88	66.98	14.18	100.00
Sulawesi Tenggara	3.93	22.05	65.36	8.66	100.00
Gorontalo	5.32	25.88	63.20	5.59	100.00
Sulawesi Barat	1.34	19.25	69.09	10.32	100.00
Maluku	3.39	24.31	60.58	11.72	100.00
Maluku Utara	0.79	29.58	53.52	16.11	100.00
Papua Barat	3.91	43.79	47.40	4.90	100.00
Papua	2.36	39.93	52.22	5.49	100.00
Indonesia	2.46	24.44	66.34	6.76	100.00

Sumber/Source: Susenas, 2012

Lampiran : 6.**Appendix**

Percentase Rumah Tangga Menurut Provinsi dan Tanggapan Terhadap Kegiatan di Lingkungan Tempat Tinggal oleh Sekelompok Orang dari Suku Bangsa Lain, 2012
Percentage of Households By Province and Response to Activities in The Neighbourhood By a Group of People from Other Ethnics, 2012

Provinsi Province	Tanggapan/ Responses					Kota+Desa / Urban + Rural
	Tidak Ada No Activity	Tidak Senang Unhappy	Kurang Senang Less Happy	Senang Happy	Sangat Senang Very Happy	Jumlah Total
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Aceh	8.51	4.70	17.55	64.59	4.64	100.00
Sumatera Utara	4.73	1.69	13.09	78.28	2.22	100.00
Sumatera Barat	12.97	5.00	17.22	62.66	2.15	100.00
Riau	5.49	2.40	8.99	78.90	4.22	100.00
Jambi	8.70	2.29	11.14	76.43	1.45	100.00
Sumatera Selatan	6.92	1.61	11.33	77.84	2.29	100.00
Bengkulu	7.36	1.24	8.45	81.38	1.57	100.00
Lampung	2.39	0.81	9.28	84.19	3.33	100.00
Kepulauan Bangka Belitung	5.58	2.20	18.71	70.69	2.81	100.00
Kepulauan Riau	2.40	0.51	8.00	85.50	3.59	100.00
DKI Jakarta	3.75	2.14	12.11	80.42	1.58	100.00
Jawa Barat	19.54	3.39	13.91	61.13	2.02	100.00
Jawa Tengah	25.71	3.25	9.90	59.36	1.78	100.00
DI Yogyakarta	9.59	1.48	11.05	75.62	2.26	100.00
Jawa Timur	12.36	2.97	14.98	67.38	2.30	100.00
Banten	9.50	5.74	14.86	68.04	1.85	100.00
Bali	11.67	5.02	16.91	63.36	3.05	100.00
Nusa Tenggara Barat	16.47	7.22	20.08	53.11	3.12	100.00
Nusa Tenggara Timur	8.24	3.41	9.03	75.22	4.10	100.00
Kalimantan Barat	2.35	1.80	8.10	83.39	4.36	100.00
Kalimantan Tengah	3.09	1.17	3.37	87.12	5.24	100.00
Kalimantan Selatan	10.70	1.74	8.13	77.98	1.44	100.00
Kalimantan Timur	5.09	0.77	8.12	80.78	5.24	100.00
Sulawesi Utara	2.79	1.07	7.14	83.76	5.24	100.00
Sulawesi Tengah	2.94	0.91	4.09	85.28	6.79	100.00
Sulawesi Selatan	14.61	1.47	8.29	71.67	3.96	100.00
Sulawesi Tenggara	7.80	1.43	6.17	76.57	8.04	100.00
Gorontalo	15.79	4.37	14.76	61.93	3.15	100.00
Sulawesi Barat	7.43	3.50	8.19	75.92	4.96	100.00
Maluku	5.95	1.84	8.66	75.60	7.95	100.00
Maluku Utara	3.21	1.14	8.43	74.87	12.36	100.00
Papua Barat	0.25	1.62	4.27	85.06	8.79	100.00
Papua	13.73	4.08	18.47	60.08	3.63	100.00
Indonesia	13.15	2.93	12.38	68.85	2.68	100.00

Sumber/Source: Susenas, 2012

Percentase Rumah Tangga Menurut Provinsi dan Tanggapan Terhadap Kegiatan di Lingkungan Tempat Tinggal oleh Sekelompok Orang dari Suku Bangsa Lain, 2012
Lampiran : 6.1.
Appendix
Percentage of Households By Province and Response to Activities in The Neighbourhood By a Group of People from Other Ethnics, 2012

Provinsi Province	Tanggapan/ Responses					Kota / Urban
	Tidak Ada No Activity	Tidak Senang Unhappy	Kurang Senang Less Happy	Senang Happy	Sangat Senang Very Happy	Jumlah Total
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Aceh	5.56	4.30	14.37	69.09	6.68	100.00
Sumatera Utara	2.58	2.05	11.69	82.13	1.54	100.00
Sumatera Barat	14.57	3.25	12.53	68.05	1.59	100.00
Riau	0.00	0.93	7.08	89.80	2.18	100.00
Jambi	7.54	3.25	6.16	81.26	1.79	100.00
Sumatera Selatan	3.97	0.77	13.86	79.32	2.09	100.00
Bengkulu	9.74	0.30	13.39	75.93	0.64	100.00
Lampung	3.03	1.10	13.40	78.91	3.57	100.00
Kepulauan Bangka Belitung	2.49	1.25	19.75	75.50	1.02	100.00
Kepulauan Riau	0.50	0.37	8.15	87.53	3.44	100.00
DKI Jakarta	3.75	2.14	12.11	80.42	1.58	100.00
Jawa Barat	12.90	2.93	14.12	67.29	2.76	100.00
Jawa Tengah	17.88	1.76	8.19	70.95	1.23	100.00
DI Yogyakarta	9.29	1.42	9.02	78.17	2.11	100.00
Jawa Timur	5.62	2.44	13.51	75.46	2.97	100.00
Banten	6.08	7.03	12.14	72.58	2.18	100.00
Bali	4.51	3.11	16.21	71.56	4.62	100.00
Nusa Tenggara Barat	11.33	5.74	21.05	59.57	2.31	100.00
Nusa Tenggara Timur	2.41	1.01	4.90	85.70	5.99	100.00
Kalimantan Barat	1.82	1.40	7.47	83.38	5.93	100.00
Kalimantan Tengah	0.00	1.67	4.95	88.03	5.35	100.00
Kalimantan Selatan	4.90	1.20	6.37	85.26	2.26	100.00
Kalimantan Timur	5.47	0.94	10.45	80.14	3.00	100.00
Sulawesi Utara	2.18	0.80	4.57	86.84	5.61	100.00
Sulawesi Tengah	0.00	1.72	6.49	86.30	5.49	100.00
Sulawesi Selatan	1.69	1.28	7.52	84.90	4.61	100.00
Sulawesi Tenggara	0.00	0.23	5.12	88.04	6.61	100.00
Gorontalo	25.84	4.71	10.97	56.21	2.27	100.00
Sulawesi Barat	13.73	0.00	3.92	79.21	3.15	100.00
Maluku	2.72	0.61	3.99	86.79	5.88	100.00
Maluku Utara	6.32	0.20	3.63	82.52	7.33	100.00
Papua Barat	0.00	0.23	5.85	83.24	10.67	100.00
Papua	2.91	0.72	4.07	86.53	5.77	100.00
Indonesia	8.51	2.50	11.82	74.53	2.65	100.00

Sumber/Source: Susenas, 2012

Lampiran : 6.2.
Appendix

Percentase Rumah Tangga Menurut Provinsi dan Tanggapan Terhadap Kegiatan di Lingkungan Tempat Tinggal oleh Sekelompok Orang dari Suku Bangsa Lain, 2012
Percentage of Households By Province and Response to Activities in The Neighbourhood By a Group of People from Other Ethnics, 2012

Desa / Rural

Provinsi Province	Tanggapan/ Responses					Jumlah Total
	Tidak Ada No Activity	Tidak Senang Unhappy	Kurang Senang Less Happy	Senang Happy	Sangat Senang Very Happy	
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Aceh	9.67	4.86	18.80	62.83	3.84	100.00
Sumatera Utara	6.74	1.34	14.38	74.69	2.85	100.00
Sumatera Barat	11.98	6.08	20.13	59.32	2.50	100.00
Riau	8.90	3.31	10.17	72.14	5.49	100.00
Jambi	9.18	1.89	13.20	74.42	1.31	100.00
Sumatera Selatan	8.40	2.04	10.07	77.11	2.39	100.00
Bengkulu	6.28	1.67	6.22	83.84	1.99	100.00
Lampung	2.19	0.71	7.97	85.86	3.26	100.00
Kepulauan Bangka Belitung	8.53	3.12	17.72	66.10	4.52	100.00
Kepulauan Riau	11.61	1.18	7.23	75.65	4.32	100.00
DKI Jakarta	-	-	-	-	-	-
Jawa Barat	31.62	4.24	13.53	49.95	0.66	100.00
Jawa Tengah	32.08	4.46	11.29	49.94	2.23	100.00
DI Yogyakarta	10.22	1.62	15.34	70.26	2.56	100.00
Jawa Timur	18.28	3.44	16.27	60.29	1.71	100.00
Banten	16.32	3.17	20.29	59.01	1.21	100.00
Bali	22.74	7.96	17.99	50.68	0.63	100.00
Nusa Tenggara Barat	20.01	8.24	19.41	48.66	3.69	100.00
Nusa Tenggara Timur	9.60	3.97	10.00	72.77	3.66	100.00
Kalimantan Barat	2.56	1.96	8.34	83.39	3.74	100.00
Kalimantan Tengah	4.66	0.91	2.58	86.66	5.19	100.00
Kalimantan Selatan	14.93	2.14	9.42	72.67	0.85	100.00
Kalimantan Timur	4.48	0.49	4.39	81.82	8.82	100.00
Sulawesi Utara	3.33	1.31	9.42	81.03	4.91	100.00
Sulawesi Tengah	3.84	0.66	3.34	84.97	7.19	100.00
Sulawesi Selatan	21.93	1.58	8.73	64.17	3.59	100.00
Sulawesi Tenggara	10.65	1.86	6.55	72.38	8.56	100.00
Gorontalo	10.83	4.20	16.64	64.75	3.58	100.00
Sulawesi Barat	5.57	4.54	9.45	74.95	5.49	100.00
Maluku	7.91	2.58	11.50	68.82	9.19	100.00
Maluku Utara	2.03	1.49	10.24	71.99	14.25	100.00
Papua Barat	0.35	2.16	3.66	85.77	8.06	100.00
Papua	17.12	5.14	22.98	51.80	2.96	100.00
Indonesia	17.69	3.35	12.93	63.31	2.71	100.00

Sumber/Source: Susenas, 2012

Lampiran : 7.**Appendix**

Percentase Rumah Tangga Menurut Provinsi dan Tanggapan Terhadap Kegiatan di Lingkungan Tempat Tinggal oleh Sekelompok Orang dari Agama Lain, 2012

Percentage of Households By Province and Response to Activities in The Neighbourhood By a Group of People from Other Religions, 2012

Provinsi Province	Tanggapan/ Responses					Kota+Desa / Urban+Rural
	Tidak Ada No Activity	Tidak Senang Unhappy	Kurang Senang Less Happy	Senang Happy	Sangat Senang Very Happy	Jumlah Total
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Aceh	17.71	18.40	31.67	28.56	3.64	100.00
Sumatera Utara	5.91	2.69	17.05	72.32	2.03	100.00
Sumatera Barat	20.28	10.21	24.25	44.57	0.68	100.00
Riau	6.63	6.56	17.39	67.19	2.23	100.00
Jambi	11.17	9.01	21.69	56.49	1.65	100.00
Sumatera Selatan	9.95	3.00	20.54	65.65	0.86	100.00
Bengkulu	10.00	3.58	19.55	65.94	0.93	100.00
Lampung	3.00	2.10	12.59	79.83	2.48	100.00
Kepulauan Bangka Belitung	9.03	2.23	24.33	63.30	1.11	100.00
Kepulauan Riau	1.42	0.48	11.89	82.57	3.64	100.00
DKI Jakarta	2.09	4.60	20.65	71.61	1.04	100.00
Jawa Barat	25.24	6.94	21.24	45.32	1.26	100.00
Jawa Tengah	21.60	3.58	14.07	59.30	1.45	100.00
DI Yogyakarta	4.63	0.87	12.30	79.37	2.84	100.00
Jawa Timur	13.46	5.51	18.67	60.20	2.15	100.00
Banten	12.71	11.73	25.46	48.92	1.18	100.00
Bali	9.55	3.61	15.36	68.75	2.72	100.00
Nusa Tenggara Barat	17.09	16.59	27.12	37.40	1.80	100.00
Nusa Tenggara Timur	7.23	3.44	9.43	75.28	4.62	100.00
Kalimantan Barat	2.82	2.58	9.57	80.46	4.57	100.00
Kalimantan Tengah	4.33	0.96	6.01	82.96	5.74	100.00
Kalimantan Selatan	17.42	7.43	17.11	56.45	1.59	100.00
Kalimantan Timur	9.08	2.31	10.80	73.67	4.14	100.00
Sulawesi Utara	2.19	1.51	6.67	83.56	6.08	100.00
Sulawesi Tengah	8.08	1.21	5.14	80.78	4.79	100.00
Sulawesi Selatan	18.86	5.72	11.93	60.38	3.11	100.00
Sulawesi Tenggara	16.55	3.81	16.15	59.76	3.73	100.00
Gorontalo	17.75	7.21	19.56	53.42	2.06	100.00
Sulawesi Barat	10.89	6.42	15.82	63.34	3.52	100.00
Maluku	7.51	3.36	9.10	72.84	7.19	100.00
Maluku Utara	8.24	4.59	10.92	65.99	10.27	100.00
Papua Barat	1.25	1.70	10.71	76.95	9.39	100.00
Papua	11.58	4.49	21.05	58.69	4.18	100.00
Indonesia	14.82	5.59	17.87	59.59	2.13	100.00

Sumber/Source: *Susenas*, 2012

Lampiran : 7.1.
Appendix

Percentase Rumah Tangga Menurut Provinsi dan Tanggapan Terhadap Kegiatan di Lingkungan Tempat Tinggal oleh Sekelompok Orang dari Agama Lain, 2012
Percentage of Households By Province and Response to Activities in The Neighbourhood By a Group of People from Other Religions, 2012

Provinsi Province	Tanggapan/ Responses					Kota / Urban
	Tidak Ada No Activity	Tidak Senang Unhappy	Kurang Senang Less Happy	Senang Happy	Sangat Senang Very Happy	Jumlah Total
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Aceh	13.30	15.52	31.30	33.63	6.24	100.00
Sumatera Utara	3.81	2.97	12.85	79.14	1.24	100.00
Sumatera Barat	20.57	3.86	22.87	52.51	0.19	100.00
Riau	1.18	2.12	13.73	81.03	1.93	100.00
Jambi	10.17	2.59	15.48	69.77	1.99	100.00
Sumatera Selatan	7.69	2.76	16.54	72.04	0.97	100.00
Bengkulu	5.78	2.47	26.54	64.98	0.24	100.00
Lampung	3.03	1.21	12.08	80.76	2.92	100.00
Kepulauan Bangka Belitung	2.49	1.01	24.16	71.49	0.85	100.00
Kepulauan Riau	0.00	0.31	12.28	83.94	3.47	100.00
DKI Jakarta	2.09	4.60	20.65	71.61	1.04	100.00
Jawa Barat	14.78	6.20	21.61	55.77	1.63	100.00
Jawa Tengah	13.57	2.27	11.79	71.04	1.33	100.00
DI Yogyakarta	5.11	0.68	11.06	81.70	1.46	100.00
Jawa Timur	6.38	3.60	16.47	70.41	3.14	100.00
Banten	8.99	11.48	20.12	57.64	1.76	100.00
Bali	1.03	1.60	12.61	80.92	3.85	100.00
Nusa Tenggara Barat	11.33	12.98	29.63	43.56	2.50	100.00
Nusa Tenggara Timur	2.41	0.56	4.31	85.95	6.77	100.00
Kalimantan Barat	1.82	1.30	10.52	80.21	6.14	100.00
Kalimantan Tengah	2.76	1.01	6.43	84.83	4.97	100.00
Kalimantan Selatan	10.34	7.31	14.21	66.45	1.70	100.00
Kalimantan Timur	8.17	3.11	10.70	76.34	1.68	100.00
Sulawesi Utara	0.00	1.09	1.55	90.92	6.44	100.00
Sulawesi Tengah	0.00	1.97	4.48	91.72	1.83	100.00
Sulawesi Selatan	2.22	3.95	12.01	77.74	4.08	100.00
Sulawesi Tenggara	9.65	0.47	12.38	72.96	4.54	100.00
Gorontalo	23.29	5.40	15.32	50.81	5.18	100.00
Sulawesi Barat	13.73	0.00	14.30	70.18	1.79	100.00
Maluku	2.72	0.54	4.87	85.86	6.01	100.00
Maluku Utara	6.32	1.34	4.90	79.44	8.00	100.00
Papua Barat	0.00	2.31	9.75	76.45	11.49	100.00
Papua	2.91	0.57	4.31	86.49	5.72	100.00
Indonesia	8.91	4.51	16.87	67.53	2.18	100.00

Sumber/Source: Susenas, 2012

Lampiran : 7.2.
Appendix

Percentase Rumah Tangga Menurut Provinsi dan Tanggapan Terhadap Kegiatan di Lingkungan Tempat Tinggal oleh Sekelompok Orang dari Agama Lain, 2012

Percentage of Households By Province and Response to Activities in The Neighbourhood By a Group of People from Other Religions, 2012

Provinsi Province	Tanggapan/ Responses					Desa / Rural
	Tidak Ada No Activity	Tidak Senang Unhappy	Kurang Senang Less Happy	Senang Happy	Sangat Senang Very Happy	Jumlah Total
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Aceh	19.44	19.53	31.82	26.58	2.63	100.00
Sumatera Utara	7.86	2.43	20.96	65.97	2.77	100.00
Sumatera Barat	20.11	14.16	25.11	39.64	0.98	100.00
Riau	10.01	9.31	19.65	58.60	2.42	100.00
Jambi	11.58	11.67	24.26	50.99	1.51	100.00
Sumatera Selatan	11.08	3.12	22.54	62.46	0.81	100.00
Bengkulu	11.92	4.08	16.38	66.38	1.24	100.00
Lampung	3.00	2.38	12.75	79.54	2.34	100.00
Kepulauan Bangka Belitung	15.28	3.40	24.48	55.48	1.36	100.00
Kepulauan Riau	8.33	1.28	10.01	75.92	4.47	100.00
DKI Jakarta	-	-	-	-	-	-
Jawa Barat	44.25	8.29	20.56	26.32	0.57	100.00
Jawa Tengah	28.13	4.65	15.93	49.74	1.55	100.00
DI Yogyakarta	3.61	1.26	14.93	74.46	5.73	100.00
Jawa Timur	19.66	7.19	20.61	51.25	1.29	100.00
Banten	20.11	12.21	36.07	31.57	0.03	100.00
Bali	22.74	6.73	19.62	49.94	0.97	100.00
Nusa Tenggara Barat	21.06	19.07	25.39	33.16	1.32	100.00
Nusa Tenggara Timur	8.36	4.12	10.62	72.78	4.11	100.00
Kalimantan Barat	3.21	3.09	9.20	80.55	3.95	100.00
Kalimantan Tengah	5.13	0.93	5.80	82.01	6.13	100.00
Kalimantan Selatan	22.58	7.52	19.22	49.17	1.51	100.00
Kalimantan Timur	10.53	1.02	10.96	69.41	8.08	100.00
Sulawesi Utara	4.13	1.88	11.22	77.02	5.76	100.00
Sulawesi Tengah	10.58	0.97	5.35	77.40	5.71	100.00
Sulawesi Selatan	28.29	6.72	11.89	50.54	2.56	100.00
Sulawesi Tenggara	19.07	5.03	17.53	54.93	3.43	100.00
Gorontalo	15.01	8.11	21.65	54.71	0.51	100.00
Sulawesi Barat	10.05	8.33	16.27	61.32	4.04	100.00
Maluku	10.42	5.07	11.66	64.94	7.90	100.00
Maluku Utara	8.96	5.81	13.19	60.93	11.12	100.00
Papua Barat	1.73	1.46	11.08	77.15	8.58	100.00
Papua	14.30	5.72	26.29	49.99	3.70	100.00
Indonesia	20.58	6.64	18.86	51.84	2.08	100.00

Sumber/Source: Susenas, 2012

Persentase Rumah Tangga Menurut Provinsi dan Banyaknya Organisasi/Kelompok yang Diikuti di Lingkungan Tempat Tinggal, 2012
Percentage of Households By Province and Number of Organizations/Groups That Followed in The Neighbourhood, 2012

Provinsi Province	Kota+Desa / Urban+Rural				
	Banyaknya Organisasi/Kelompok Number of Organizations/Groups				Jumlah Total
	Tidak Ada No	1	2 - 3	Lebih dari 3 More than 3	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Aceh	66.55	17.85	12.46	3.14	100.00
Sumatera Utara	47.89	26.05	20.63	5.43	100.00
Sumatera Barat	61.09	21.46	11.82	5.63	100.00
Riau	45.29	26.76	20.27	7.69	100.00
Jambi	41.23	29.25	25.00	4.52	100.00
Sumatera Selatan	65.94	19.24	11.77	3.04	100.00
Bengkulu	59.58	22.57	13.70	4.15	100.00
Lampung	56.87	24.68	14.28	4.16	100.00
Kepulauan Bangka Belitung	70.71	17.65	6.77	4.87	100.00
Kepulauan Riau	57.81	21.23	16.47	4.48	100.00
DKI Jakarta	70.11	17.53	9.44	2.92	100.00
Jawa Barat	74.36	13.54	8.12	3.99	100.00
Jawa Tengah	43.46	24.95	25.11	6.49	100.00
DI Yogyakarta	20.61	28.32	38.69	12.39	100.00
Jawa Timur	42.90	28.43	23.67	5.01	100.00
Banten	70.64	16.10	8.97	4.29	100.00
Bali	33.02	29.34	29.01	8.63	100.00
Nusa Tenggara Barat	61.51	21.26	13.36	3.86	100.00
Nusa Tenggara Timur	54.07	24.37	15.78	5.78	100.00
Kalimantan Barat	59.34	21.35	15.24	4.07	100.00
Kalimantan Tengah	58.65	23.88	13.03	4.44	100.00
Kalimantan Selatan	57.63	19.25	18.27	4.85	100.00
Kalimantan Timur	59.25	22.04	14.56	4.15	100.00
Sulawesi Utara	25.03	27.81	33.87	13.29	100.00
Sulawesi Tengah	65.65	17.87	10.10	6.37	100.00
Sulawesi Selatan	70.52	17.39	9.47	2.62	100.00
Sulawesi Tenggara	69.45	16.96	10.28	3.32	100.00
Gorontalo	64.40	22.56	9.97	3.08	100.00
Sulawesi Barat	68.13	15.84	7.16	8.87	100.00
Maluku	58.74	23.45	13.54	4.26	100.00
Maluku Utara	65.59	19.00	9.22	6.19	100.00
Papua Barat	56.57	23.86	15.58	3.99	100.00
Papua	60.74	19.50	13.06	6.70	100.00
Indonesia	56.44	21.73	16.79	5.04	100.00

Sumber/Source: Susenas, 2012

Persentase Rumah Tangga Menurut Provinsi dan Banyaknya Organisasi/Kelompok yang Diikuti di Lingkungan Tempat Tinggal, 2012
Percentage of Households By Province and Number of Organizations/Groups That Followed in The Neighbourhood, 2012

Provinsi Province	Banyaknya Organisasi/Kelompok <i>Number of Organizations/Groups</i>				Jumlah Total
	Tidak Ada No	1	2 - 3	Lebih dari 3 <i>More than 3</i>	
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Aceh	68.44	14.37	14.31	2.87	100.00
Sumatera Utara	51.46	21.07	22.42	5.05	100.00
Sumatera Barat	61.67	19.02	13.44	5.88	100.00
Riau	48.40	25.82	18.44	7.35	100.00
Jambi	42.48	26.86	27.22	3.45	100.00
Sumatera Selatan	64.92	19.34	12.02	3.71	100.00
Bengkulu	56.64	23.24	15.62	4.50	100.00
Lampung	46.64	27.84	21.37	4.14	100.00
Kepulauan Bangka Belitung	71.46	17.93	5.65	4.96	100.00
Kepulauan Riau	58.37	20.20	18.10	3.33	100.00
DKI Jakarta	70.11	17.53	9.44	2.92	100.00
Jawa Barat	70.59	14.99	9.52	4.90	100.00
Jawa Tengah	41.52	25.13	26.38	6.97	100.00
DI Yogyakarta	20.34	27.88	41.50	10.28	100.00
Jawa Timur	39.14	28.14	27.62	5.10	100.00
Banten	66.55	18.02	9.73	5.69	100.00
Bali	39.82	29.61	24.81	5.76	100.00
Nusa Tenggara Barat	60.24	21.83	12.97	4.96	100.00
Nusa Tenggara Timur	45.81	28.01	18.89	7.29	100.00
Kalimantan Barat	58.66	26.15	13.58	1.61	100.00
Kalimantan Tengah	48.78	27.38	19.57	4.27	100.00
Kalimantan Selatan	69.23	15.13	12.85	2.79	100.00
Kalimantan Timur	62.32	19.79	14.60	3.29	100.00
Sulawesi Utara	25.31	26.79	34.77	13.12	100.00
Sulawesi Tengah	61.89	18.75	9.34	10.02	100.00
Sulawesi Selatan	64.44	20.11	11.91	3.54	100.00
Sulawesi Tenggara	63.13	25.01	8.41	3.45	100.00
Gorontalo	59.01	27.97	8.76	4.26	100.00
Sulawesi Barat	83.19	9.46	4.53	2.81	100.00
Maluku	61.89	20.25	12.14	5.72	100.00
Maluku Utara	72.90	17.47	8.80	0.83	100.00
Papua Barat	54.98	25.83	15.55	3.64	100.00
Papua	49.00	26.17	17.81	7.03	100.00
Indonesia	55.95	21.25	17.62	5.18	100.00

Sumber/Source: Susenas, 2012

Persentase Rumah Tangga Menurut Provinsi dan Banyaknya Organisasi/Kelompok yang Diikuti di Lingkungan Tempat Tinggal, 2012
Percentage of Households By Province and Number of Organizations/Groups That Followed in The Neighbourhood, 2012

Provinsi Province	Desa / Rural				
	Banyaknya Organisasi/Kelompok Number of Organizations/Groups				Jumlah Total
	Tidak Ada No	1	2 - 3	Lebih dari 3 More than 3	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Aceh	65.81	19.21	11.73	3.24	100.00
Sumatera Utara	44.56	30.69	18.96	5.79	100.00
Sumatera Barat	60.72	22.98	10.82	5.48	100.00
Riau	43.36	27.34	21.40	7.89	100.00
Jambi	40.71	30.25	24.08	4.96	100.00
Sumatera Selatan	66.45	19.19	11.65	2.71	100.00
Bengkulu	60.91	22.27	12.84	3.98	100.00
Lampung	60.10	23.69	12.04	4.17	100.00
Kepulauan Bangka Belitung	70.00	17.38	7.84	4.79	100.00
Kepulauan Riau	55.12	26.26	8.54	10.08	100.00
DKI Jakarta	-	-	-	-	-
Jawa Barat	81.20	10.89	5.58	2.33	100.00
Jawa Tengah	45.03	24.81	24.07	6.09	100.00
DI Yogyakarta	21.17	29.24	32.77	16.83	100.00
Jawa Timur	46.19	28.68	20.20	4.93	100.00
Banten	78.77	12.27	7.46	1.50	100.00
Bali	22.50	28.93	35.51	13.06	100.00
Nusa Tenggara Barat	62.39	20.86	13.63	3.11	100.00
Nusa Tenggara Timur	56.00	23.51	15.06	5.43	100.00
Kalimantan Barat	59.61	19.46	15.89	5.04	100.00
Kalimantan Tengah	63.66	22.11	9.71	4.53	100.00
Kalimantan Selatan	49.17	22.26	22.22	6.35	100.00
Kalimantan Timur	54.36	25.63	14.49	5.52	100.00
Sulawesi Utara	24.77	28.71	33.07	13.45	100.00
Sulawesi Tengah	66.82	17.60	10.34	5.24	100.00
Sulawesi Selatan	73.96	15.85	8.09	2.10	100.00
Sulawesi Tenggara	71.75	14.02	10.96	3.27	100.00
Gorontalo	67.06	19.89	10.56	2.50	100.00
Sulawesi Barat	63.66	17.73	7.94	10.67	100.00
Maluku	56.84	25.39	14.39	3.38	100.00
Maluku Utara	62.84	19.57	9.38	8.21	100.00
Papua Barat	57.19	23.10	15.59	4.13	100.00
Papua	64.41	17.42	11.58	6.60	100.00
Indonesia	56.92	22.21	15.97	4.90	100.00

Sumber/Source: Susenas, 2012

**Percentase Rumah Tangga Menurut Provinsi dan Kesiapan Membantu
Orang Lain yang Membutuhkan Pertolongan di Lingkungan Tempat
Tinggal, 2012**
Appendix *Percentage of Households By Province and Readiness of Helping
Others That Need Help in The Neighbourhood, 2012*

Provinsi <i>Province</i>	Tingkat Kesiapan / <i>Level of Readiness</i>				Jumlah <i>Total</i>
	Tidak Siap <i>Not Ready</i>	Tidak Pasti <i>Uncertain</i>	Siap <i>Ready</i>	Sangat Siap <i>Very Ready</i>	
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Aceh	1.34	13.78	73.10	11.77	100.00
Sumatera Utara	1.22	15.57	75.00	8.21	100.00
Sumatera Barat	0.69	9.32	80.18	9.80	100.00
Riau	1.08	11.18	76.90	10.85	100.00
Jambi	1.51	17.28	74.58	6.64	100.00
Sumatera Selatan	0.77	14.04	76.90	8.30	100.00
Bengkulu	1.82	14.13	74.31	9.74	100.00
Lampung	0.37	10.24	78.23	11.17	100.00
Kepulauan Bangka Belitung	0.83	11.51	80.56	7.09	100.00
Kepulauan Riau	1.06	10.42	78.09	10.43	100.00
DKI Jakarta	0.56	13.25	75.29	10.90	100.00
Jawa Barat	1.37	13.11	78.10	7.42	100.00
Jawa Tengah	1.05	7.70	78.60	12.65	100.00
DI Yogyakarta	0.43	7.69	79.16	12.72	100.00
Jawa Timur	0.93	9.54	77.37	12.15	100.00
Banten	0.45	7.92	83.30	8.32	100.00
Bali	0.47	7.48	80.03	12.02	100.00
Nusa Tenggara Barat	1.67	14.68	74.13	9.52	100.00
Nusa Tenggara Timur	0.94	11.30	71.35	16.41	100.00
Kalimantan Barat	1.37	12.68	77.13	8.81	100.00
Kalimantan Tengah	0.51	11.05	78.84	9.60	100.00
Kalimantan Selatan	1.18	13.91	75.51	9.40	100.00
Kalimantan Timur	1.24	8.86	74.94	14.97	100.00
Sulawesi Utara	0.23	6.50	75.92	17.35	100.00
Sulawesi Tengah	0.21	8.60	79.38	11.82	100.00
Sulawesi Selatan	0.56	11.96	70.61	16.87	100.00
Sulawesi Tenggara	1.35	8.49	73.46	16.69	100.00
Gorontalo	0.17	3.66	84.85	11.33	100.00
Sulawesi Barat	1.14	10.10	71.22	17.55	100.00
Maluku	0.76	10.71	70.90	17.62	100.00
Maluku Utara	0.66	15.90	64.55	18.90	100.00
Papua Barat	0.50	13.83	70.16	15.51	100.00
Papua	2.26	19.78	68.33	9.63	100.00
Indonesia	1.01	11.13	77.08	10.78	100.00

Sumber/Source: *Susenas*, 2012

**Percentase Rumah Tangga Menurut Provinsi dan Kesiapan Membantu
Orang Lain yang Membutuhkan Pertolongan di Lingkungan Tempat**

Lampiran : 9.1. Tinggal, 2012

**Appendix Percentage of Households By Province and Readiness of Helping
Others That Need Help in The Neighbourhood, 2012**

Provinsi <i>Province</i>	Tingkat Kesiapan / <i>Level of Readiness</i>				Jumlah <i>Total</i>
	Tidak Siap <i>Not Ready</i>	Tidak Pasti <i>Uncertain</i>	Siap <i>Ready</i>	Sangat Siap <i>Very Ready</i>	
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Aceh	0.67	13.91	72.93	12.49	100.00
Sumatera Utara	1.33	15.34	75.51	7.82	100.00
Sumatera Barat	0.47	9.26	78.94	11.33	100.00
Riau	0.87	10.59	76.16	12.37	100.00
Jambi	2.14	16.84	73.38	7.65	100.00
Sumatera Selatan	0.61	12.63	78.46	8.31	100.00
Bengkulu	1.50	15.98	69.99	12.52	100.00
Lampung	0.01	10.45	74.16	15.38	100.00
Kepulauan Bangka Belitung	0.10	15.05	79.97	4.89	100.00
Kepulauan Riau	0.59	8.64	80.47	10.30	100.00
DKI Jakarta	0.56	13.25	75.29	10.90	100.00
Jawa Barat	1.47	13.07	79.14	6.33	100.00
Jawa Tengah	0.99	8.54	79.04	11.44	100.00
DI Yogyakarta	0.49	8.10	79.31	12.11	100.00
Jawa Timur	0.84	9.08	78.54	11.55	100.00
Banten	0.47	9.58	83.20	6.76	100.00
Bali	0.33	7.98	77.67	14.01	100.00
Nusa Tenggara Barat	1.87	13.07	76.78	8.28	100.00
Nusa Tenggara Timur	1.51	7.87	74.37	16.25	100.00
Kalimantan Barat	2.15	14.58	71.33	11.94	100.00
Kalimantan Tengah	0.74	14.59	76.64	8.03	100.00
Kalimantan Selatan	1.04	18.34	72.55	8.08	100.00
Kalimantan Timur	1.64	9.75	74.47	14.15	100.00
Sulawesi Utara	0.32	4.52	75.27	19.89	100.00
Sulawesi Tengah	0.22	8.80	84.46	6.51	100.00
Sulawesi Selatan	0.63	12.77	72.50	14.11	100.00
Sulawesi Tenggara	1.26	9.41	74.59	14.74	100.00
Gorontalo	0.00	3.25	81.83	14.92	100.00
Sulawesi Barat	1.47	7.23	73.28	18.01	100.00
Maluku	0.58	9.36	75.78	14.27	100.00
Maluku Utara	0.09	18.17	62.10	19.63	100.00
Papua Barat	1.05	24.51	60.84	13.60	100.00
Papua	0.74	14.60	74.90	9.76	100.00
Indonesia	0.99	11.29	77.85	9.86	100.00

Sumber/Source: *Susenas*, 2012

Percentase Rumah Tangga Menurut Provinsi dan Kesiapan Membantu Orang Lain yang Membutuhkan Pertolongan di Lingkungan Tempat

Lampiran : 9.2. Tinggal, 2012

Appendix Percentage of Households By Province and Readiness of Helping Others That Need Help in The Neighbourhood, 2012

Provinsi Province	Tingkat Kesiapan / Level of Readiness				Jumlah Total	
	Tidak Siap <i>Not Ready</i>	Tidak Pasti <i>Uncertain</i>	Siap <i>Ready</i>	Sangat Siap <i>Very Ready</i>		
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Aceh	1.60	13.73	73.17	11.49	100.00	
Sumatera Utara	1.12	15.79	74.52	8.57	100.00	
Sumatera Barat	0.83	9.36	80.96	8.85	100.00	
Riau	1.20	11.54	77.36	9.90	100.00	
Jambi	1.25	17.46	75.07	6.22	100.00	
Sumatera Selatan	0.85	14.74	76.12	8.29	100.00	
Bengkulu	1.96	13.30	76.26	8.48	100.00	
Lampung	0.48	10.17	79.51	9.84	100.00	
Kepulauan Bangka Belitung	1.54	8.14	81.13	9.20	100.00	
Kepulauan Riau	3.36	19.05	66.49	11.10	100.00	
DKI Jakarta	-	-	-	-	-	
Jawa Barat	1.18	13.19	76.22	9.40	100.00	
Jawa Tengah	1.09	7.02	78.25	13.64	100.00	
DI Yogyakarta	0.30	6.82	78.86	14.02	100.00	
Jawa Timur	1.01	9.95	76.35	12.68	100.00	
Banten	0.43	4.63	83.52	11.43	100.00	
Bali	0.68	6.70	83.68	8.94	100.00	
Nusa Tenggara Barat	1.54	15.79	72.30	10.37	100.00	
Nusa Tenggara Timur	0.81	12.10	70.64	16.44	100.00	
Kalimantan Barat	1.06	11.93	79.42	7.58	100.00	
Kalimantan Tengah	0.39	9.25	79.95	10.40	100.00	
Kalimantan Selatan	1.28	10.68	77.67	10.37	100.00	
Kalimantan Timur	0.59	7.43	75.69	16.29	100.00	
Sulawesi Utara	0.15	8.26	76.50	15.09	100.00	
Sulawesi Tengah	0.20	8.54	77.81	13.45	100.00	
Sulawesi Selatan	0.53	11.50	69.54	18.44	100.00	
Sulawesi Tenggara	1.39	8.16	73.04	17.41	100.00	
Gorontalo	0.25	3.86	86.34	9.55	100.00	
Sulawesi Barat	1.04	10.95	70.60	17.41	100.00	
Maluku	0.87	11.53	67.95	19.65	100.00	
Maluku Utara	0.87	15.04	65.46	18.63	100.00	
Papua Barat	0.28	9.68	73.78	16.26	100.00	
Papua	2.73	21.40	66.28	9.59	100.00	
Indonesia	1.02	10.96	76.33	11.69	100.00	

Sumber/Source: Susenas, 2012

Lampiran : 10.
Appendix

**Percentase Rumah Tangga Menurut Provinsi dan Persepsi Kemudahan Mendapatkan Pertolongan* dari Tetangga, 2012
Percentage of Households By Province and Perception of Getting Help from Neighbours, 2012**

Provinsi Province	Tingkat Kemudahan / Level of Easiness					Jumlah Total
	Sangat Sulit Very Difficult	Tidak Pasti Uncertain	Mudah Easy	Sangat Mudah Very Easy		
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Aceh	4.67	37.20	50.16	7.97	100.00	
Sumatera Utara	6.25	36.15	51.81	5.79	100.00	
Sumatera Barat	6.33	27.93	58.38	7.36	100.00	
Riau	4.79	33.74	53.16	8.31	100.00	
Jambi	3.56	35.65	56.31	4.48	100.00	
Sumatera Selatan	3.66	27.68	60.31	8.34	100.00	
Bengkulu	2.74	32.18	57.75	7.32	100.00	
Lampung	5.18	28.67	58.52	7.63	100.00	
Kepulauan Bangka Belitung	3.45	29.74	60.71	6.10	100.00	
Kepulauan Riau	5.78	39.71	45.34	9.17	100.00	
DKI Jakarta	7.47	36.96	51.49	4.08	100.00	
Jawa Barat	5.51	35.45	52.29	6.75	100.00	
Jawa Tengah	4.40	23.62	60.68	11.31	100.00	
DI Yogyakarta	3.10	25.33	59.95	11.62	100.00	
Jawa Timur	4.19	29.17	56.62	10.02	100.00	
Banten	10.71	35.24	47.75	6.30	100.00	
Bali	3.87	23.76	61.34	11.02	100.00	
Nusa Tenggara Barat	4.95	33.58	53.26	8.21	100.00	
Nusa Tenggara Timur	9.50	35.00	43.19	12.31	100.00	
Kalimantan Barat	4.44	26.13	58.29	11.14	100.00	
Kalimantan Tengah	4.71	28.28	56.46	10.54	100.00	
Kalimantan Selatan	5.20	34.24	53.18	7.38	100.00	
Kalimantan Timur	5.65	36.24	48.34	9.76	100.00	
Sulawesi Utara	4.34	28.64	57.22	9.80	100.00	
Sulawesi Tengah	8.24	33.64	49.76	8.36	100.00	
Sulawesi Selatan	5.47	33.30	50.71	10.51	100.00	
Sulawesi Tenggara	7.42	30.94	51.63	10.02	100.00	
Gorontalo	6.50	21.40	60.74	11.36	100.00	
Sulawesi Barat	8.09	33.58	49.88	8.44	100.00	
Maluku	8.85	37.73	42.89	10.53	100.00	
Maluku Utara	6.33	46.83	38.14	8.70	100.00	
Papua Barat	7.38	48.53	37.41	6.68	100.00	
Papua	6.92	43.08	43.97	6.02	100.00	
Indonesia	5.38	31.54	54.51	8.56	100.00	

* Pertolongan jika sedang mengalami masalah keuangan / Help if you are experiencing financial problems

Sumber/Source: Susenas, 2012

Lampiran : 10.1.
Appendix

Percentase Rumah Tangga Menurut Provinsi dan Kemudahan Mendapatkan Pertolongan* dari Tetangga, 2012
Percentage of Households By Province and Perception of Getting Help from Neighbours, 2012

Provinsi Province	Tingkat Kemudahan / Level of Easiness				Jumlah Total	Kota / Urban
	Sangat Sulit <i>Very Difficult</i>	Tidak Pasti <i>Uncertain</i>	Mudah <i>Easy</i>	Sangat Mudah <i>Very Easy</i>		
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Aceh	5.42	37.89	48.65	8.04	100.00	
Sumatera Utara	7.50	39.98	48.06	4.46	100.00	
Sumatera Barat	5.35	30.36	57.41	6.88	100.00	
Riau	5.45	37.60	47.90	9.04	100.00	
Jambi	3.34	40.08	51.86	4.72	100.00	
Sumatera Selatan	5.46	28.23	58.30	8.00	100.00	
Bengkulu	2.25	38.49	53.05	6.21	100.00	
Lampung	9.97	30.80	54.11	5.11	100.00	
Kepulauan Bangka Belitung	3.06	30.11	62.11	4.72	100.00	
Kepulauan Riau	5.73	42.41	43.58	8.28	100.00	
DKI Jakarta	7.47	36.96	51.49	4.08	100.00	
Jawa Barat	5.44	36.45	52.52	5.59	100.00	
Jawa Tengah	5.11	26.33	58.59	9.97	100.00	
DI Yogyakarta	3.91	27.13	57.77	11.19	100.00	
Jawa Timur	5.08	29.63	56.02	9.27	100.00	
Banten	11.48	35.01	48.24	5.27	100.00	
Bali	4.50	29.11	54.05	12.34	100.00	
Nusa Tenggara Barat	5.62	40.17	47.90	6.31	100.00	
Nusa Tenggara Timur	7.90	31.37	47.53	13.20	100.00	
Kalimantan Barat	4.07	28.75	60.23	6.95	100.00	
Kalimantan Tengah	7.20	31.43	52.74	8.63	100.00	
Kalimantan Selatan	5.26	39.98	48.06	6.70	100.00	
Kalimantan Timur	5.56	36.18	48.62	9.64	100.00	
Sulawesi Utara	6.27	26.90	57.95	8.88	100.00	
Sulawesi Tengah	8.82	38.58	45.39	7.21	100.00	
Sulawesi Selatan	5.67	36.52	49.64	8.17	100.00	
Sulawesi Tenggara	5.00	35.19	50.48	9.33	100.00	
Gorontalo	5.35	19.26	61.19	14.21	100.00	
Sulawesi Barat	9.25	34.70	50.77	5.29	100.00	
Maluku	6.26	35.07	46.54	12.13	100.00	
Maluku Utara	6.78	49.20	32.64	11.38	100.00	
Papua Barat	5.45	58.18	27.67	8.70	100.00	
Papua	6.49	39.51	46.77	7.24	100.00	
Indonesia	5.99	33.56	53.11	7.35	100.00	

* Pertolongan jika sedang mengalami masalah keuangan / Help if you are experiencing financial problems

Sumber/Source: Susenas, 2012

Percentase Rumah Tangga Menurut Provinsi dan Kemudahan Mendapatkan
Pertolongan* dari Tetangga, 2012
*Percentage of Households By Province and Perception of Getting Help from
Neighbours, 2012*

Provinsi Province	Tingkat Kemudahan / Level of Easiness				Desa / Rural
	Sangat Sulit <i>Very Difficult</i>	Tidak Pasti <i>Uncertain</i>	Mudah <i>Easy</i>	Sangat Mudah <i>Very Easy</i>	Jumlah <i>Total</i>
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Aceh	4.38	36.93	50.75	7.95	100.00
Sumatera Utara	5.08	32.59	55.30	7.04	100.00
Sumatera Barat	6.95	26.41	58.98	7.66	100.00
Riau	4.37	31.34	56.43	7.86	100.00
Jambi	3.65	33.81	58.16	4.38	100.00
Sumatera Selatan	2.76	27.41	61.32	8.51	100.00
Bengkulu	2.96	29.33	59.88	7.83	100.00
Lampung	3.67	27.99	59.91	8.42	100.00
Kepulauan Bangka Belitung	3.83	29.39	59.37	7.42	100.00
Kepulauan Riau	6.03	26.60	53.89	13.49	100.00
DKI Jakarta	-	-	-	-	-
Jawa Barat	5.65	33.65	51.85	8.86	100.00
Jawa Tengah	3.82	21.41	62.38	12.39	100.00
DI Yogyakarta	1.40	21.54	64.55	12.52	100.00
Jawa Timur	3.40	28.76	57.16	10.69	100.00
Banten	9.19	35.69	46.80	8.33	100.00
Bali	2.91	15.50	72.62	8.97	100.00
Nusa Tenggara Barat	4.49	29.03	56.96	9.52	100.00
Nusa Tenggara Timur	9.88	35.85	42.17	12.10	100.00
Kalimantan Barat	4.59	25.09	57.53	12.80	100.00
Kalimantan Tengah	3.45	26.69	58.35	11.51	100.00
Kalimantan Selatan	5.16	30.05	56.92	7.87	100.00
Kalimantan Timur	5.81	36.35	47.89	9.96	100.00
Sulawesi Utara	2.63	30.20	56.56	10.61	100.00
Sulawesi Tengah	8.07	32.11	51.10	8.72	100.00
Sulawesi Selatan	5.37	31.48	51.32	11.84	100.00
Sulawesi Tenggara	8.30	29.39	52.04	10.27	100.00
Gorontalo	7.06	22.46	60.52	9.96	100.00
Sulawesi Barat	7.75	33.25	49.62	9.38	100.00
Maluku	10.42	39.34	40.68	9.56	100.00
Maluku Utara	6.16	45.93	40.21	7.70	100.00
Papua Barat	8.13	44.78	41.19	5.89	100.00
Papua	7.06	44.20	43.10	5.64	100.00
Indonesia	4.80	29.56	55.89	9.75	100.00

* Pertolongan jika sedang mengalami masalah keuangan / Help if you are experiencing financial problems

Sumber/Source: *Susenas*, 2012

Percentase Rumah Tangga Menurut Provinsi dan Partisipasi dalam Kegiatan Bersama Untuk Membantu Warga yang Sedang Mengalami Musibah, 2012

Lampiran : 11.

Appendix

Percentage of Households By Province and Participation in Joint Activities to Help People Who are Experiencing Disasters, 2012

Provinsi Province	Tingkat Partisipasi / Level of Participation					Jumlah Total
	Tidak pernah <i>Never</i>	Jarang <i>Seldom</i>	Sering <i>Often</i>	Selalu <i>Always</i>		
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Aceh	2.34	18.99	64.00	14.67	100.00	
Sumatera Utara	3.14	30.38	57.96	8.52	100.00	
Sumatera Barat	1.96	25.31	59.76	12.97	100.00	
Riau	2.61	23.60	57.80	15.99	100.00	
Jambi	2.64	21.63	64.44	11.29	100.00	
Sumatera Selatan	2.73	23.29	62.82	11.17	100.00	
Bengkulu	1.71	18.34	68.09	11.86	100.00	
Lampung	2.11	22.17	61.38	14.33	100.00	
Kepulauan Bangka Belitung	3.66	29.84	59.21	7.29	100.00	
Kepulauan Riau	9.88	28.50	50.19	11.43	100.00	
DKI Jakarta	3.73	38.55	46.72	11.00	100.00	
Jawa Barat	3.43	33.60	53.64	9.32	100.00	
Jawa Tengah	2.48	17.87	60.87	18.77	100.00	
DI Yogyakarta	2.45	15.96	58.79	22.80	100.00	
Jawa Timur	2.14	22.43	57.96	17.48	100.00	
Banten	3.63	29.56	55.32	11.49	100.00	
Bali	5.10	20.71	56.00	18.19	100.00	
Nusa Tenggara Barat	2.83	21.95	60.79	14.43	100.00	
Nusa Tenggara Timur	3.41	18.37	53.54	24.67	100.00	
Kalimantan Barat	3.72	27.37	57.25	11.65	100.00	
Kalimantan Tengah	3.28	30.45	52.74	13.53	100.00	
Kalimantan Selatan	3.99	29.52	55.07	11.41	100.00	
Kalimantan Timur	4.75	33.32	49.80	12.13	100.00	
Sulawesi Utara	1.45	17.64	60.01	20.90	100.00	
Sulawesi Tengah	1.86	18.63	61.69	17.81	100.00	
Sulawesi Selatan	3.73	26.13	55.61	14.54	100.00	
Sulawesi Tenggara	3.11	23.46	51.10	22.32	100.00	
Gorontalo	3.25	20.49	58.18	18.07	100.00	
Sulawesi Barat	2.75	19.91	55.66	21.68	100.00	
Maluku	3.10	19.34	52.37	25.19	100.00	
Maluku Utara	2.07	23.69	49.28	24.96	100.00	
Papua Barat	5.45	28.01	49.31	17.23	100.00	
Papua	3.55	28.49	56.01	11.94	100.00	
Indonesia	3.00	25.66	57.01	14.33	100.00	

Sumber/Souce: Susenas, 2012

Percentase Rumah Tangga Menurut Provinsi dan Partisipasi dalam Kegiatan Bersama Untuk Membantu Warga yang Sedang Mengalami Musibah, 2012
Lampiran :11.1. Appendix *Percentage of Households By Province and Participation in Joint Activities to Help People Who are Experiencing Disasters, 2012*

Provinsi Province	Tingkat Partisipasi / Level of Participation					Jumlah Total
	Tidak pernah <i>Never</i>	Jarang <i>Seldom</i>	Sering <i>Often</i>	Selalu <i>Always</i>		
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Aceh	1.98	19.13	61.63	17.27	100.00	
Sumatera Utara	3.85	35.52	53.00	7.62	100.00	
Sumatera Barat	2.21	26.15	56.76	14.88	100.00	
Riau	2.50	27.82	52.18	17.50	100.00	
Jambi	4.34	24.58	61.00	10.09	100.00	
Sumatera Selatan	3.39	22.80	64.97	8.84	100.00	
Bengkulu	1.81	25.50	62.26	10.43	100.00	
Lampung	3.30	25.07	54.79	16.84	100.00	
Kepulauan Bangka Belitung	5.43	34.39	54.57	5.60	100.00	
Kepulauan Riau	11.53	29.27	48.74	10.46	100.00	
DKI Jakarta	3.73	38.55	46.72	11.00	100.00	
Jawa Barat	4.03	35.78	51.48	8.71	100.00	
Jawa Tengah	2.87	19.88	60.21	17.04	100.00	
DI Yogyakarta	3.12	17.19	57.58	22.11	100.00	
Jawa Timur	2.56	22.61	58.75	16.07	100.00	
Banten	4.71	31.55	53.69	10.05	100.00	
Bali	6.16	24.38	49.58	19.89	100.00	
Nusa Tenggara Barat	2.09	25.94	61.12	10.86	100.00	
Nusa Tenggara Timur	5.13	19.85	57.72	17.30	100.00	
Kalimantan Barat	5.37	34.42	48.34	11.87	100.00	
Kalimantan Tengah	5.06	40.89	46.85	7.20	100.00	
Kalimantan Selatan	6.84	39.85	45.18	8.13	100.00	
Kalimantan Timur	6.19	35.41	48.53	9.86	100.00	
Sulawesi Utara	2.22	19.44	59.99	18.35	100.00	
Sulawesi Tengah	3.10	25.01	56.22	15.68	100.00	
Sulawesi Selatan	6.19	27.27	52.12	14.42	100.00	
Sulawesi Tenggara	4.83	29.49	50.74	14.94	100.00	
Gorontalo	2.66	24.14	49.53	23.66	100.00	
Sulawesi Barat	4.02	29.91	51.55	14.52	100.00	
Maluku	2.31	23.32	55.63	18.74	100.00	
Maluku Utara	1.83	24.89	50.11	23.17	100.00	
Papua Barat	7.60	34.67	45.28	12.44	100.00	
Papua	4.59	38.15	44.25	13.01	100.00	
Indonesia	3.79	29.19	54.32	12.70	100.00	

Sumber/Source: Susenas, 2012

Percentase Rumah Tangga Menurut Provinsi dan Partisipasi dalam Kegiatan Bersama Untuk Membantu Warga yang Sedang Mengalami Musibah, 2012

Appendix *Percentage of Households By Province and Participation in Joint Activities to Help People Who are Experiencing Disasters, 2012*

Provinsi Province	Tingkat Partisipasi / Level of Participation					Jumlah Total
	Tidak pernah <i>Never</i>	Jarang <i>Seldom</i>	Sering <i>Often</i>	Selalu <i>Always</i>		
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Aceh	2.48	18.94	64.93	13.65	100.00	
Sumatera Utara	2.48	25.60	62.57	9.36	100.00	
Sumatera Barat	1.81	24.78	61.63	11.78	100.00	
Riau	2.68	20.98	61.29	15.05	100.00	
Jambi	1.94	20.41	65.86	11.79	100.00	
Sumatera Selatan	2.41	23.53	61.74	12.33	100.00	
Bengkulu	1.67	15.10	70.73	12.50	100.00	
Lampung	1.74	21.26	63.46	13.54	100.00	
Kepulauan Bangka Belitung	1.96	25.50	63.63	8.91	100.00	
Kepulauan Riau	1.85	24.74	57.27	16.15	100.00	
DKI Jakarta	-	-	-	-	-	
Jawa Barat	2.35	29.64	57.57	10.44	100.00	
Jawa Tengah	2.17	16.24	61.41	20.18	100.00	
DI Yogyakarta	1.04	13.38	61.34	24.24	100.00	
Jawa Timur	1.76	22.27	57.25	18.71	100.00	
Banten	1.49	25.61	58.56	14.34	100.00	
Bali	3.46	15.04	65.94	15.56	100.00	
Nusa Tenggara Barat	3.34	19.20	60.57	16.88	100.00	
Nusa Tenggara Timur	3.01	18.02	52.56	26.40	100.00	
Kalimantan Barat	3.08	24.59	60.76	11.57	100.00	
Kalimantan Tengah	2.38	25.16	55.73	16.74	100.00	
Kalimantan Selatan	1.92	21.99	62.28	13.80	100.00	
Kalimantan Timur	2.45	29.98	51.82	15.75	100.00	
Sulawesi Utara	0.76	16.04	60.03	23.17	100.00	
Sulawesi Tengah	1.48	16.66	63.39	18.47	100.00	
Sulawesi Selatan	2.33	25.48	57.58	14.60	100.00	
Sulawesi Tenggara	2.48	21.26	51.23	25.02	100.00	
Gorontalo	3.54	18.69	62.45	15.31	100.00	
Sulawesi Barat	2.38	16.94	56.87	23.81	100.00	
Maluku	3.58	16.92	50.40	29.11	100.00	
Maluku Utara	2.16	23.24	48.97	25.63	100.00	
Papua Barat	4.61	25.42	50.87	19.09	100.00	
Papua	3.23	25.47	59.69	11.61	100.00	
Indonesia	2.22	22.22	59.65	15.92	100.00	

Sumber/Source: Susenas, 2012

Percentase Rumah Tangga Menurut Provinsi dan Partisipasi dalam Kegiatan Bersama Untuk Kepentingan Umum, 2012
Percentage of Households By Province and Participation in Joint Activities for Public Interest, 2012

Provinsi Province	Tingkat Partisipasi / Level of Participations					Jumlah Total
	Tidak Ada No	Tidak Pernah Never	Jarang Seldom	Sering Often	Selalu Always	
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Aceh	3.58	8.91	35.45	45.93	6.12	100.00
Sumatera Utara	5.77	10.57	45.74	33.83	4.08	100.00
Sumatera Barat	3.18	5.14	41.04	44.61	6.03	100.00
Riau	3.93	6.62	34.41	46.08	8.95	100.00
Jambi	2.68	7.16	30.00	54.32	5.85	100.00
Sumatera Selatan	5.80	10.73	34.18	42.67	6.63	100.00
Bengkulu	6.01	7.91	31.71	49.47	4.90	100.00
Lampung	1.56	7.66	31.55	50.23	9.00	100.00
Kepulauan Bangka Belitung	10.36	12.87	46.55	27.53	2.69	100.00
Kepulauan Riau	9.70	11.78	31.93	37.77	8.82	100.00
DKI Jakarta	1.73	12.26	47.48	28.55	9.99	100.00
Jawa Barat	2.48	10.70	41.45	39.14	6.23	100.00
Jawa Tengah	2.07	8.05	25.96	49.71	14.20	100.00
DI Yogyakarta	0.55	10.40	19.98	51.14	17.92	100.00
Jawa Timur	3.50	9.63	33.96	42.62	10.29	100.00
Banten	3.96	9.37	38.05	41.47	7.16	100.00
Bali	1.99	8.91	23.56	53.52	12.01	100.00
Nusa Tenggara Barat	2.24	8.15	33.86	46.58	9.16	100.00
Nusa Tenggara Timur	4.65	4.39	22.64	47.75	20.57	100.00
Kalimantan Barat	3.01	7.70	35.28	46.84	7.17	100.00
Kalimantan Tengah	3.27	9.93	38.60	42.50	5.70	100.00
Kalimantan Selatan	7.46	12.20	38.27	37.73	4.34	100.00
Kalimantan Timur	6.55	10.08	39.26	38.66	5.46	100.00
Sulawesi Utara	0.38	5.14	28.28	53.35	12.85	100.00
Sulawesi Tengah	2.08	3.85	24.57	57.26	12.22	100.00
Sulawesi Selatan	4.85	11.27	36.52	39.83	7.53	100.00
Sulawesi Tenggara	2.14	9.48	29.43	43.09	15.86	100.00
Gorontalo	3.18	5.88	39.13	44.37	7.43	100.00
Sulawesi Barat	3.02	8.49	31.06	45.34	12.09	100.00
Maluku	4.60	2.74	24.31	49.87	18.47	100.00
Maluku Utara	1.27	4.70	23.93	51.46	18.64	100.00
Papua Barat	5.20	8.17	26.74	42.93	16.96	100.00
Papua	3.87	5.78	34.06	45.71	10.58	100.00
Indonesia	3.29	9.27	35.05	43.12	9.27	100.00

Sumber/Source: Susenas, 2012

Lampiran : 12.1
Appendix

Percentase Rumah Tangga Menurut Provinsi dan Partisipasi dalam Kegiatan Bersama Untuk Kepentingan Umum, 2012
Percentage of Households By Province and Participation in Joint Activities for Public Interest, 2012

Provinsi Province	Tingkat Partisipasi / Level of Participations					Jumlah Total
	Tidak Ada No	Tidak Pernah Never	Jarang Seldom	Sering Often	Selalu Always	
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Aceh	4.59	9.89	37.65	42.48	5.40	100.00
Sumatera Utara	5.97	12.48	48.96	29.51	3.08	100.00
Sumatera Barat	4.47	7.65	40.75	40.16	6.96	100.00
Riau	3.52	7.42	40.82	39.69	8.55	100.00
Jambi	7.18	10.99	39.05	38.68	4.10	100.00
Sumatera Selatan	7.65	16.58	32.78	35.13	7.86	100.00
Bengkulu	9.26	8.69	38.84	38.71	4.50	100.00
Lampung	3.91	11.29	37.74	38.64	8.41	100.00
Kepulauan Bangka Belitung	11.48	14.14	52.77	19.90	1.71	100.00
Kepulauan Riau	11.06	12.60	33.16	36.02	7.16	100.00
DKI Jakarta	1.73	12.26	47.48	28.55	9.99	100.00
Jawa Barat	3.06	11.71	42.76	36.15	6.31	100.00
Jawa Tengah	2.82	8.96	27.25	47.27	13.70	100.00
DI Yogyakarta	0.82	13.38	21.94	49.67	14.19	100.00
Jawa Timur	2.92	9.95	33.84	43.85	9.44	100.00
Banten	5.30	11.68	38.57	38.86	5.58	100.00
Bali	3.28	12.22	24.63	45.85	14.02	100.00
Nusa Tenggara Barat	1.85	8.09	41.37	42.59	6.09	100.00
Nusa Tenggara Timur	15.26	7.26	28.61	37.45	11.41	100.00
Kalimantan Barat	5.28	10.26	43.32	32.49	8.65	100.00
Kalimantan Tengah	8.02	14.26	45.40	29.43	2.90	100.00
Kalimantan Selatan	11.97	17.44	42.66	24.71	3.21	100.00
Kalimantan Timur	7.35	10.96	41.92	35.15	4.62	100.00
Sulawesi Utara	0.55	8.22	31.50	51.87	7.86	100.00
Sulawesi Tengah	6.98	8.76	30.83	44.55	8.88	100.00
Sulawesi Selatan	7.02	12.69	35.38	36.92	7.98	100.00
Sulawesi Tenggara	4.45	10.99	39.76	33.75	11.06	100.00
Gorontalo	3.75	7.54	44.12	37.75	6.84	100.00
Sulawesi Barat	7.60	13.53	40.88	34.79	3.20	100.00
Maluku	5.83	4.12	32.09	43.65	14.30	100.00
Maluku Utara	3.06	6.28	33.75	46.25	10.66	100.00
Papua Barat	13.18	11.37	35.13	33.99	6.32	100.00
Papua	7.41	11.94	40.64	31.80	8.22	100.00
Indonesia	3.96	11.06	37.93	38.72	8.32	100.00

Sumber/Source: Susenas, 2012

Lampiran : 12.2.
Appendix

Percentase Rumah Tangga Menurut Provinsi dan Partisipasi dalam Kegiatan Bersama Untuk Kepentingan Umum, 2012
Percentage of Households By Province and Participation in Joint Activities for Public Interest, 2012

Provinsi Province	Tingkat Partisipasi / Level of Participations					Desa / Rural
	Tidak Ada No	Tidak Pernah Never	Jarang Seldom	Sering Often	Selalu Always	Jumlah Total
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Aceh	3.19	8.53	34.59	47.28	6.40	100.00
Sumatera Utara	5.58	8.79	42.75	37.86	5.02	100.00
Sumatera Barat	2.38	3.57	41.23	47.37	5.45	100.00
Riau	4.19	6.13	30.43	50.05	9.20	100.00
Jambi	0.82	5.57	26.24	60.80	6.57	100.00
Sumatera Selatan	4.87	7.80	34.88	46.43	6.02	100.00
Bengkulu	4.53	7.56	28.48	54.34	5.08	100.00
Lampung	0.82	6.52	29.59	53.89	9.18	100.00
Kepulauan Bangka Belitung	9.28	11.66	40.61	34.82	3.63	100.00
Kepulauan Riau	3.05	7.78	25.97	46.32	16.88	100.00
DKI Jakarta	-	-	-	-	-	-
Jawa Barat	1.42	8.87	39.08	44.56	6.08	100.00
Jawa Tengah	1.46	7.31	24.91	51.70	14.61	100.00
DI Yogyakarta	0.00	4.14	15.87	54.23	25.77	100.00
Jawa Timur	4.00	9.35	34.07	41.54	11.03	100.00
Banten	1.28	4.77	37.02	46.64	10.29	100.00
Bali	0.00	3.79	21.92	65.38	8.91	100.00
Nusa Tenggara Barat	2.51	8.19	28.69	49.33	11.28	100.00
Nusa Tenggara Timur	2.17	3.72	21.24	50.16	22.71	100.00
Kalimantan Barat	2.12	6.68	32.11	52.50	6.59	100.00
Kalimantan Tengah	0.86	7.73	35.14	49.14	7.12	100.00
Kalimantan Selatan	4.17	8.39	35.07	47.22	5.15	100.00
Kalimantan Timur	5.26	8.66	35.00	44.26	6.82	100.00
Sulawesi Utara	0.23	2.40	25.42	54.66	17.29	100.00
Sulawesi Tengah	0.57	2.34	22.64	61.19	13.26	100.00
Sulawesi Selatan	3.62	10.46	37.16	41.49	7.27	100.00
Sulawesi Tenggara	1.30	8.94	25.65	46.50	17.61	100.00
Gorontalo	2.90	5.07	36.67	47.65	7.72	100.00
Sulawesi Barat	1.66	6.99	28.15	48.47	14.73	100.00
Maluku	3.86	1.91	19.60	53.64	20.99	100.00
Maluku Utara	0.59	4.10	20.24	53.43	21.64	100.00
Papua Barat	2.10	6.92	23.48	46.41	21.09	100.00
Papua	2.77	3.85	32.00	50.06	11.32	100.00
Indonesia	2.63	7.52	32.24	47.42	10.19	100.00

Sumber/Source: Susenas, 2012

Percentase Rumah Tangga Menurut Provinsi dan Partisipasi dalam Kegiatan Sosial Keagamaan, 2012
Percentage of Households By Province and Participation in Religious Social Activities, 2012

Provinsi Province	Tingkat Partisipasi / Level of Participations					Jumlah Total
	Tidak Ada No	Tidak Pernah Never	Jarang Seldom	Sering Often	Selalu Always	
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Aceh	1.77	2.90	22.01	60.81	12.50	100.00
Sumatera Utara	1.43	4.74	28.85	56.34	8.64	100.00
Sumatera Barat	2.42	5.24	37.14	47.40	7.80	100.00
Riau	0.82	4.27	26.94	55.83	12.14	100.00
Jambi	1.42	4.89	19.57	64.34	9.79	100.00
Sumatera Selatan	3.00	7.43	34.50	48.71	6.37	100.00
Bengkulu	1.59	6.93	32.96	51.80	6.72	100.00
Lampung	1.51	4.68	27.93	53.23	12.65	100.00
Kepulauan Bangka Belitung	2.87	15.66	40.36	36.01	5.11	100.00
Kepulauan Riau	9.75	10.38	26.77	42.16	10.95	100.00
DKI Jakarta	1.21	15.31	39.25	35.56	8.66	100.00
Jawa Barat	1.38	6.30	34.39	48.68	9.25	100.00
Jawa Tengah	0.93	6.20	23.93	54.99	13.95	100.00
DI Yogyakarta	0.08	6.78	22.55	55.48	15.12	100.00
Jawa Timur	0.99	6.61	24.54	54.00	13.86	100.00
Banten	2.11	6.15	32.46	50.15	9.14	100.00
Bali	1.73	4.50	17.40	58.26	18.11	100.00
Nusa Tenggara Barat	1.58	4.37	31.09	52.67	10.29	100.00
Nusa Tenggara Timur	1.88	2.76	15.98	51.36	28.02	100.00
Kalimantan Barat	4.18	8.86	31.00	48.63	7.33	100.00
Kalimantan Tengah	2.71	4.65	29.55	53.70	9.39	100.00
Kalimantan Selatan	3.31	7.23	29.32	50.13	10.02	100.00
Kalimantan Timur	4.07	7.31	31.71	49.10	7.81	100.00
Sulawesi Utara	0.01	2.65	16.53	61.34	19.46	100.00
Sulawesi Tengah	2.00	4.85	26.24	52.99	13.92	100.00
Sulawesi Selatan	4.56	11.90	33.64	40.44	9.46	100.00
Sulawesi Tenggara	3.12	8.52	35.00	41.31	12.04	100.00
Gorontalo	3.21	7.22	29.31	47.55	12.70	100.00
Sulawesi Barat	4.94	8.52	32.60	38.99	14.96	100.00
Maluku	4.73	2.54	18.48	49.47	24.79	100.00
Maluku Utara	1.17	5.09	24.39	48.56	20.79	100.00
Papua Barat	3.67	5.88	19.83	45.79	24.84	100.00
Papua	3.09	8.08	24.29	47.65	16.88	100.00
Indonesia	1.72	6.62	28.68	51.24	11.74	100.00

Sumber/Source: *Susenas*, 2012

Percentase Rumah Tangga Menurut Provinsi dan Partisipasi dalam Kegiatan Sosial Keagamaan, 2012
Percentage of Households By Province and Participation in Religious Social Activities, 2012

Provinsi Province	Tingkat Partisipasi / Level of Participations					Jumlah Total
	Tidak Ada No	Tidak Pernah Never	Jarang Seldom	Sering Often	Selalu Always	
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Aceh	2.00	5.46	24.74	53.41	14.39	100.00
Sumatera Utara	1.54	5.29	29.51	56.90	6.76	100.00
Sumatera Barat	3.56	8.62	38.41	41.12	8.29	100.00
Riau	1.24	4.42	28.04	55.18	11.12	100.00
Jambi	3.60	9.91	25.19	52.82	8.48	100.00
Sumatera Selatan	2.99	10.84	36.54	42.73	6.90	100.00
Bengkulu	0.94	7.28	37.42	46.15	8.21	100.00
Lampung	3.34	7.43	28.73	46.69	13.81	100.00
Kepulauan Bangka Belitung	3.22	15.38	42.47	34.53	4.41	100.00
Kepulauan Riau	11.17	11.41	25.40	42.20	9.82	100.00
DKI Jakarta	1.21	15.31	39.25	35.56	8.66	100.00
Jawa Barat	1.73	7.44	35.63	46.34	8.86	100.00
Jawa Tengah	1.07	8.12	26.56	51.28	12.97	100.00
DI Yogyakarta	0.12	8.26	21.69	52.65	17.27	100.00
Jawa Timur	1.20	7.53	24.32	54.16	12.79	100.00
Banten	2.94	7.91	35.31	45.22	8.63	100.00
Bali	2.61	6.77	19.74	50.38	20.49	100.00
Nusa Tenggara Barat	1.06	4.77	30.48	56.87	6.82	100.00
Nusa Tenggara Timur	3.34	3.24	15.74	52.97	24.72	100.00
Kalimantan Barat	6.65	14.96	33.01	36.51	8.87	100.00
Kalimantan Tengah	3.49	6.47	39.51	45.79	4.73	100.00
Kalimantan Selatan	7.00	11.43	33.98	41.74	5.84	100.00
Kalimantan Timur	4.50	8.93	32.87	45.73	7.98	100.00
Sulawesi Utara	0.00	4.21	15.12	63.90	16.77	100.00
Sulawesi Tengah	3.79	7.72	27.78	50.58	10.13	100.00
Sulawesi Selatan	4.56	14.71	31.09	38.31	11.32	100.00
Sulawesi Tenggara	3.15	7.94	32.86	43.40	12.65	100.00
Gorontalo	1.83	7.83	28.33	49.33	12.68	100.00
Sulawesi Barat	3.05	11.84	44.39	28.50	12.22	100.00
Maluku	4.78	4.29	23.16	50.00	17.76	100.00
Maluku Utara	2.54	8.15	28.22	46.59	14.50	100.00
Papua Barat	2.73	6.96	21.05	46.89	22.36	100.00
Papua	3.73	7.29	24.81	50.18	13.99	100.00
Indonesia	2.06	8.43	30.77	48.08	10.66	100.00

Sumber/Source: *Susenas*, 2012

Percentase Rumah Tangga Menurut Provinsi dan Partisipasi dalam Kegiatan Sosial Keagamaan, 2012
Percentage of Households By Province and Participation in Religious Social Activities, 2012

Provinsi Province	Tingkat Partisipasi / Level of Participations					Jumlah Total
	Tidak Ada No	Tidak Pernah Never	Jarang Seldom	Sering Often	Selalu Always	
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Aceh	1.68	1.90	20.95	63.71	11.76	100.00
Sumatera Utara	1.33	4.22	28.23	55.83	10.39	100.00
Sumatera Barat	1.71	3.15	36.35	51.30	7.49	100.00
Riau	0.55	4.17	26.27	56.24	12.77	100.00
Jambi	0.52	2.80	17.24	69.11	10.33	100.00
Sumatera Selatan	3.00	5.73	33.48	51.69	6.10	100.00
Bengkulu	1.88	6.78	30.94	54.36	6.05	100.00
Lampung	0.93	3.81	27.68	55.29	12.29	100.00
Kepulauan Bangka Belitung	2.53	15.92	38.35	37.43	5.77	100.00
Kepulauan Riau	2.83	5.33	33.42	41.97	16.44	100.00
DKI Jakarta	-	-	-	-	-	-
Jawa Barat	0.74	4.24	32.14	52.93	9.95	100.00
Jawa Tengah	0.82	4.63	21.79	58.00	14.75	100.00
DI Yogyakarta	0.00	3.65	24.35	61.43	10.57	100.00
Jawa Timur	0.81	5.81	24.73	53.86	14.79	100.00
Banten	0.46	2.64	26.78	59.94	10.17	100.00
Bali	0.36	0.99	13.78	70.43	14.44	100.00
Nusa Tenggara Barat	1.93	4.09	31.52	49.78	12.67	100.00
Nusa Tenggara Timur	1.54	2.65	16.03	50.98	28.80	100.00
Kalimantan Barat	3.21	6.46	30.20	53.40	6.73	100.00
Kalimantan Tengah	2.31	3.72	24.50	57.71	11.76	100.00
Kalimantan Selatan	0.62	4.16	25.92	56.24	13.07	100.00
Kalimantan Timur	3.38	4.73	29.85	54.50	7.54	100.00
Sulawesi Utara	0.03	1.26	17.79	59.07	21.86	100.00
Sulawesi Tengah	1.45	3.96	25.77	53.73	15.09	100.00
Sulawesi Selatan	4.55	10.30	35.09	41.65	8.41	100.00
Sulawesi Tenggara	3.11	8.74	35.79	40.55	11.82	100.00
Gorontalo	3.90	6.92	29.79	46.68	12.72	100.00
Sulawesi Barat	5.50	7.53	29.10	42.09	15.77	100.00
Maluku	4.69	1.47	15.64	49.14	29.04	100.00
Maluku Utara	0.65	3.94	22.95	49.30	23.15	100.00
Papua Barat	4.03	5.46	19.35	45.36	25.80	100.00
Papua	2.88	8.33	24.13	46.86	17.79	100.00
Indonesia	1.40	4.85	26.64	54.32	12.79	100.00

Sumber/Source: *Susenas*, 2012

Percentase Rumah Tangga Menurut Provinsi dan Partisipasi dalam Kegiatan Sosial Kemasyarakatan, 2012
Percentage of Households By Province and Participation in Society Social Activities, 2012

Provinsi Province	Tingkat Partisipasi / Level of Participations					Jumlah Total
	Tidak Ada No	Tidak Pernah Never	Jarang Seldom	Sering Often	Selalu Always	
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Aceh	12.83	17.28	32.82	31.89	5.19	100.00
Sumatera Utara	10.08	18.29	34.44	33.27	3.92	100.00
Sumatera Barat	9.32	12.82	42.55	31.29	4.02	100.00
Riau	4.14	11.04	34.88	40.85	9.09	100.00
Jambi	4.13	11.28	30.86	48.64	5.09	100.00
Sumatera Selatan	7.62	17.57	39.03	32.00	3.78	100.00
Bengkulu	6.31	12.91	33.07	42.20	5.52	100.00
Lampung	8.42	20.08	36.27	29.85	5.38	100.00
Kepulauan Bangka Belitung	6.49	26.84	37.46	27.36	1.85	100.00
Kepulauan Riau	10.21	15.20	37.70	31.79	5.11	100.00
DKI Jakarta	2.89	25.09	36.01	29.06	6.95	100.00
Jawa Barat	10.20	21.98	39.49	24.85	3.48	100.00
Jawa Tengah	4.98	14.53	21.93	45.34	13.22	100.00
DI Yogyakarta	0.26	11.47	15.66	54.67	17.94	100.00
Jawa Timur	4.03	17.72	28.00	40.45	9.80	100.00
Banten	14.37	18.93	34.63	27.90	4.16	100.00
Bali	6.40	19.21	31.01	33.65	9.73	100.00
Nusa Tenggara Barat	16.91	27.56	30.88	21.41	3.25	100.00
Nusa Tenggara Timur	10.06	12.59	25.90	34.80	16.65	100.00
Kalimantan Barat	7.32	15.66	34.18	37.71	5.13	100.00
Kalimantan Tengah	7.69	12.85	39.02	35.92	4.52	100.00
Kalimantan Selatan	7.87	15.21	32.99	38.60	5.33	100.00
Kalimantan Timur	6.95	17.50	37.06	33.78	4.71	100.00
Sulawesi Utara	2.02	8.46	29.74	47.71	12.06	100.00
Sulawesi Tengah	8.05	17.07	36.18	32.05	6.65	100.00
Sulawesi Selatan	8.75	24.89	34.80	25.55	6.00	100.00
Sulawesi Tenggara	4.90	21.83	34.42	30.40	8.45	100.00
Gorontalo	7.56	16.74	41.11	27.69	6.90	100.00
Sulawesi Barat	12.49	28.12	25.83	24.08	9.48	100.00
Maluku	19.22	15.23	30.52	26.95	8.08	100.00
Maluku Utara	5.01	14.87	32.30	38.71	9.11	100.00
Papua Barat	13.26	20.08	30.71	26.44	9.51	100.00
Papua	15.72	17.24	32.82	29.00	5.23	100.00
Indonesia	7.63	18.27	32.36	34.39	7.35	100.00

Sumber/Source: *Susenas*, 2012

**Percentase Rumah Tangga Menurut Provinsi dan Partisipasi dalam Kegiatan
Sosial Kemasyarakatan, 2012**
*Percentage of Households By Province and Participation in Society Social
Activities, 2012*

Provinsi Province	Tingkat Partisipasi / Level of Participations					Jumlah Total	Kota / Urban
	Tidak Ada No	Tidak Pernah Never	Jarang Seldom	Sering Often	Selalu Always		
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
Aceh	9.31	17.62	34.86	31.69	6.52	100.00	
Sumatera Utara	9.88	18.41	34.02	34.83	2.86	100.00	
Sumatera Barat	8.44	13.39	41.68	31.48	5.00	100.00	
Riau	5.09	10.36	35.08	39.36	10.12	100.00	
Jambi	8.47	15.60	28.71	42.26	4.97	100.00	
Sumatera Selatan	9.11	21.19	30.02	34.68	4.99	100.00	
Bengkulu	4.96	12.33	35.66	38.65	8.41	100.00	
Lampung	11.51	19.60	32.70	27.43	8.77	100.00	
Kepulauan Bangka Belitung	7.85	27.98	34.61	27.77	1.79	100.00	
Kepulauan Riau	11.56	15.93	37.29	30.92	4.30	100.00	
DKI Jakarta	2.89	25.09	36.01	29.06	6.95	100.00	
Jawa Barat	8.28	20.87	40.44	26.28	4.14	100.00	
Jawa Tengah	3.35	14.66	22.15	45.85	13.99	100.00	
DI Yogyakarta	0.38	14.32	16.76	51.53	17.00	100.00	
Jawa Timur	2.31	16.91	28.66	41.70	10.42	100.00	
Banten	10.42	19.47	35.64	30.22	4.25	100.00	
Bali	7.05	20.06	27.65	32.86	12.37	100.00	
Nusa Tenggara Barat	17.96	27.24	28.55	23.09	3.15	100.00	
Nusa Tenggara Timur	9.58	13.42	22.49	35.98	18.53	100.00	
Kalimantan Barat	10.15	18.79	32.00	33.08	5.97	100.00	
Kalimantan Tengah	8.78	15.10	34.27	37.42	4.43	100.00	
Kalimantan Selatan	11.07	21.19	32.59	31.45	3.69	100.00	
Kalimantan Timur	8.85	19.95	35.23	31.22	4.75	100.00	
Sulawesi Utara	1.76	12.30	26.07	48.89	10.98	100.00	
Sulawesi Tengah	9.80	18.55	32.12	32.03	7.50	100.00	
Sulawesi Selatan	7.76	21.36	30.36	31.95	8.56	100.00	
Sulawesi Tenggara	2.84	14.93	32.34	35.45	14.44	100.00	
Gorontalo	9.48	20.08	37.09	26.71	6.63	100.00	
Sulawesi Barat	7.41	32.80	23.42	28.58	7.80	100.00	
Maluku	20.53	13.76	28.39	27.68	9.63	100.00	
Maluku Utara	7.07	11.12	31.71	41.58	8.52	100.00	
Papua Barat	18.06	25.32	26.15	23.30	7.18	100.00	
Papua	13.70	13.59	36.61	31.19	4.91	100.00	
Indonesia	6.59	18.81	32.66	34.32	7.63	100.00	

Sumber/Source: Susenas, 2012

**Percentase Rumah Tangga Menurut Provinsi dan Partisipasi dalam Kegiatan
Sosial Kemasyarakatan, 2012**
*Percentage of Households By Province and Participation in Society Social
Activities, 2012*

Provinsi Province	Tingkat Partisipasi / Level of Participations					Jumlah Total	Desa / Rural
	Tidak Ada No	Tidak Pernah Never	Jarang Seldom	Sering Often	Selalu Always		
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
Aceh	14.20	17.15	32.01	31.97	4.67	100.00	
Sumatera Utara	10.26	18.17	34.84	31.82	4.91	100.00	
Sumatera Barat	9.87	12.46	43.09	31.18	3.41	100.00	
Riau	3.56	11.46	34.75	41.77	8.46	100.00	
Jambi	2.33	9.49	31.76	51.29	5.13	100.00	
Sumatera Selatan	6.88	15.76	43.52	30.67	3.18	100.00	
Bengkulu	6.92	13.18	31.89	43.80	4.21	100.00	
Lampung	7.45	20.23	37.40	30.61	4.31	100.00	
Kepulauan Bangka Belitung	5.19	25.76	40.17	26.97	1.91	100.00	
Kepulauan Riau	3.63	11.69	39.66	36.00	9.02	100.00	
DKI Jakarta	-	-	-	-	-	-	
Jawa Barat	13.68	24.00	37.77	22.26	2.28	100.00	
Jawa Tengah	6.31	14.42	21.75	44.92	12.59	100.00	
DI Yogyakarta	0.00	5.46	13.34	61.27	19.92	100.00	
Jawa Timur	5.54	18.43	27.42	39.36	9.26	100.00	
Banten	22.23	17.87	32.64	23.28	3.98	100.00	
Bali	5.38	17.90	36.20	34.87	5.65	100.00	
Nusa Tenggara Barat	16.19	27.77	32.48	20.24	3.31	100.00	
Nusa Tenggara Timur	10.18	12.39	26.70	34.52	16.20	100.00	
Kalimantan Barat	6.21	14.43	35.03	39.54	4.79	100.00	
Kalimantan Tengah	7.14	11.71	41.43	35.15	4.56	100.00	
Kalimantan Selatan	5.54	10.85	33.27	43.80	6.53	100.00	
Kalimantan Timur	3.92	13.58	40.00	37.87	4.63	100.00	
Sulawesi Utara	2.26	5.06	33.00	46.66	13.02	100.00	
Sulawesi Tengah	7.51	16.61	37.43	32.06	6.39	100.00	
Sulawesi Selatan	9.32	26.89	37.32	21.92	4.55	100.00	
Sulawesi Tenggara	5.66	24.35	35.18	28.55	6.27	100.00	
Gorontalo	6.61	15.08	43.09	28.18	7.04	100.00	
Sulawesi Barat	13.99	26.73	26.55	22.75	9.98	100.00	
Maluku	18.42	16.13	31.80	26.51	7.13	100.00	
Maluku Utara	4.23	16.27	32.52	37.64	9.34	100.00	
Papua Barat	11.40	18.04	32.48	27.66	10.42	100.00	
Papua	16.35	18.38	31.63	28.31	5.33	100.00	
Indonesia	8.65	17.75	32.07	34.45	7.08	100.00	

Sumber/Source: *Susenas*, 2012

Persentase Desa yang Melakukan Kegiatan Kerja Bakti Untuk Kepentingan Umum Menurut Provinsi dan Klasifikasi Wilayah, 2011
Percentage of Village That Held 'Kerja Bakti' for Public Interest By Province and Region Classification, 2011

Provinsi Province	Kota / Urban	Desa / Rural	Kota+Desa / Urban+Rural
(1)	(2)	(2)	(2)
Aceh	88.98	83.16	83.57
Sumatera Utara	90.64	77.15	79.11
Sumatera Barat	87.33	87.04	87.12
Riau	91.72	86.58	87.07
Jambi	85.71	91.46	90.82
Sumatera Selatan	89.49	85.13	85.56
Bengkulu	88.49	81.46	82.11
Lampung	98.67	96.20	96.43
Kepulauan Bangka Belitung	86.52	90.81	89.75
Kepulauan Riau	93.89	91.44	92.35
DKI Jakarta	99.63	-	99.63
Jawa Barat	97.42	95.43	96.12
Jawa Tengah	96.89	95.50	95.90
DI Yogyakarta	100.00	99.23	99.54
Jawa Timur	96.58	92.34	93.58
Banten	93.58	93.81	93.75
Bali	98.80	97.64	98.04
Nusa Tenggara Barat	93.04	93.09	93.08
Nusa Tenggara Timur	96.74	91.30	91.64
Kalimantan Barat	88.24	85.20	85.36
Kalimantan Tengah	88.46	84.34	84.55
Kalimantan Selatan	74.30	82.98	81.90
Kalimantan Timur	96.49	86.71	87.85
Sulawesi Utara	99.31	97.65	97.93
Sulawesi Tengah	92.59	96.43	96.20
Sulawesi Selatan	94.88	91.77	92.22
Sulawesi Tenggara	94.40	95.59	95.52
Gorontalo	92.38	95.85	95.35
Sulawesi Barat	88.37	91.43	91.22
Maluku	83.87	88.36	88.09
Maluku Utara	97.67	93.86	94.16
Papua Barat	95.00	80.35	80.96
Papua	83.33	59.67	60.14
Indonesia	94.64	87.61	88.80

Sumber/Source : Diolah dari Podes, 2011 / Processed from Podes, 2011

**Percentase Desa yang Melakukan Kegiatan Gotong Royong
Untuk Mengantisipasi Bencana Alam Menurut Provinsi, 2008**
*Percentage of Villages That Held Mutual Cooperation in
Anticipation Of Natural Disaster, 2008 and 2011*

Provinsi <i>Province</i>	Kota+Desa / Urban+Rural		
	2008		2011
	(1)	(2)	(3)
Aceh	43.91	33.33	
Sumatera Utara	27.95	22.61	
Sumatera Barat	53.68	10.18	
Riau	39.15	8.01	
Jambi	32.46	6.97	
Sumatera Selatan	28.22	18.29	
Bengkulu	34.42	7.79	
Lampung	33.13	14.55	
Kepulauan Bangka Belitung	26.45	1.60	
Kepulauan Riau	42.33	2.39	
DKI Jakarta	87.64	3.32	
Jawa Barat	68.15	63.81	
Jawa Tengah	59.53	81.07	
DI Yogyakarta	79.68	5.26	
Jawa Timur	55.98	72.62	
Banten	56.45	13.59	
Bali	59.55	7.10	
Nusa Tenggara Barat	47.54	7.87	
Nusa Tenggara Timur	37.17	15.07	
Kalimantan Barat	22.84	8.02	
Kalimantan Tengah	32.32	5.57	
Kalimantan Selatan	36.47	7.14	
Kalimantan Timur	33.38	8.85	
Sulawesi Utara	54.62	14.42	
Sulawesi Tengah	43.12	11.48	
Sulawesi Selatan	53.36	21.86	
Sulawesi Tenggara	31.90	7.60	
Gorontalo	59.08	6.60	
Sulawesi Barat	65.49	5.65	
Maluku	28.59	3.22	
Maluku Utara	26.74	4.18	
Papua Barat	10.95	1.39	
Papua	13.65	7.16	
Indonesia	43.98	41.94	

Sumber/Source : Diolah dari Podes, 2008 dan 2011 / Processed from Podes, 2008 and 2011

**Percentase Desa yang Melakukan Kegiatan Gotong Royong
Untuk Mengantisipasi Bencana Alam Menurut Provinsi, 2008**
Lampiran : 16.1. *Appendix* **Percentage of Villages That Held Mutual Cooperation in
Anticipation Of Natural Disaster, 2008 and 2011**

Provinsi <i>Province</i>	Kota / Urban	
	2008	2011
	(1)	(2)
Aceh	55.37	46.65
Sumatera Utara	45.10	41.35
Sumatera Barat	46.83	56.16
Riau	49.70	36.94
Jambi	49.66	46.10
Sumatera Selatan	50.49	54.14
Bengkulu	48.12	26.62
Lampung	46.85	46.46
Kepulauan Bangka Belitung	34.12	35.96
Kepulauan Riau	50.47	51.91
DKI Jakarta	87.64	80.52
Jawa Barat	69.28	67.87
Jawa Tengah	56.45	57.91
DI Yogyakarta	84.62	82.68
Jawa Timur	56.13	53.02
Banten	68.81	58.49
Bali	61.76	69.60
Nusa Tenggara Barat	57.85	50.18
Nusa Tenggara Timur	39.49	28.26
Kalimantan Barat	25.93	28.43
Kalimantan Tengah	41.43	39.74
Kalimantan Selatan	44.29	26.51
Kalimantan Timur	57.38	75.44
Sulawesi Utara	67.77	65.05
Sulawesi Tengah	33.68	52.78
Sulawesi Selatan	56.27	43.72
Sulawesi Tenggara	47.79	48.00
Gorontalo	63.86	59.05
Sulawesi Barat	52.78	55.81
Maluku	31.82	11.29
Maluku Utara	45.35	15.12
Papua Barat	37.50	3.33
Papua	47.30	20.51
Indonesia	57.05	54.23

Sumber/Source : Diolah dari Podes, 2008 dan 2011 / Processed from Podes, 2008 and 2011

**Percentase Desa yang Melakukan Kegiatan Gotong Royong
Untuk Mengantisipasi Bencana Alam Menurut Provinsi, 2008**
Lampiran : 16.2.
Appendix *Percentage of Villages That Held Mutual Cooperation in
Anticipation Of Natural Disaster, 2008 and 2011*

Provinsi <i>Province</i>	Desa / Rural	
	2008	2011
	(1)	(2)
Aceh	42.98	32.31
Sumatera Utara	25.25	22.55
Sumatera Barat	56.72	66.94
Riau	37.91	30.77
Jambi	30.28	31.28
Sumatera Selatan	25.78	35.38
Bengkulu	32.92	34.16
Lampung	31.70	37.44
Kepulauan Bangka Belitung	23.94	26.47
Kepulauan Riau	38.36	39.19
DKI Jakarta	-	-
Jawa Barat	67.62	71.22
Jawa Tengah	60.73	62.62
DI Yogyakarta	76.58	74.52
Jawa Timur	55.92	56.35
Banten	51.91	56.96
Bali	58.44	61.37
Nusa Tenggara Barat	44.20	45.99
Nusa Tenggara Timur	37.04	33.25
Kalimantan Barat	22.64	26.33
Kalimantan Tengah	31.86	22.76
Kalimantan Selatan	35.54	22.67
Kalimantan Timur	29.82	34.39
Sulawesi Utara	52.08	53.21
Sulawesi Tengah	43.68	40.25
Sulawesi Selatan	52.92	48.16
Sulawesi Tenggara	30.97	21.69
Gorontalo	58.28	58.47
Sulawesi Barat	66.40	57.48
Maluku	28.33	21.00
Maluku Utara	25.05	25.98
Papua Barat	10.23	6.38
Papua	12.88	11.65
Indonesia	41.35	39.42

Sumber/Source : Diolah dari Podes, 2008 dan 2011 / Processed from Podes, 2008 and 2011

Percentase Desa yang Mengalami Kejadian Perkelahian Massal
Antar Warga Menurut Provinsi, 2008 dan 2011
*Percentage of Villages That Suffer Massive Fighting Between
Local People By Province, 2008 and 2011*

Provinsi <i>Province</i>	Kota+Desa / Urban+Rural	
	2008	2011
	(1)	(2)
Aceh	0.50	0.52
Sumatera Utara	1.54	1.19
Sumatera Barat	1.95	2.03
Riau	1.75	1.39
Jambi	1.15	1.02
Sumatera Selatan	0.39	0.78
Bengkulu	0.74	0.60
Lampung	0.56	0.49
Kepulauan Bangka Belitung	2.33	3.05
Kepulauan Riau	0.00	0.57
DKI Jakarta	1.50	10.11
Jawa Barat	2.71	1.73
Jawa Tengah	1.32	1.13
DI Yogyakarta	0.91	0.91
Jawa Timur	1.06	1.04
Banten	2.66	2.74
Bali	0.42	1.26
Nusa Tenggara Barat	3.29	3.69
Nusa Tenggara Timur	3.28	2.66
Kalimantan Barat	0.84	0.66
Kalimantan Tengah	0.48	1.18
Kalimantan Selatan	0.86	0.05
Kalimantan Timur	0.78	1.50
Sulawesi Utara	1.94	2.78
Sulawesi Tengah	1.25	1.21
Sulawesi Selatan	1.66	1.78
Sulawesi Tenggara	1.53	1.18
Gorontalo	1.88	0.96
Sulawesi Barat	1.12	0.94
Maluku	7.06	9.18
Maluku Utara	4.34	4.82
Papua Barat	1.08	3.89
Papua	4.71	5.71
Indonesia	1.64	1.71

Sumber/Source : Diolah dari Podes, 2008 dan 2011 / Processed from Podes, 2008 and 2011

Lampiran : 17.1. **Percentase Desa yang Mengalami Kejadian Perkelahian Massal Antar Warga Menurut Provinsi, 2008 dan 2011**
Appendix : 17.1. Percentage of Villages That Suffer Massive Fighting Between Local People By Province, 2008 and 2011

Provinsi <i>Province</i>	Kota / Urban	
	2008	2011
	(1)	(2)
Aceh	1.24	0.65
Sumatera Utara	1.66	1.78
Sumatera Barat	1.06	0.68
Riau	0.00	2.55
Jambi	2.72	0.00
Sumatera Selatan	0.33	0.64
Bengkulu	2.26	1.44
Lampung	1.35	1.33
Kepulauan Bangka Belitung	0.00	1.12
Kepulauan Riau	0.00	0.00
DKI Jakarta	1.50	10.11
Jawa Barat	2.53	2.10
Jawa Tengah	1.58	1.60
DI Yogyakarta	0.59	0.56
Jawa Timur	1.35	1.09
Banten	3.71	5.50
Bali	0.84	1.60
Nusa Tenggara Barat	5.38	5.49
Nusa Tenggara Timur	12.10	9.78
Kalimantan Barat	2.78	1.96
Kalimantan Tengah	1.43	1.28
Kalimantan Selatan	2.86	0.00
Kalimantan Timur	2.19	3.51
Sulawesi Utara	2.07	3.46
Sulawesi Tengah	3.16	6.48
Sulawesi Selatan	4.60	4.19
Sulawesi Tenggara	5.31	3.20
Gorontalo	1.20	1.90
Sulawesi Barat	2.78	4.65
Maluku	12.12	25.81
Maluku Utara	8.14	17.44
Papua Barat	6.25	25.00
Papua	17.57	10.26
Indonesia	2.23	2.51

Sumber/Source : Diolah dari Podes, 2008 dan 2011 / Processed from Podes, 2008 and 2011

Lampiran : 17.2. **Percentase Desa yang Mengalami Kejadian Perkelahian Massal Antar Warga Menurut Provinsi, 2008 dan 2011**
Appendix : Percentage of Villages That Suffer Massive Fighting Between Local People By Province, 2008 and 2011

Provinsi <i>Province</i>	Desa / Rural	
	2008	2011
	(1)	(2)
Aceh	0.44	0.51
Sumatera Utara	1.53	1.09
Sumatera Barat	2.34	2.56
Riau	1.95	1.27
Jambi	0.95	1.15
Sumatera Selatan	0.40	0.80
Bengkulu	0.57	0.51
Lampung	0.47	0.40
Kepulauan Bangka Belitung	3.09	3.68
Kepulauan Riau	0.00	0.90
DKI Jakarta	-	-
Jawa Barat	2.79	1.53
Jawa Tengah	1.22	0.95
DI Yogyakarta	1.12	1.16
Jawa Timur	0.95	1.01
Banten	2.27	1.64
Bali	0.21	1.07
Nusa Tenggara Barat	2.61	3.08
Nusa Tenggara Timur	2.76	2.19
Kalimantan Barat	0.71	0.59
Kalimantan Tengah	0.44	1.17
Kalimantan Selatan	0.62	0.06
Kalimantan Timur	0.57	1.24
Sulawesi Utara	1.92	2.64
Sulawesi Tengah	1.13	0.88
Sulawesi Selatan	1.21	1.37
Sulawesi Tenggara	1.31	1.05
Gorontalo	2.00	0.80
Sulawesi Barat	1.00	0.67
Maluku	6.67	8.11
Maluku Utara	4.00	3.73
Papua Barat	0.94	2.97
Papua	4.42	5.62
Indonesia	1.52	1.55

Sumber/Source : Diolah dari Podes, 2008 dan 2011 / Processed from Podes, 2008 and 2011

DAFTAR PUSTAKA BIBLIOGRAPHY

- Alport, G.W. *The Nature of Prejudice. 25th Anniversary Edition.* Addison-Wesley Publishing Company.
- Australian Bureau of Statistics. 2004. *Measuring Social Capital. An Australian Framework and Indicators.* Canberra: Australian Bureau of Statistics.
- Badan Pusat Statistik. 2006. *Studi Modal Sosial 2006.* Jakarta: Badan Pusat Statistik.
- . 2008. *Statistik Potensi Desa Indonesia 2008.* Jakarta: Badan Pusat Statistik.
- . 2008. *Indeks Pembangunan Manusia 2006 - 2007.* Jakarta: Badan Pusat Statistik.
- . 2010. *Pertumbuhan dan Persebaran Penduduk Indonesia. Hasil Sensus Penduduk 2010.* Jakarta: Badan Pusat Statistik.
- . 2010. *Stok Modal Sosial 2009.* Jakarta: Badan Pusat Statistik.
- . 2011. *Statistik Potensi Desa Indonesia 2011.* Jakarta: Badan Pusat Statistik.
- . 2011. *Statistik Kriminal 2011.* Jakarta: Badan Pusat Statistik.
- . 2011. *Penjelasan Data Kemiskinan.* Jakarta: Badan Pusat Statistik.
- . 2011. *Perkembangan Beberapa Indikator Utama Sosial-Ekonomi Indonesia November 2011.* Jakarta: Badan Pusat Statistik.
- . 2012. *Statistik Kriminal 2012.* Jakarta: Badan Pusat Statistik.
- . 2012. *Berita -. No. 13/02/Th. XV, 6 Februari 2012.* Jakarta: Badan Pusat Statistik.
- . 2012. *Perkembangan Beberapa Indikator Utama Sosial-Ekonomi Indonesia 2012.* Jakarta: Badan Pusat Statistik.
- . 2013. *Perkembangan Beberapa Indikator Utama Sosial-Ekonomi Indonesia November 2013.* Jakarta: Badan Pusat Statistik.
- . 2013. *Indeks Pembangunan Manusia Provinsi dan Nasional, 1996 - 2011.* [Online]. Tersedia:
http://www.bps.go.id/tab_sub/view.php?tabel=1&daftar=1&id_subyek=26¬ab=2. [26 November 2013].

- 2013. *Jumlah dan Persentase Penduduk Miskin, Garis Kemiskinan, Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1), dan Indeks Keparahan Kemiskinan (P2) Menurut Provinsi*. [Online]. Tersedia: http://www.bps.go.id/tabc_sub/view.php?kat=1&tabel=1&daftar=1&id_subyek=23¬ab=1. [26 November 2013].
- 2013. *Laju Pertumbuhan Produk Domestik Regional Bruto Atas Dasar Harga Konstan 2000 Menurut Provinsi, 2006 - 2012 (Persen)*. [Online]. Tersedia: <http://www.bps.go.id>. [26 November 2013].
- dan Badan Perencanaan Pembangunan Nasional. 2013. *Data dan Informasi Kinerja Pembangunan 2004-2012*. Jakarta.
- Eman, Y.S. 2012. *Pendapatan Per Kapita (Income Per Capita/IPC)*. [Online]. Tersedia: <http://ekonomikelasx.blogspot.com/2012/02/pendapatan-per-kapita-income-per.html>. [17 September 2013].
- Grootaert, dan Bastelaer, T.V. 2001. *Understanding and Measuring Social Capital: A Synthesis Of Findings And Recommendations From The Social Capital Initiative. Social Capital Initiative Working Paper No. 24*. World Bank.
- dan Bastelaer, T.V. 2002. *The Role of Social Capital in Development. An Empirical Assesment*. New York: Cambridge University Press.
- , dkk. 2004. *Measuring Social Capital: An Integrated Questionnaire. World Bank Working Paper No. 18*. Washington: The World Bank.
- Harper, R. 2002. *The Measurement of Social Capital in The United Kingdom*. Office for National Statistics.
- Haryanto. 2011. *Pengertian Interaksi Sosial*. [Online]. Tersedia: <http://belajarpsikologi.com/pengertian-interaksi-sosial/>. [17 September 2013].
- Hauberer, Julia. 2011. *Social Capital Theory. Towards a Methodological Foundation*. Jerman.
- Lin, N. 1999. *Building a Network Theory of Social Capital*. Dept. of Sociology. Duke University.

- Matnuh. 2012. *Pengertian Kesenjangan Sosial*. [Online]. Tersedia: <http://id.shvoong.com/social-sciences/sociology/2308744-pengertian-kesenjangan-sosial/>. [17 September 2013].
- Narayan, D. 1999. *Bonds and Bridges: Social Capital and Poverty*. World Bank.
- (1999). *Bonds and Bridges: Social Capital and Poverty, Policy Research Working Paper 2167*. Washington: The World Bank.
- North, D., 1990. *Institutions, Institutional Change, and Economic Performance*. New York: Cambridge University Press.
- Oceannaz. 2010. *Modal Sosial Sebagai Modal Dasar Dalam Pemberdayaan Masyarakat*. [Online]. Tersedia: <http://oceannaz.wordpress.com/2010/07/29/modal-sosial-sebagai-modal-dasar-dalam-pemberdayaan-masyarakat/>. [26 November 2013].
- Olson, M. 1982. *The Rise and Decline of Nations: Economic Growth, Stagflation, and Social Rigidities*. New Haven, CT: Yale University Press.
- Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD). 2001. *The Well-being of Nations. The Role of Human and Social Capital*. Perancis: OECD.
- Prayitno, U. S. 2009. *Tantangan dan Agenda Pembangunan Sosial: Pemenuhan Hak Dasar Masyarakat*. Jakarta: Pusat Pengkajian Pengolahan Data dan Informasi (P3DI) Sekretariat Jenderal DPR RI.
- Population Reference Bureau. 2012. *World Population Data Sheet*.
- Putnam, Robert D. 1993. *The Prosperous Community Social Capital and Public Life, The American Prospect 13: 3542*.
- 1995. *Bowling Alone: America's Declining Social Capital*. [Online]. Tersedia: http://www.saddleback.edu/faculty/agordon/documents/Bowling_Alone.pdf.html. [17 September 2013].
- Sambas, Dedi. 2011. *Struktur Sosial*. [Online]. Tersedia: <http://pensa-sb.info/wp-content/uploads/2011/03/struktur-sosial.pdf>. [17 September 2013].
- Soedijati, E.K. 1995. *Solidaritas dan Masalah Sosial Kelompok Waria. Tinjauan Tentang Sosiologis Dunia Sosial Kaum Waria Di Kotamadya Bandung*. [Online]. Tersedia: (<http://repository.widyatama.ac.id/xmlui/bitstream/handle/10364/535/p0007.pdf?sequence=1>). [17 September 2013].

- Stone, W. dan Hughes, J. 2002. *Understanding com. Family Matters No.61 Autumn 2002*. Australian Institute of Family Studies.
- Supratikno, A. 2011. *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Lama Mencari Kerja Bagi Tenaga Kerja Terdidik Di Kabupaten Semarang. (Studi Kasus Kecamatan Ungaran Barat & Kecamatan Bancak)*. Semarang : Universitas Diponegoro.
- United Nations Development Programme. 2013. *Summary Human Development Report 2013. The Rise of the South: Human Progress in a Diverse World*. UNDP.
- Universitas Negeri Semarang. 2011. *Pandecta. Jurnal Ilmu Hukum*. Vo. 6 No.1. Hal 1-194. Semarang: Universitas Negeri Semarang.
- Woolcock, Michael. 1998. *Social Capital and Economic Development: Toward a Theoretical Synthesis and Policy Framework*, *Theory and Society* 27 (2): 151-208.
- Woolcock, Michael, dan Deepa Narayan. (2000). *Social Capital: Implications for Development Theory, Research, and Policy*. *World Bank Research Observer* 15 (2).
- World Bank. *World Development Report 2000/2001: Attacking Poverty*. New York: Oxford University Press: 2000.
- Yudhoyono, S. B. 2013. *Pidato Presiden: Pidato Kenegaraan dalam Rangka HUT ke-68 Proklamasi Kemerdekaan RI*. [Online]. Tersedia: <http://www.presidenri.go.id/index.php/pidato/2013/08/16/2172.html>. [12 September 2013].
- Yustika, dkk. 2012. *Proyeksi Ekonomi Indonesia 2013. Pembangunan Di Atas Pijakan Rapuh*.

DATA

Mencerdaskan Bangsa



BADAN PUSAT STATISTIK

Jl. dr. Sutomo No. 6-8 Jakarta 10710
Telp. : (021) 3841195, 3842508, 3810291-4, Fax. : (021) 3857046
Homepage : <http://www.bps.go.id> E-mail : bpshq@bps.go.id

